

# Mengoperasikan Indikator dan Platform Data Terpercaya

## Laporan

Disiapkan pada tanggal 16 September 2022







Disclaimer. Publikasi ini dibuat dengan dukungan keuangan dari Uni Eropa. Isinya adalah tanggung jawab penuh dari proyek KAMI European Forest

© European Forest Institute, 2022







## **Tabel of contents**

Daftar	
Dallai	Iave

Daftar Singkatan

Pendahuluan
Chapter 1: Pemutakhiran dan revisi indikator dan data Terpercaya
1.1 Penyempurnaan indikator Terpercaya2
1.2 Status Indikator Terpercaya2
Chapter 2: Pedoman/SOP untuk berbagi data di tingkat nasional
2.1 Prosedur
2.2 Analisis Data dan Penyebarluasan Informasi25
Chapter 3: Pedoman/SOP pengumpulan data di tingkat daerah
3.1 Hasil studi percontohan pengumpulan data di tingkat daerah26
3.2 Prosedur pengumpulan data dari tingkat daerah28
3.3 Peraturan nasional yang diusulkan untuk pengumpulan data di daerah3
Chapter 4: Menyempurnakan dan mengoperasionalkan indikator Terpercaya, termasuk pembelajaran
4.1 Penyempurnaan dan penerapan indikator Terpercaya33
4.2 Lokakarya dengan BAPPENAS dan pemerintah daerah terpilih43
4.3 Pembelajaran dari proses Terpercaya4
Chapter 5: Platform Terpercaya yang didesain ulang dan diperbarui, termasuk database multi-tahun
Chapter 5: Platform Terpercaya yang didesain ulang dan diperbarui, termasuk database multi-tahun
Chapter 5: Platform Terpercaya yang didesain ulang dan diperbarui, termasuk database multi-tahun  5.1 Upgrade desain sistem online Terpercaya
Chapter 5: Platform Terpercaya yang didesain ulang dan diperbarui, termasuk database multi-tahun  5.1 Upgrade desain sistem online Terpercaya
Chapter 5: Platform Terpercaya yang didesain ulang dan diperbarui, termasuk database multi-tahun  5.1 Upgrade desain sistem online Terpercaya
Chapter 5: Platform Terpercaya yang didesain ulang dan diperbarui, termasuk database multi-tahun  5.1 Upgrade desain sistem online Terpercaya
Chapter 5: Platform Terpercaya yang didesain ulang dan diperbarui, termasuk database multi-tahun  5.1 Upgrade desain sistem online Terpercaya
Chapter 5: Platform Terpercaya yang didesain ulang dan diperbarui, termasuk database multi-tahun  5.1 Upgrade desain sistem online Terpercaya
Chapter 5: Platform Terpercaya yang didesain ulang dan diperbarui, termasuk database multi-tahun 5.1 Upgrade desain sistem online Terpercaya
Chapter 5: Platform Terpercaya yang didesain ulang dan diperbarui, termasuk database multi-tahun  5.1 Upgrade desain sistem online Terpercaya
Chapter 5: Platform Terpercaya yang didesain ulang dan diperbarui, termasuk database multi-tahun  5.1 Upgrade desain sistem online Terpercaya

8.1. Proses perbaikan platform	.78
8.2. Pembelajaran dan rekomendasi	. 80
8.3 Data gaps	.81
Daftar Lampiran	.91
Lampiran A - Daftar data yang dibutuhkan	. 91
Lampiran B - Risalah FGD	. 96
Lampiran C - Draf surat berbagi data	. 97
Lampiran D - Format berita acara serah terima data	. 98
Lampiran E - Perjanjian penyediaan data prioritas SDI	. 99
Lampiran F - Metodologi Pedoman/SOP untuk Berbagi Data Terpercaya di Tingkat Nasional .1	106
Lampiran G - Metodologi Pedoman/SOP Pengumpulan Data Terpercaya di Tingkat Daerah1	108
Lampiran H - Penanggung jawab pemutakhiran data1	110
Lampiran I - Skema pemutakhiran data berdasarkan sumber data1	111
Lampiran J - Ringkasan proses pemutakhiran data1	113

### **Daftar Tabel**

- Tabel 1. Penambahan indikator dan penyempurnaan metodologi dan data
- Tabel 2. Data indikator Terpercaya yang hanya dapat diperoleh dari pemerintah daerah
- Tabel 3. Jadwal FGD dan lokakarya dengan kementerian/lembaga
- Tabel 4. Daftar pertanyaan dalam sesi FGD
- Tabel 5. Rangkuman hasil FGD tentang penyempurnaan indikator
- Tabel 6. Spesifikasi sistem
- Tabel 7. Pengembangan sistem
- Tabel 8. Data dikumpulkan per 16 September
- Tabel 9. Jenis Manual Entry
- Tabel 10. Indikator yang datanya bersumber dari situs web data publik K/Ls
- Tabel 11. Jenis Admin di platform
- Tabel 12. Input untuk Pengembangan Sistem dari K/L
- Tabel 13. Kesenjangan data
- Tabel 14. Daftar data yang dibutuhkan
- Tabel 15. Daftar Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi dalam FGD
- Tabel 16. Lokasi pengumpulan data studi percontohan di tingkat daerah
- Tabel 17. OPD yang diwawancarai
- Tabel 18. Skema pemutakhiran data di platform Terpercaya
- Tabel 19. Sumber data dibagi berdasarkan skema pemutakhiran data secara manual

### **Daftar Gambar**

- Gambar 1. Proses transfer data oleh penanggung jawab di kabupaten
- Gambar 2. Persentil dan nilai ambang batas di platform
- Gambar 3. Proses Integrasi API
- Gambar 4. Situs web SDI

Gambar 5. Pemutakhiran indikator Terpercaya dengan data yang bersumber dari situs web SDI

Gambar 6. Contoh situs web data publik K/L untuk luas kebakaran

### **Daftar Singkatan**

BAPPENAS. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BPS Badan Pusat Statistik

BIG Badan Informasi Geospasial

DPMPTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PADITAPA Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa

Paksaan

Kementan Kementerian Pertanian

Kemendagri Kementerian Dalam Negeri

K/L Kementerian/Lembaga

K/L/D Kementerian/Lembaga/Daerah

KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

OPD Organisasi Perangkat Daerah

RAD KSB Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan

RAN KSB Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RTRWK Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

TPB Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SDI Satu Data Indonesia

SIPD Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

SP4N LAPOR Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

#### Pendahuluan

Terpercaya berupaya untuk mendorong perubahan menuju produksi komoditas berkelanjutan di seluruh kabupaten di Indonesia dengan meningkatkan pengakuan pasar atas upaya dan perkembangan bertahap yang dilakukan untuk mewujudkan keberlanjutan. Proses Terpercaya dapat dibagi ke dalam dua fase. Dalam fase pertama, European Forest Institute (EFI) dan Yayasan Inobu akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam Komite Penasihat (AC) untuk memandu proses Terpercaya dalam mengembangkan 22 indikator. Fase kedua Terpercaya dimulai saat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memimpin rapat AC. Lima pertemuan AC dan serangkaian *Focus Group Discussion* di tingkat pusat dan daerah, diketuai oleh BAPPENAS, yang dilakukan pada tahap kedua untuk memvalidasi dan menguji indikator di empat kabupaten.

Pada akhir fase kedua, proyek KAMI yang didanai EU memulai kegiatan "Mengoperasikan indikator dan platform data Terpercaya" untuk menyempurnakan indikator yang ada dan mengembangkan platform data Terpercaya secara lebih lanjut. Penyempurnaan ini mencakup memperkuat mekanisme pengukuran dan mekanisme pengumpulan data *time series* untuk setiap indikator. Proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan platform web Terpercaya agar dapat memberikan akses ke audiens yang lebih luas ke Informasi tentang kinerja pemerintah kabupaten menuju keberlanjutan.

Laporan ini merangkum perkembangan yang dicapai, termasuk status indikator Terpercaya, pedoman berbagi data (pengumpulan), dan platform web. Laporan ini terdiri dari delapan bagian yang menjabarkan tentang:

- Status terbaru dari indikator Terpercaya, termasuk penambahan indikator ketahanan pangan
- Pedoman atau prosedur operasi standar (SOP) untuk berbagi data tentang indikator yang tercakup dalam dataset nasional yang tersedia di tingkat nasional
- Pedoman atau SOP pengumpulan data untuk indikator yang tidak tercakup dalam dataset nasional yang tersedia di tingkat nasional, dengan berfokus pada pengumpulan data di tingkat daerah
- Penyempurnaan indikator dan pembelajaran dari proses ini
- Pemutakhiran platform web Terpercaya, termasuk database multi-tahun
- Pedoman atau SOP untuk pemutakhiran data indikator secara otomatis dan manual, serta pemeliharaan data untuk indikator Terpercaya
- Pedoman atau SOP untuk operasionalisasi dan pemeliharaan platform web Terpercaya
- Rekomendasi tentang cara meningkatkan dan melakukan upgrade untuk platform web Terpercaya

Laporan ini merangkum pekerjaan yang dilakukan pada bulan Februari - Juni 2022 yang melibatkan 12 *Focus Group Discussion* dan dua lokakarya dengan sekitar 30 pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah kabupaten dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

# Chapter 1: Pemutakhiran dan revisi indikator dan data Terpercaya

#### 1.1 Penyempurnaan indikator Terpercaya

Pada fase kedua Terpercaya, yakni pada bulan November 2019 - Maret 2021, sebanyak 22 indikator dipilih untuk mengukur kinerja pemerintah daerah menuju produksi komoditas berkelanjutan melalui proses multi-pemangku kepentingan yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Indikator tersebut kemudian divalidasi di empat kabupaten.

Di awal proyek, beberapa indikator disempurnakan secara lebih lanjut karena belum tercapainya kesepakatan tentang mekanisme verifikasi di fase kedua Terpercaya. Sebanyak 12 *Focus Group Discussion* (FGD) dan 2 lokakarya telah diselenggarakan dengan kementerian/lembaga di Indonesia selama berjalannya proyek. Selain menyempurnakan indikator, rapat tersebut juga membahas tentang ketersediaan dataset di masing-masing kementerian. Yang terakhir, BAPPENAS juga mengusulkan indikator baru tentang ketahanan pangan, sehingga menjadi 23 indikator.

Menanggapi permintaan BAPPENAS untuk memasukkan ketahanan pangan sebagai salah satu indikator Terpercaya, tiga FGD telah dilakukan bersama dengan Badan Pangan Nasional (BPN). FGD tersebut bertujuan untuk memfasilitasi diskusi mendalam tentang indikator ketahanan pangan dan mengevaluasi sumber data yang dapat digunakan. FGD pertama dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021, FGD kedua pada tanggal 5 Oktober 2021, dan FGD ketiga pada tanggal 5 April 2022. FGD difokuskan pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) yang dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional (BPN). FSVA adalah alat yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi daerah rentan dan memberikan rekomendasi tentang cara meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di tingkat kabupaten di seluruh Indonesia. Konsep ketahanan pangan dalam FSVA dikembangkan berdasarkan beberapa parameter yang terbagi dalam tiga pilar ketahanan pangan: ketersediaan pangan; keterjangkauan pangan; dan pemanfaatan pangan. Parameter-parameter tersebut digabungkan untuk menghasilkan skor komposit untuk kondisi ketahanan pangan, yang kemudian digunakan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP)<sup>1</sup>. IKP mengadopsi pengukuran Global Food Security Index (GFSI) dengan melakukan penyesuaian terhadap berbagai metodologi berdasarkan ketersediaan data dan informasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

#### 1.2 Status Indikator Terpercaya

Proyek ini juga telah menyempurnakan 12 indikator Terpercaya, termasuk dengan meninjau kembali jenis data yang digunakan dalam perhitungan dan rumus untuk mengukur indikator.

Badan Ketahanan Pangan 2021, Indeks Ketahanan Pangan 2021

Perubahan lebih lanjut tidak diperlukan untuk 11 indikator lainnya. Dua belas indikator yang sudah dimodifikasi adalah:

- Perlindungan untuk hutan tetap (Indikator 1)
- Perlindungan untuk lahan gambut (Indikator 4)
- Mitigasi perubahan iklim (Indikator 5)
- Pengendalian kualitas lingkungan hidup (Indikator 7)
- Pengakuan masyarakat hukum adat (Indikator 9)
- Resolusi konflik lahan dan pertanian (Indikator 10)
- Ketahanan pangan (Indikator 13) (indikator baru)
- Jumlah Asosiasi/Kelompok Petani Perkebunan (Indikator 15)
- Bantuan untuk petani perkebunan (Indikator 16)
- Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten (Indikator 21)
- Mekanisme pengaduan (Indikator 22)
- Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan (Indikator 23)

Perubahan untuk 12 indikator tersebut dijelaskan di bawah ini:

#### a. Perlindungan untuk hutan tetap (Indikator 1)

Indikator 1 bertujuan untuk memantau komitmen pemerintah kabupaten dalam melindungi kawasan konservasi di wilayah yurisdiksi mereka. Pemangku kepentingan menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa Indikator 1 menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) sebagai penyebut. Untuk mengukur komitmen pemerintah kabupaten dalam perlindungan hutan, Terpercaya harus menggunakan kawasan hutan sebagai rujukan.

Indikator 1 kemudian diperbarui untuk menilai kepatuhan RTRWK dengan zonasi yang ditetapkan dalam kawasan hutan. Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di kawasan hutan dengan kawasan lindung dalam RTRWK, serta peta indikatif penghentian pemberian izin baru, sebagai berikut:

$$HP_i(\%) = \frac{(HL_i + HK_i + M_i)}{HL_k + HK_k} x \, 100\%$$

di mana:

- HL<sub>i</sub>: total luas Hutan Lindung di kabupaten i (hektare)
- HL<sub>i</sub>: total luas Hutan Konservasi di kabupaten i (hektare)
- M<sub>i</sub>: total luas menurut peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) di kabupaten i (hektare), di luar HL<sub>i</sub>+H<sub>i</sub>
- HL<sub>k</sub> + HK<sub>k</sub>: total luas Hutan Lindung dan Hutan Konservasi dalam Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Kawasan Hutan

Rumus untuk penerapan indikator tersebut diubah sebagai berikut:

$$FC.HP_i(\%) = \frac{(FC.HL_i + FC.HK_i + FC.M_i)}{HL_k + HK_k} \times 100\%$$

#### di mana:

- FC.HL<sub>i</sub>: total luas tutupan hutan Hutan Lindung di kabupaten i (hektare)
- FC.HK<sub>i</sub>: total luas tutupan Hutan Konservasi di kabupaten i (hektare)
- FC.M<sub>i</sub>: total luas menurut peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) di kabupaten i (hektare), di luar HL<sub>i</sub>+H<sub>i</sub>
- HL<sub>k</sub> + HK<sub>k</sub>: total luas Hutan Lindung dan Hutan Konservasi dalam Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Kawasan Hutan

#### b. Perlindungan untuk lahan gambut (Indikator 4)

Indikator ini digunakan untuk memantau upaya pemerintah daerah dalam melindungi lahan gambut. Pada rumus sebelumnya, pengukuran Indikator 4 adalah persentase total lahan gambut yang dilindungi oleh RTRWK dan PIPPIB dibandingkan dengan total luas lahan gambut di kabupaten tersebut. Total luas lahan gambut diukur berdasarkan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi menurut RTRWK dan PIPPIB. Para pemangku kepentingan menyampaikan kekhawatiran bahwa pengukuran tersebut tidak mempertimbangkan lahan gambut di luar kawasan hutan, seperti areal penggunaan lain (APL) yang harus dilindungi. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ekosistem gambut terdapat di dalam dan di luar kawasan hutan, di mana 31,79% lahan gambut terdapat di area yang dikategorikan sebagai APL². Untuk memasukkan lahan gambut yang terletak di kawasan hutan dan APL, Indikator 4 harus mengukur proporsi lahan gambut dengan fungsi lindung dalam RTRWK dibandingkan dengan lahan gambut dengan fungsi lindung yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kabupaten, seperti yang dijelaskan dalam rumus di bawah ini:

$$HP_i(\%) = \frac{RTRWK_{lindung} \cap KHG}{KHG_{lindung}} \times 100\%$$

#### di mana:

- RTRWK<sub>lindung</sub> ∩ KHG: total luas lahan yang termasuk dalam hidrologi gambut yang berada di dalam area/wilayah/kawasan fungsi lindung yang teridentifikasi di dalam RTRW Kabupaten (hektare)
- KHG<sub>indung</sub>: total luas lahan gambut dengan fungsi lindung di kabupaten (hektare).

#### c. Mitigasi perubahan iklim (Indikator 5)

Indikator 5 bertujuan untuk mengukur perkembangan yang dicapai oleh pemerintah kabupaten untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan terhadap Tingkat Emisi Rujukan Hutan (FREL) yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akan tetapi, emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di tingkat pusat untuk semua kabupaten tidak diperhitungkan atau dilaporkan karena data FREL tidak tersedia. Oleh karena itu, indikator tersebut tidak dapat diukur dan harus disesuaikan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional 2020-2049

Para pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi menyampaikan tiga pertimbangan penting untuk mengukur perkembangan yang dicapai oleh pemerintah daerah untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi, termasuk:

- Finalisasi laporan inventarisasi gas rumah kaca (IGRK).
- Tersedianya perhitungan tingkat emisi rujukan hutan (FREL) yang digunakan sebagai baseline oleh pemerintah kabupaten.
- Tersedianya Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. Setelah Kabupaten menghitung emisi, wajib perhitungan tersebut harus diterjemahkan ke dalam rencana aksi.

Berdasarkan poin-poin di atas, rumus baru untuk indikator 5 adalah:

$$EDF = (v_n \times w_n) + (v_m \times w_m) + (v_a \times w_a)$$

di mana:

- $v_n \in \{0,1\}, v_m \in \{0,1\}, v_a \in \{0,1\}$
- $v_n$ : Indeks yang menunjukkan ada/tidaknya pelaporan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK)
- $w_n$ : Bobot indeks pelaporan inventarisasi emisi GRK (25%)
- $v_{\rm m}$ : Indeks yang menunjukkan ada/tidaknya rumus perhitungan FREL (baseline) di tingkat kabupaten
- $w_m$ : Bobot indeks rumus FREL (baseline) (30%)
- v<sub>a</sub>: Indeks yang menunjukkan ada/tidaknya rencana aksi mitigasi perubahan iklim
- w<sub>a</sub>: Bobot indeks keberadaan rencana aksi mitigasi perubahan iklim (40%)

#### d. Pengendalian kualitas lingkungan hidup (Indikator 7)

Indikator ini digunakan untuk melihat kualitas air dan udara di suatu yurisdiksi dalam rangka memastikan bahwa kegiatan pembangun tidak membawa dampak lingkungan yang buruk bagi masyarakat lokal. Rumus sebelumnya berfokus pada pengukuran kualitas air dan udara. Para pemangku kepentingan menyebutkan bahwa Indikator 7 harus memasukkan kualitas sumber daya lahan dalam pengukuran kualitas lingkungan hidup. Penggundulan hutan, pembukaan lahan dan penggunaan bahan kimia untuk berbagai aktivitas berbasis lahan tidak hanya dapat menurunkan kualitas air dan udara, melainkan juga kualitas lahan.

Di Indonesia, kualitas kinerja lingkungan hidup diukur dengan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tiga indikator kualitas lingkungan hidup yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)³. Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup secara komprehensif, IKTL perlu dimasukkan karena indeks tersebut mengukur aspek konservasi dan rehabilitasi yang memengaruhi perubahan tutupan lahan/hutan. Indikator 7 dapat menggunakan IKLH sebagai sumber data untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di yurisdiksi tersebut. Nama indikator juga disesuaikan karena sumber data telah berubah. Rumus baru untuk indikator 7 adalah

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2017.

$$AWPC_i = IKLH$$

di mana:

• IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten

#### e. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Indikator 9)

Indikator 9 bertujuan untuk menilai komitmen pemerintah daerah dalam mengakui tanah adat. Ada dua cara untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dengan Indikator 9:

- Menggunakan proporsi tanah adat yang sudah diakui berdasarkan Perda Bupati dibandingkan dengan total luas (potensial) tanah adat di kabupaten; atau
- Memeriksa apakah salah satu dari kriteria berikut terpenuhi: jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui; jumlah MHA terverifikasi, atau kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional; jumlah kearifan lokal yang terverifikasi, atau hak pengetahuan tradisional; jumlah hak MHA yang dilegalisasi; persentase MHA yang difasilitasi dibandingkan dengan total MHA; persentase MHA yang disediakan infrastruktur dibandingkan dengan total MHA.

Berdasarkan proses pengumpulan data sebelumnya, peraturan daerah tentang tanah adat disusun oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada registrasi wilayah adat di Indonesia. Pemangku kepentingan menyampaikan kekhawatiran tentang penggunaan dataset yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat dan menyarankan untuk mencari dataset resmi pemerintah di tingkat nasional.

Terpercaya dapat menggunakan data tanah/hutan adat dan wilayah kelola MHA yang telah diakui oleh KLHK/Kemendagri di kabupaten tersebut. Data ini tersedia di KLHK. Nama indikator juga disesuaikan karena sumber data telah berubah. Kesepakatan yang dicapai melalui FGD dan lokakarya adalah untuk hanya menggunakan satu pendekatan, yakni:

$$CL(\%) = \frac{(CLlegalised)}{CL Area_i} x 100\%$$

di mana:

- (*CLlegalised*): Luas wilayah kelola MHA yang sudah diakui berdasarkan KLHK/Kemendagri di kabupaten i (hektare)
- *CL Area*<sub>i</sub>: Luas hutan adat di kabupaten i (hektare) berdasarkan peta indikatif hutan adat

#### f. Resolusi konflik lahan dan pertanian (Indikator 10)

Indikator 10 bertujuan untuk memantau kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik sosial terkait dengan pembangunan perkebunan. Indikator 10 sebelumnya menggunakan total konflik yang dilaporkan di tingkat nasional dalam pengukurannya. Setelah proses pengumpulan data, ternyata belum semua kabupaten mengumpulkan informasi pada tahun terjadinya konflik. Ini membuat satu kabupaten tampak memiliki lebih banyak konflik daripada kabupaten lainnya, padahal belum tentu demikian. Pengumpulan

data konflik pada tahun yang sama juga menjadi tantangan, terutama data khusus untuk sektor perkebunan di semua kabupaten. Oleh karena itu, sumber data perlu disesuaikan.

Untuk mengukur kinerja kabupaten dalam resolusi konflik lahan dan pertanian, Terpercaya dapat menggunakan SOP untuk penanganan konflik lahan dan pertanian di suatu kabupaten. Saat ini, data tersebut tersedia di tingkat kabupaten. Setelah itu, Terpercaya dapat mengumpulkan SOP untuk penanganan konflik lahan dan pertanian melalui platform SDI. Data SOP untuk penanganan konflik lahan dan pertanian adalah salah satu dataset yang disetujui oleh SDI untuk disediakan di platform SDI. Nama indikator juga disesuaikan karena sumber data telah berubah.

Rumus baru untuk indikator 10 adalah:

 $RK \in \{0,1\}$ 

di mana:

• RK sama dengan 1 jika kabupaten i memiliki SOP penanganan konflik lahan dan pertanian dan 0 jika sebaliknya.

#### g. Ketahanan pangan (Indikator 13)

Indikator 13 adalah indikator baru yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mencapai ketahanan pangan di daerah mereka. Badan Pangan Nasional (BPN) melakukan penilaian ketahanan pangan secara berkala di seluruh kabupaten di Indonesia dengan menggunakan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), dengan nilai indeks yang berkisar antara 0-1.

Indikator 13 Terpercaya akan menggunakan IKP sebagai sumber data. Aspek yang diukur oleh IKP adalah: ketersediaan pangan; keterjangkauan pangan; dan pemanfaatan pangan. Perhitungan IKP yang komprehensif dapat menilai ketahanan pangan di tingkat kabupaten. Database IKP tersedia setiap tahun di situs web: <a href="http://app2.badanpangan.go.id/">http://app2.badanpangan.go.id/</a>.

Rumus untuk indikator 13 adalah:

$$FSI = IKP_i$$

di mana:

• IKPi : Indeks Ketahanan Pangan di kabupaten i (indeks)

#### h. Jumlah Asosiasi/Kelompok Petani Perkebunan (Indikator 15)

Indikator 15 bertujuan untuk menghitung jumlah asosiasi petani perkebunan, khususnya kelapa sawit, di tingkat kabupaten. Ini dilakukan dengan menghitung jumlah poktan per seribu petani. Akan tetapi, para pemangku kepentingan menyebutkan bahwa poktan pertanian (yang biasanya berfokus pada tanaman pangan) dan poktan perkebunan perlu dibedakan. Kementerian Pertanian memiliki data yang relevan.

Rumus untuk indikator 15 adalah:

$$CL(\%) = \frac{plant. G_i}{plant. F_i} \times 100\%$$

di mana:

- $plant. G_i$ : Jumlah kelompok tani perkebunan yang terdaftar di kabupaten i (total).
- plant. F<sub>i</sub>: Jumlah petani swadaya di kabupaten i (total)

#### i. Bantuan untuk petani perkebunan (Indikator 16)

Indikator 16 bertujuan untuk mengukur bantuan pemerintah untuk petani kecil dan diukur dengan membandingkan jumlah penyuluh dan jumlah petani kecil di kabupaten tersebut. Kementerian Pertanian memiliki data yang relevan.

Rumus untuk indikator 16 adalah:

$$CL(\%) = \frac{ext. agent_i}{plant. F_i} \times 100\%$$

di mana:

- plant. G<sub>i</sub>: Jumlah penyuluh perkebunan pada kabupaten i (total)
- plant. F<sub>i</sub>: Jumlah petani swadaya di kabupaten i (total)

## j. Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten (Indikator 21)

Indikator 21 bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah kabupaten dalam memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Indikator ini diukur dengan mengidentifikasi keberadaan SOP untuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan pengembangan rencana jangka menengah dan tahunan. Akan tetapi, setelah melakukan proses pengumpulan data, ternyata data tersebut tidak tersedia.

Dari diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah dapat diukur dengan SOP tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) adalah mekanisme untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Setiap kabupaten wajib menyelenggarakan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah. SOP tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang adalah salah satu dataset yang disetujui oleh Satu Data Indonesia (SDI) untuk disediakan di platform SDI. Selain itu, SOP tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang dapat diakses di platform SDI pada bulan Januari 2023. Inisiatif Terpercaya dapat menggunakan SOP ini sebagai sumber data untuk mengukur indikator 21

Rumus untuk indikator 21 adalah:

$$MSP_i \in \{0, 1\}$$

di mana:

 MSP<sub>i</sub> sama dengan 1 jika terdapat SOP untuk partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan tata ruang dan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dan 0 jika sebaliknya.

#### k. Mekanisme pengaduan (Indikator 22)

Indikator 22 bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam menangani aduan dan diukur dengan SOP yang terkait dengan penanganan pengaduan. Akan tetapi, pengumpulan data tahap 2 menunjukkan bahwa data untuk SOP tentang Mekanisme Pengaduan Masyarakat belum tersedia di tingkat nasional. Terpercaya sebaiknya menggunakan data implementasi SP4N-LAPOR di kabupaten. Melalui Peraturan Presiden Nomor 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Pemerintah Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR). Sistem pengelolaan pengaduan nasional ini dijalankan oleh semua penyedia pelayanan publik (kementerian, lembaga dan pemerintah daerah) dan sudah terintegrasi di tingkat nasional. Integrasi tersebut dimaksudkan untuk menyatukan semua data pengaduan, untuk memudahkan identifikasi jenis pengaduan yang diterima. Tujuannya adalah menggunakan data untuk meningkatkan sistem pelayanan publik di tingkat kabupaten. Daftar kabupaten yang mengoperasikan SP4N-LAPOR tersedia di Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri dapat memantau status semua pengaduan, mis. yang belum diverifikasi, tidak ditindaklanjuti, sedang diproses atau tidak diproses oleh pemerintah daerah.

Rumus untuk indikator 22 adalah:

$$I_c \in \{0, 1\}$$

di mana:

•  $I_c$  sama dengan 1 jika kabupaten mengoperasikan SP4N Lapor dan 0 jika sebaliknya.

#### I. Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan (Indikator 23)

Indikator 23 bertujuan untuk mengukur komitmen pemerintah kabupaten dalam mengembangkan rencana yurisdiksi untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, termasuk mitigasi dan adaptasi iklim. Indikator ini diukur dengan ketersediaan dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (RPPLH). Proses pengumpulan data mengindikasikan bahwa sebagian kabupaten/kota belum menyiapkan DDDTLH dan RPPLH. Oleh karena itu, sumber data perlu disesuaikan.

Indikator ini untuk menilai kinerja pemerintah dari ketersediaan DDDTLH atau RPPLH. Kedua dokumen tersebut bersifat wajib, tetapi seringkali belum disiapkan oleh kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan berdasarkan daya dukung lingkungan (DDDTLH) jika RPPLH belum tersedia. Informasi mengenai status ketersediaan DDDTLH dan RPPLH di setiap kabupaten tersedia di Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS).

Tabel 1. Penambahan indikator dan penyempurnaan metodologi dan data

N°	Perubahan Versi lam					ma Versi baru		aru
		Nama	Rumus	Data	Formulation	Nama	Rumus	Data
1	Perlindungan untuk hutan tetap		V		Indikator kebijakan  HP = [(HLi+HKi+Mi) / Areai] x 100%  Indikator pelaksanaan  FC.HPi (%) =[(FC.HLi+FC.HKi+ FC.Mi)/Areai]×100%  HLi: total luas Hutan Lindung di kabupaten i (hektare)  HKi: total luas Hutan Konservasi di kabupaten i (hektare)  Mi: total luas di bawah penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) di kabupaten i (hektare), di luar HLi& HKi  Area: total luas Hutan Lindung dan Hutan Konservasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten i (hektare)	1. Luas (peta) hutan lindung di kabupaten dalam RTRW Kabupaten  2. Luas (peta) hutan konservasi di kabupaten dalam RTRW Kabupaten  3. Luas (peta) penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) di kabupaten  4. Luas (peta) hutan lindung di kabupaten dalam SK PKH  5. Luas (peta) hutan konservasi di kabupaten dalam SK PKH	Indikator kebijakan  HP = [(HL <sub>i</sub> +HK <sub>i</sub> +M <sub>i</sub> ) / (HL <sub>k</sub> +HK <sub>k</sub> )] x 100%  Indikator pelaksanaan  FC.HP <sub>i</sub> (%) =[(FC.HL <sub>i</sub> +FC.HK <sub>i</sub> + FC.M <sub>i</sub> )/ (HL <sub>k</sub> +HK <sub>k</sub> )]×100%  HL <sub>i</sub> : total luas Hutan Lindung di kabupaten i (hektare)  HK <sub>i</sub> : total luas Hutan Konservasi di kabupaten i (hektare)  M <sub>i</sub> : total luas di bawah penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) di kabupaten i (hektare), di luar HL <sub>i</sub> +H <sub>i</sub> HL <sub>k</sub> + HK <sub>k</sub> total luas Hutan Lindung dan Hutan Konservasi dalam Surat Keputusan (SK) tentang	1. Luas (peta) hutan lindung di kabupaten dalam RTRW Kabupaten 2. Luas (peta) hutan konservasi di kabupaten dalam RTRW Kabupaten 3. Luas (peta) penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) di kabupaten 4. Luas (peta) hutan lindung di kabupaten dalam SK PKH 5. Luas (peta) hutan konservasi di kabupaten dalam SK PKH

N°	Indikator	P	erubaha	ın	Versi la	ma	Versi b	aru
		Nama	Rumus	Data	Formulation	Nama	Rumus	Data
							Penetapan Kawasan Hutan	
2	Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi	-	-	-	ESP(%) = [(RTRWL <sub>i</sub> ) / KEE <sub>i</sub> ] x 100%  RTRWL <sub>i</sub> : total luas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dengan fungsi lindung di kabupaten (hektare)  HK <sub>i</sub> : total luas Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) (hektare)	Luas (peta) RTRWK dengan fungsi lindung di Kabupaten     Luas (peta) Kawasan Ekosistem Esensial di kabupaten	ESP(%) = [(RTRWLi) / KEEi] x 100%  RTRWLi: total luas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dengan fungsi lindung di kabupaten (hektare)  HKi: total luas Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) (hektare)	1. Luas (peta) RTRWK dengan fungsi lindung di Kabupaten  2. Luas (peta) Kawasan Ekosistem Esensial di kabupaten
3	Pencegahan Kebakaran	-	-	-	ΔBA <sub>it</sub> = BA <sub>ib</sub> - BA <sub>ib</sub> BA <sub>it:</sub> = luas kebakaran di kabupaten (tahun dasar) (hektare)  BA <sub>ib+1:</sub> = luas kebakaran di kabupaten (tahun dasar + 1) (hektare)	Luas kebakaran di kabupaten	ΔBA <sub>it</sub> = BA <sub>ib</sub> - BA <sub>ib</sub> BA <sub>it</sub> = luas kebakaran di kabupaten (tahun dasar) (hektare)  BA <sub>ib+1:</sub> = luas kebakaran di kabupaten (tahun dasar + 1) (hektare)	Luas kebakaran di kabupaten

Nº	Indikator	P	erubaha	ın	Versi la	ma	Versi baru		
		Nama	Rumus	Data	Formulation	Nama	Rumus	Data	
4	Perlindungan untuk lahan gambut	-	V	V	HP (%) = ((Peat_HL <sub>i</sub> + Peat_HK <sub>i</sub> + Peat_M <sub>i</sub> ) / Peat_area <sub>i</sub> ) x 100%  Peat_ HL <sub>i</sub> : total luas lahan gambut di hutan lindung di Kabupaten i (hektare)  Peat_ HK <sub>i</sub> : total luas lahan gambut di hutan konservasi di Kabupaten i (hektare)  Peat_ M <sub>i</sub> : total luas lahan gambut di bawah penghentian pemberian (PIPPIB) di Kabupaten i (hektare)  Peat_area <sub>i</sub> : total luas lahan gambut dengan fungsi lindung di Kabupaten i (hektare)	2. RTRW (data regional) 3. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut	HP (%) = ((RTRWK <sub>lindung</sub> ∩ KHG) / KHG <sub>lindung</sub> ) x 100%  RTRWK <sub>lindung</sub> ∩ KHG: total luas lahan yang termasuk dalam kesatuan hidrologi gambut yang berada di dalam area/wilayah/kawasan fungsi lindung kabupaten yang teridentifikasi di dalam RTRW Kabupaten (hektare)  KHG <sub>indung</sub> : total luas lahan gambut dengan fungsi lindung di kabupaten (hektare).	1. Luas (peta) lahan yang termasuk dalam hidrologi gambut yang berada dalam kawasan dengan fungsi lindung yang diidentifikasi dalam RTRW Kabupaten  2. Luas lahan gambut (peta) dengan fungsi lindung di kabupaten	
5	Mitigasi Perubahan Iklim	-	V	V	EDef Rel Ratioi (%)=(EDef ori / FRELi) x 100%  EDef ori: Total emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tahunan di i pada tahun t (ton CO2)	1. Emisi dari deforestasi  2. Tingkat Emisi Rujukan Hutan (FREL) kabupaten	$EDF = (v_{n} \times w_{n}) + (v_{m} \times w_{m}) + (v_{a} \times w_{a})$ where $v_{n} \in \{0,1\}, v_{m} \in \{0,1\}, v_{a} \in \{0,1\}$	<ol> <li>Ketersediaan laporan IGRK di Tingkat Kabupaten</li> <li>Ketersediaan perhitungan baseline (FREL) di kabupaten</li> </ol>	

N°	Indikator	P	erubaha	an	Versi lam	a	Versi baru	
		Nama	Rumus	Data	Formulation	Nama	Rumus	Data
					FRELi: Tingkat Emisi Rujukan Deforestasi dan Degradasi Hutan (FREL) kabupaten i (ton CO2) sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.		vn: Indeks yang menunjukkan ada/tidaknya pelaporan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK)  wn: Bobot indeks pelaporan inventarisasi emisi GRK (25%)  vm: Indeks yang menunjukkan ada/tidaknya rumus perhitungan FREL (baseline) di tingkat kabupaten  wm: bobot indeks rumus FREL (baseline) (30%)  va: Indeks yang menunjukkan ada/tidaknya rencana aksi mitigasi perubahan iklim  wa: Bobot indeks keberadaan rencana aksi mitigasi adaptasi perubahan iklim (40%)	3. Dokumen rencana aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim

Nº	Indikator	Perubahan		an	Versi la	ma	Versi baru	
		Nama	Rumus	Data	Formulation	Nama	Rumus	Data
6	Pengelolaan hutan produksi lestari	-	-	-	SHP Ratio (%) = [(SForcon <sub>i</sub> ) / HP <sub>i</sub> ] x 100%  SForcon <sub>i</sub> : total konsesi hutan produksi yang telah memperoleh sertifikasi keberlanjutan (PHPL dan FSC) di kabupaten (hektare)  SForcon <sub>i</sub> :total luas hutan produksi berdasarkan kawasan hutan (hektare)	Konsesi penebangan hutan dengan sertifikasi PHPL/FSC     Kawasan hutan	SHP Ratio (%) = [(SForcon <sub>i</sub> ) / HP <sub>i</sub> ] x 100%  SForcon <sub>i</sub> : total konsesi hutan produksi yang telah memperoleh sertifikasi keberlanjutan (PHPL dan FSC) di kabupaten (hektare)  SForcon <sub>i</sub> :total luas hutan produksi berdasarkan kawasan hutan (hektare)	1. Total konsesi hutan produksi yang telah memperoleh sertifikasi keberlanjutan (PHPL dan FSC) di kabupaten  2. Total hutan produksi di kabupaten
7	Pengendalian kualitas lingkungan hidup	V	V	V	AWPC <sub>i</sub> = (50% x WQ) + (50% x AQ)  WQ : Indeks Kualitas Air (IKA)  AQ : Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks kualitas air dan udara	AWPC <sub>i</sub> = IKLH  IKLH: Indeks Kualitas  Lingkungan Hidup di  kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di kabupaten
8	Persetujuan atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan (PADITAPA) yang terintegrasi	-	-	-	FPIC <sub>i</sub> ∈ {0,1}  FPIC <sub>i</sub> sama dengan 1 jika terdapat SOP PADITAPA dan 0 jika sebaliknya.	Terdapat SOP di kabupaten untuk mendapatkan persetujuan masyarakat terkait perizinan perkebunan	FPIC <sub>i</sub> ∈ {0,1}  FPIC <sub>i</sub> sama dengan 1 jika terdapat SOP PADITAPA dan 0 jika sebaliknya.	Terdapat SOP di kabupaten untuk mendapatkan persetujuan masyarakat terkait perizinan perkebunan

N°	Indikator	P	erubaha	an	Versi la	na	Versi b	aru
IN	ilidikatoi	Nama	Rumus	Data	Formulation	Nama	Rumus	Data
	dalam proses pengajuan izin perkebunan							
9	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	V	V	V	CL(%) = (CL legalised <sub>i</sub> )/ (CL Area <sub>i</sub> ) x 100%  CL legalised <sub>i</sub> : Luas wilayah kelola MHA yang sudah diakui berdasarkan SK/Perda Bupati di kabupaten i (hektare)  CL Area <sub>i</sub> : Luas hutan adat di kabupaten i (hektare) berdasarkan peta indikatif hutan adat  CL <sub>i</sub> ∈ {0,1}  CL <sub>i</sub> sama dengan 1 jika memenuhi salah satu kriteria dan 0 jika sebaliknya.  Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui;  Jumlah MHA terverifikasi, atau kearifan lokal, atau	1. Luas (peta) wilayah kelola MHA yang sudah diakui berdasarkan SK/Perda Bupati di kabupaten  2. Peta indikatif hutan adat kabupaten  3. Data untuk setiap kriteria	CL(%) = (CL legalised <sub>i</sub> )/ (CL Area <sub>i</sub> ) x 100%  CL legalised <sub>i</sub> : Luas wilayah kelola masyarakat hukum adat yang sudah diakui berdasarkan KLHK/Kemendagri di kabupaten i (hektare)  CL Area <sub>i</sub> : Luas hutan adat di kabupaten i (hektare) berdasarkan peta indikatif hutan adat	1. Luas (peta) wilayah kelola MHA yang sudah diakui berdasarkan KLHK/Kemendagri di kabupaten  2. Peta indikatif hutan adat kabupaten

Nº	Indikator	P	erubaha	ın	Versi la	na	Versi b	aru
		Nama	Rumus	Data	Formulation	Nama	Rumus	Data
10	Resolusi konflik	V	<b>V</b>	V	pengetahuan tradisional;  Jumlah kearifan lokal yang terverifikasi, atau hak pengetahuan tradisional;  Jumlah hak MHA yang dilegalisasi;  Persentase MHA yang difasilitasi dibandingkan dengan total MHA;  Persentase MHA yang disediakan infrastruktur dibandingkan dengan total MHA.  Total konflik atau kasus yang	Jumlah konflik	RK <sub>i</sub> ∈ {0,1}	Terdapat SOP untuk
10	lahan dan pertanian	V	V	V	dilaporkan di tingkat nasional dan diterima oleh Kementerian Pertanian	Jumian kontiik	RK <sub>i</sub> ∈ {0,1}  RK <sub>i</sub> sama dengan 1 jika kabupaten i memiliki SOP penanganan konflik lahan dan pertanian dan 0 jika sebaliknya.	penanganan konflik lahan dan pertanian.
11	Persentase untuk petani kecil	-	-	-	sholder <sub>i</sub> (%) = [(sh.area <sub>i</sub> ) / plantation <sub>i</sub> ] x 100% sh.area <sub>i</sub> : total luas perkebunan yang dikelola	Luas perkebunan yang dikelola petani kecil di kabupaten	sholder <sub>i</sub> (%) = [(sh.area <sub>i</sub> ) / plantation <sub>i</sub> ] x 100% sh.area <sub>i</sub> : total luas perkebunan yang dikelola	Luas perkebunan yang dikelola petani kecil di kabupaten

Nº	Indikator	P	erubaha	ın	Versi la	Versi b	aru	
		Nama	Rumus	Data	Formulation	Nama	Rumus	Data
					petani kecil di kabupaten i (hektare).  plantation <sub>i</sub> : total luas perkebunan di kabupaten i (hektare).	2. Luas perkebunan di kabupaten	petani kecil di kabupaten i (hektare).  plantation <sub>i</sub> : total luas perkebunan di kabupaten i (hektare).	2. Luas perkebunan di kabupaten
12	Pendaftaran petani swadaya	-	-	T	Stdb.ratio <sub>i</sub> (%) = [(sh.stdb <sub>i</sub> ) / sh <sub>i</sub> ] x 100%  sh.stdb <sub>i</sub> : total petani swadaya yang memiliki STDB di kabupaten i (total)  sh <sub>i</sub> : total petani swadaya di kabupaten i (total)	Jumlah petani swadaya yang memiliki STDB di kabupaten     Jumlah petani swadaya di kabupaten	Stdb.ratio <sub>i</sub> (%) = [(sh.stdb <sub>i</sub> ) / sh <sub>i</sub> ] x 100%  sh.stdb <sub>i</sub> : total petani swadaya yang memiliki STDB di kabupaten i (total)  sh <sub>i</sub> : total petani swadaya di kabupaten i (total)	1. Jumlah petani swadaya yang memiliki STDB di kabupaten  2. Jumlah petani swadaya di kabupaten
13	Ketahanan pangan	-	-	-	-	-	Indikator baru  FS <sub>i</sub> =IKP <sub>i</sub> IKPi : Indeks Ketahanan  Pangan di kabupaten i  (indeks)	Indeks Ketahanan Pangan
14	Produktivitas petani swadaya	-	-	-	sh.prod <sub>i</sub> (%) = [(sh.yield <sub>i</sub> ) / sh.area <sub>i</sub> ] x 100% sh.stdb <sub>i</sub> : total produksi petani sawit di kabupaten i (kg).	Total produksi petani sawit di kabupaten	sh.prod <sub>i</sub> (%) = [(sh.yield <sub>i</sub> ) / sh.area <sub>i</sub> ] x 100%	Total produksi     petani sawit di     kabupaten

N°	Indikator	Perubahan			Versi la	ma	Versi baru	
		Nama	Rumus	Data	Formulation	Nama	Rumus	Data
					sh.area: total luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani kecil di kabupaten i (hektare).	2. Luas perkebunan yang dikelola petani kecil di kabupaten	sh.stdb <sub>i</sub> : total produksi petani sawit di kabupaten i (kg). sh.area <sub>i</sub> : total luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani kecil di kabupaten i (hektare).	2. Luas perkebunan yang dikelola petani kecil di kabupaten
15	Jumlah Asosiasi/Kelom pok Petani Perkebunan	-	-	V	plant.FG <sub>i</sub> (%) = [(plant.G <sub>i</sub> ) / plant.F <sub>i</sub> ] x 1000 farmers  plant.G <sub>i</sub> : Jumlah kelompok tani perkebunan yang terdaftar di kabupaten i (total).  Plant.F <sub>i</sub> : total petani swadaya di kabupaten i (total)	Jumlah kelompok tani di kabupaten     Jumlah petani swadaya di kabupaten	plant.FG <sub>i</sub> (%) = [(plant.G <sub>i</sub> ) / plant.F <sub>i</sub> ] x 1000 farmers  plant.G <sub>i</sub> : Jumlah kelompok tani perkebunan yang terdaftar di kabupaten i (total).  Plant.F <sub>i</sub> : Jumlah petani swadaya di kabupaten i (total)	1. Jumlah kelompok tani (perkebunan) di kabupaten  2. Jumlah petani swadaya di kabupaten
16	Bantuan untuk petani perkebunan	-	-	V	rext.agent <sub>i</sub> = [(ext.agent <sub>i</sub> ) / Palnt.F <sub>i</sub> ] x 100%  ext.agent <sub>i</sub> : Jumlah penyuluh perkebunan pada kabupaten i (total)  plant.F <sub>i</sub> : Jumlah petani swadaya di kabupaten / (hektare).	Jumlah penyuluh perkebunan di kabupaten     Jumlah petani swadaya di kabupaten	rext.agent <sub>i</sub> = [(ext.agent <sub>i</sub> ) / Plant.F <sub>i</sub> ] x 100%  ext.agent <sub>i</sub> : Jumlah penyuluh perkebunan pada kabupaten i (total)  plant.F <sub>i</sub> : Jumlah petani swadaya di kabupaten / (hektare).	1. Jumlah penyuluh perkebunan di kabupaten  2. Jumlah petani swadaya di kabupaten

Nº	Indikator	Perubahan Indikator		Versi la	ma	Versi baru		
		Nama	Rumus	Data	Formulation	Nama	Rumus	Data
17	Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan	V	-	-	SC <sub>i</sub> (%) = [(ISRSPO.area <sub>i</sub> ) / OP.Plantation] x 100%  ISRSPO.area <sub>i</sub> : Luas perkebunan kelapa sawit bersertifikasi RSPO dan/atau ISPO di kabupaten i (hektare)  Population <sub>i</sub> : total luas perkebunan kelapa sawit di kabupaten i (hektare).	1. Luas perkebunan kelapa sawit bersertifikasi RSPO dan/atau ISPO di kabupaten  2. Luas perkebunan kelapa sawit di kabupaten	SCi(%) = [(ISRSPO.areai) / OP.Plantation] x 100%  ISRSPO.areai: Luas perkebunan kelapa sawit bersertifikasi RSPO dan/atau ISPO di kabupaten i (hektare)  Populationi: total luas perkebunan kelapa sawit di kabupaten i (hektare).	1. Luas perkebunan kelapa sawit bersertifikasi RSPO dan/atau ISPO di kabupaten  2. Luas perkebunan kelapa sawit di kabupaten
18	Tingkat kemiskinan	-	-	-	Poverty <sub>i</sub> (%) = [(Poor.people <sub>i</sub> ) / Population] x 100% Poor.People <sub>i</sub> : jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di kabupaten <i>i</i> . Population <sub>i</sub> : total populasi di kabupaten I (orang)	Persentase kemiskinan di tingkat kabupaten	Poverty <sub>i</sub> (%) = [(Poor.people <sub>i</sub> ) / Population] x 100%  Poor.People <sub>i</sub> : Jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di kabupaten i.  Population <sub>i</sub> : total populasi di kabupaten I (orang)	Persentase kemiskinan di tingkat kabupaten
19	Proporsi anggaran kabupaten yang dialokasikan untuk keberlanjutan	-	-	-	bratio.DLH <sub>i</sub> (%) = [(budget.DLH <sub>i</sub> ) / APBD <sub>i</sub> ] x 100% budget.DLH <sub>i</sub> : jumlah anggaran yang dialokasikan	APBD untuk     keberlanjutan/lingkunga     n hidup      Anggaran tingkat     kabupaten	bratio.DLH <sub>i</sub> (%) = [(budget.DLH <sub>i</sub> ) / APBD <sub>i</sub> ] x 100% budget.DLH <sub>i</sub> : jumlah anggaran yang	APBD untuk     keberlanjutan/lingkun     gan hidup      Anggaran tingkat     kabupaten

N°	Indikator	Perubahan			Versi lar	na	Versi baru		
		Nama	Rumus	Data	Formulation	Nama	Rumus	Data	
					untuk Dinas Lingkungan Hidup (Rupiah) budget.DLH <sub>i</sub> : Total alokasi anggaran kabupaten (Rupiah)		dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup (Rupiah) budget.DLH <sub>i</sub> : total alokasi anggaran kabupaten (Rupiah)		
20	Akses informasi publik	-	-	-	PIA <sub>i</sub> ∈ {0,1}  PIA <sub>i</sub> sama dengan 1 jika terdapat Perda/SK Bupati Pengangkatan Pejabat PPID di kabupaten i dan 0 jika sebaliknya.	Terdapat Perda/SK Bupati Pengangkatan Pejabat PPID di kabupaten	PIA <sub>i</sub> ∈ {0,1}  PIA <sub>i</sub> sama dengan 1 jika terdapat Perda/SK Bupati Pengangkatan Pejabat PPID di kabupaten i dan 0 jika sebaliknya.	Terdapat Perda/SK Bupati Pengangkatan Pejabat PPID di kabupaten	
21	Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten	-	-	<b>V</b>	MSP <sub>i</sub> ∈ {0,1}  MSP <sub>i</sub> sama dengan 1 jika terdapat SOP untuk partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan tata ruang dan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dan 0 jika sebaliknya.	SOP untuk partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan tata ruang dan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan	MSP <sub>i</sub> ∈ {0,1}  MSP <sub>i</sub> sama dengan 1 jika terdapat SOP untuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di kabupaten dan 0 jika sebaliknya.	SOP untuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di kabupaten	
22	Mekanisme pengaduan	-	-	V	$I_c \in \{0,1\}$ $I_c \text{ sama dengan 1 jika}$ terdapat SOP mengenai	SOP mengenai mekanisme pengaduan masyarakat	I₀ ∈ {0,1} I₀ sama dengan 1 jika kabupaten	Daftar kabupaten mengoperasikan SP4N Lapor	

N°	Indikator	Perubahan		ın	Versi la	ma	Versi baru	
		Nama	Rumus	Data	Formulation	Nama	Rumus	Data
					mekanisme pengaduan masyarakat dan 0 jika sebaliknya.		mengoperasikan SP4N Lapor dan 0 jika sebaliknya	
23	Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan	-	V	1	SLUP ∈ {0,1}  SLUP <sub>i</sub> sama dengan 1 jika terdapat DDDTLH dan RPPLH dan 0 jika sebaliknya.	Daftar Kabupaten yang memiliki DDDTLH     Daftar Kabupaten yang memiliki RPPLH	SLUP ∈ {0,1}  CL <sub>i</sub> sama dengan 1 jika terdapat DDDTLH dan RPPLH dan 0 jika sebaliknya.	Daftar Kabupaten yang memiliki DDDTLH     Daftar Kabupaten yang memiliki RPPLH

# Chapter 2: Pedoman/SOP untuk berbagi data di tingkat nasional

#### 2.1 Prosedur

Sebelum melakukan pertukaran data, BAPPENAS perlu memiliki struktur kelembagaan sendiri dalam bentuk sekretariat yang berfokus pada pengoperasian sistem Terpercaya. Sekretariat Terpercaya akan menjalankan kegiatan berbagi data, memasukkan data dan pemeliharaan platform. BAPPENAS dapat menjalankan dua skema SOP terkait proses berbagai data antar Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan diproses oleh Sekretariat Terpercaya: Skema 1 adalah *Direct Data Sharing*, yakni pertukaran data secara langsung antara Sekretariat Terpercaya dengan wali data K/L. Skema 2 adalah berbagi data melalui Satu Data Indonesia (SDI). Semua data yang dibutuhkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran A, tersedia menurut kabupaten untuk tahun terakhir.

SDI adalah salah satu kebijakan nasional yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan selaras dengan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SDI memiliki platform online berisi data-data yang dihasilkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Semua data yang ditampilkan tersedia untuk publik dan semua pihak dapat mengakses data tersebut. Fungsi SDI adalah untuk memfasilitasi tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah pusat dan daerah agar dapat dijadikan acuan dalam membuat perencanaan kebijakan yang baik. Selain itu, SDI juga memperkuat transparansi data pemerintah untuk publik. Sekretariat Nasional SDI, yang berada di bawah BAPPENAS, bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan platform SDI.

#### 2.1.1 Skema 1: Direct data sharing melalui kementerian

Skema ini digunakan untuk mendapatkan data yang tidak tersedia di situs web Satu Data Indonesia (SDI) dan K/L. Pengumpulan data melalui situs web K/L tidak memerlukan perjanjian berbagi data dan dijelaskan dalam Bab 6 secara lebih detail. Pada skema 1, dua pihak dalam satu K/L akan dilibatkan, yakni Wali Data<sup>4</sup> dan Produsen Data,<sup>5</sup> yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Skema berbagi data melalui K/L dilakukan secara langsung antara Sekretariat Terpercaya (BAPPENAS) dan wali data K/L. Proses pengumpulan data melalui skema ini dimulai pada bulan Juni 2022.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk skema 1 adalah:

Wali data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
 Produsen data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### A. Identifikasi data yang dibutuhkan dan permintaan izin berbagi data:

- 1. Sekretariat Terpercaya menyusun daftar data yang dibutuhkan untuk analisis Terpercaya, yakni data dalam format shapefile dan tabular (Excel), yang dirangkum dalam Lampiran A.
- 2. Sekretariat Terpercaya mengajukan permohonan izin berbagi data (Lampiran C) kepada produsen data dengan tembusan kepada wali data di masing-masing K/L.
- 3. Setelah mendapat izin dari produsen data, Sekretariat Terpercaya mengajukan permintaan transfer data ke wali data di masing-masing K/L.
- 4. Wali data dari masing-masing K/L melakukan persiapan untuk melakukan transfer data ke Sekretariat Terpercaya dalam format yang disebutkan dalam Lampiran A
- 5. Semua data yang dibagikan akan menggunakan kode referensi wilayah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

#### B. Prosedur transfer data:

- Mekanisme berbagi data dilakukan setahun sekali. Sekretariat Terpercaya memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan setiap tahun dari bulan Januari - Maret, kecuali jika penyedia data meluncurkan data yang diperbarui setelah periode tersebut.
- 2. Setelah mendapatkan izin untuk membagikan data, wali data di setiap K/L akan menyampaikan data tersebut ke Sekretariat Terpercaya melalui salah satu prosedur berikut:
  - a. Melalui email (<u>pertanian@bappenas.go.id</u>) dengan memasukkan atau melampirkan data yang dibagikan
  - b. Melalui email yang mencantumkan tautan untuk mengunduh file data yang dibagikan dari *online storage* Kementerian/Lembaga
  - c. Melalui platform Terpercaya (memasukkan data secara langsung ke platform)
  - d. Prosedur lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, mis. *host-to-host* antar situs web K/L dengan memperhatikan kesiapan sistem kedua belah pihak. Prosedur ini hanya dijalankan jika ketiga opsi di atas tidak memungkinkan.
- 3. Jika prosedur yang digunakan adalah mengirim data melalui email, maka formulir Berita Acara Serah Terima harus diisi. Format Berita Acara Serah Terima dapat disiapkan oleh Kementerian/Lembaga yang menyampaikan data ke Sekretariat Terpercaya atau Berita Acara Serah Terima di Lampiran D.
- 4. Jika data secara langsung dimasukkan ke sistem, Sekretariat Terpercaya akan memberi wali data K/L akses ke dashboard. Setelah itu, wali data K/L dapat mengunggah data sesuai dengan pedoman sistem.
- 5. Data yang disampaikan oleh wali data K/L dapat disertai dengan penafian, surat keputusan dan/atau keterangan tertulis lainnya yang perlu diketahui oleh Sekretariat Terpercaya. Misalnya, pembatasan akses publik atas data tersebut dan informasi lain terkait penggunaan data.
- 6. Nota Kesepahaman (MoU) dapat disiapkan jika diperlukan dan atas kesepakatan kedua belah pihak (BAPPENAS dan masing-masing Kementerian/Lembaga).

- 7. Jika K/L memilih untuk menyampaikan data ke Sekretariat Terpercaya, maka *data entry* akan dilakukan oleh Admin Platform Terpercaya.
- 8. Saat melakukan *data entry*, Admin Sekretariat Terpercaya akan memverifikasi data. Jika ada data yang tidak sesuai, Admin akan memberitahu koordinator database K/L.

#### 2.1.2 Skema 2: Berbagi Data melalui SDI

Pengembangan platform Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Skema berbagi data Terpercaya melalui SDI dapat dimulai pada bulan Januari 2023. BAPPENAS mengusulkan kepada Forum SDI untuk memasukkan data Terpercaya agar dapat diakses di bawah payung SDI. Proses persetujuan data prioritas dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- 1. BAPPENAS menyampaikan data prioritas ke Sekretariat Nasional SDI
- 2. Data yang diusulkan akan ditinjau oleh Forum SDI
- 3. Forum SDI yang beranggotakan para wali data memutuskan apakah data prioritas yang diusulkan dapat diintegrasikan ke SDI dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan kesiapan infrastruktur integrasi data.

Forum SDI telah memberikan persetujuan untuk indikator Terpercaya pada akhir bulan Juni 2022. Berita Acara Kesepakatan antara K/L dapat dilihat di Lampiran E. Saat ini, SDI dan K/L sedang melakukan proses pengumpulan data dan integrasi platform hingga bulan Desember 2022. Data prioritas yang telah disetujui dan tersedia di Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) dapat secara langsung diintegrasikan ke dalam platform SDI saat sistem database siap untuk diintegrasikan.

Keputusan Forum SDI tentang data prioritas yang diusulkan telah diumumkan pada bulan Juni 2022. Data untuk 19 dari 23 indikator Terpercaya akan tersedia di platform SDI. Akan tetapi, hanya sebagian dari sumber data untuk ketiga indikator tersebut telah disetujui. Persetujuan parsial ini berarti bahwa tidak semua sumber data disetujui di bawah satu indikator (satu indikator mungkin memiliki lebih dari satu sumber data). Walaupun sebagian besar data telah disetujui oleh SDI, data tersebut baru akan tersedia di situs web SDI pada bulan Januari 2023.

Data prioritas yang disetujui oleh Terpercaya akan dapat diakses melalui SDI pada bulan Januari 2023. Data yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) di SDI akan menjadi data publik dan dapat diunduh oleh semua pihak. Langkah-langkah untuk berbagi data melalui SDI adalah:

- Sekretariat Terpercaya menyusun daftar data yang dibutuhkan untuk analisis Terpercaya, yakni data shapefile dan tabular (Excel), yang dirangkum dalam Lampiran A.
- 2. Sekretariat Terpercaya akan secara langsung mengunduh dataset yang diperlukan berdasarkan topik yang relevan untuk indikator Terpercaya melalui situs web SDI, yakni: https://data.go.id/home.
- 3. Setelah mengunduh data, Sekretariat Terpercaya dapat memasukkan<sup>6</sup> data ke platform.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pedoman *data entry* disediakan dalam Brief of Guidelines/SOP untuk operasionalisasi dan pemeliharaan platform, termasuk pengolahan dan pembersihan data

- 4. Data tersebut kemudian akan dianalisis oleh sistem dan ditampilkan di platform.
- 5. Masyarakat dapat mengakses hasil analisis untuk setiap indikator melalui situs web dengan mendaftar sebagai pengguna situs web.

#### 2.2 Analisis Data dan Penyebarluasan Informasi

Setelah dimasukkan, data akan dianalisis dan informasi tersebut akan disebarluaskan:

- Setelah data dikumpulkan dan dimasukkan ke platform Terpercaya, platform ini akan menghitung dan menilai perhitungan untuk indikator yang ditetapkan oleh BAPPENAS (dijelaskan dalam bab 7). Hasil akan ditampilkan di platform.
- 2. Masyarakat dapat mengakses hasil analisis untuk setiap indikator melalui situs web dengan mendaftar sebagai pengguna situs web. Mereka juga dapat mengunduh hasil analisis di halaman *District Ranking*.
- 3. Jika masyarakat ingin mengakses data mentah, mereka dapat menghubungi Sekretariat Terpercaya. Sekretariat akan memberikan akses publik ke data mentah dengan tautan URL. Akan tetapi, untuk data yang belum tersedia untuk publik, Sekretariat akan mengarahkan pengguna platform untuk menghubungi produsen data di masing-masing K/L untuk menjaga kerahasiaan.

# Chapter 3: Pedoman/SOP pengumpulan data di tingkat daerah

# 3.1 Hasil studi percontohan pengumpulan data di tingkat daerah

Data untuk lima indikator Terpercaya dikumpulkan dan dipegang oleh pemerintah daerah. Tabel 2 menunjukkan daftar data dan produsen data untuk lima indikator. Produsen data pada Tabel 2 adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lima indikator dengan sumber data daerah adalah:

- 1. Perlindungan untuk hutan tetap (Indikator 1)
- 2. Perlindungan untuk area yang penting untuk layanan ekologi (Indikator 2)
- 3. Perlindungan untuk lahan gambut (Indikator 4)
- 4. Persetujuan atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan (PADITAPA) yang terintegrasi dalam proses pengajuan izin perkebunan (Indikator 8)
- 5. Resolusi konflik lahan dan pertanian (Indikator 10)

Studi percontohan yang dilakukan di 12 kabupaten (lihat Lampiran G) mengindikasikan bahwa ada dua indikator yang sumber datanya perlu diubah. Pertama, sumber data untuk indikator PADIATAPA sebelumnya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan kini dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten. Kedua, sumber data untuk indikator resolusi konflik lahan dan pertanian sebelumnya dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan dan kini dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten. Kedua indikator tersebut diukur dari tersedianya atau tidak tersedianya SOP. Database SOP dioperasikan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten.

Dari lima indikator di atas, tiga indikator membutuhkan data yang bersumber dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), sementara dua indikator lainnya membutuhkan data tentang SOP PADITAPA dan resolusi konflik lahan dan pertanian. Secara khusus, untuk SOP resolusi konflik, data yang diperlukan telah berubah dari jumlah awal konflik menjadi SOP resolusi konflik lahan dan perkebunan. Perubahan ini dilakukan atas saran dari pemerintah daerah dan para pakar. Berikut adalah ringkasan pembahasan tentang ketiga jenis data tersebut.

<u>Data RTRWK</u> sudah tersedia di pemerintah kabupaten dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertindak sebagai wali data. Data indikator terkait RTRWK<sup>7</sup> tidak dapat diakses melalui SDI. BAPPENAS telah mengusulkan agar ini menjadi data prioritas untuk SDI, tetapi tidak berhasil mendapatkan persetujuan.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> RTRWK digunakan untuk menganalisis indikator 1, indikator 2, dan indikator 4. RTRW diperlukan untuk mendapatkan data luas hutan lindung dan hutan konservasi di kabupaten dalam RTRW Kabupaten (Indikator 1), luas RTRWK dengan fungsi lindung di Kabupaten (Indikator 2), dan total luas lahan yang termasuk dalam hidrologi gambut yang berada di dalam area/wilayah/kawasan fungsi lindung yang teridentifikasi di dalam RTRW Kabupaten (Indikator 4).

Data PADITAPA belum tersedia di dinas pertanian di 12 kabupaten percontohan (Lampiran G). Keputusan yang disepakati setelah melakukan FGD dan wawancara dengan 12 pemerintah daerah adalah untuk mengganti SOP PADITAPA dengan izin usaha perkebunan (sebagai alternatif). Izin usaha perkebunan dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Divisi Pemerintah. Akan tetapi, setelah berkonsultasi dengan pakar hukum, izin usaha perkebunan tidak dapat mewakili PADITAPA karena skema tersebut tidak melibatkan masyarakat sekitar. Rekomendasi yang diberikan adalah untuk mengumpulkan SOP PADITAPA di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten. Data ini telah disetujui oleh SDI dan akan tersedia di platform SDI pada bulan Januari 2023.

Data resolusi konflik lahan dan pertanian mengalami perubahan rumus pada produk data dan sumber data. Data untuk indikator ini sebelumnya bersumber dari Dinas Pertanian/Perkebunan. Setelah berdiskusi dengan pakar, sumber data yang disarankan adalah data dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten. Data tersebut digunakan untuk menghitung jumlah konflik. Akan tetapi, pemerintah daerah menyarankan untuk tidak berfokus pada jumlah konflik yang terjadi dan yang telah ditangani. Jumlah konflik tidak mencerminkan upaya pengurangan konflik. Selain itu, Pemerintah Daerah juga belum memiliki data tentang jumlah kasus konflik perkebunan yang telah diselesaikan. Setelah berkonsultasi dengan pakar hukum, sumber data resolusi konflik diubah menjadi SOP resolusi konflik. Sumber data yang digunakan berasal dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah. Data ini telah disetujui oleh SDI dan akan tersedia di platform SDI pada bulan Januari 2023.

Tabel 2. Data indikator Terpercaya yang hanya dapat diperoleh dari pemerintah daerah

Indikator	Jenis Data	Format Data	Unit	Produsen Data (OPD)	Skema Pengumpul an Data
Perlindungan	Peta hutan lindung di RTRWK	zip (cpg, dbf, prj, shp, shx)	hektare	BAPPEDA	OPD
untuk hutan tetap	Peta hutan konservasi di RTRWK	zip (cpg, dbf, prj, shp, shx)	hektare	BAPPEDA	OPD
Perlindungan untuk area yang penting untuk layanan ekologi	Peta RTRWK dengan fungsi lindung di kabupaten	zip (cpg, dbf, prj, lhx)	hektare	BAPPEDA	OPD
Perlindungan untuk lahan gambut	Peta lahan yang termasuk dalam hidrologi gambut yang berada di dalam area/wilayah/kawasa n fungsi lindung yang	zip (cpg, dbf, prj, shp, shx)	hektare	BAPPEDA	OPD

Indikator	Jenis Data	Format Data	Unit	Produsen Data (OPD)	Skema Pengumpul an Data
	teridentifikasi di dalam RTRWK				
Persetujuan atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan (PADITAPA) yang terintegrasi dalam proses pengajuan izin perkebunan	Tersedianya SOP/regulasi di kabupaten tentang persetujuan masyarakat terkait perizinan perkebunan.	Konfirmasi ya atau tidak	Konfirma si ya atau tidak	Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten	SDI
Resolusi konflik lahan dan pertanian	Tersedianya SOP/regulasi di kabupaten tentang penanganan konflik lahan dan pertanian di kabupaten	Konfirmasi ya atau tidak	Konfirma si ya atau tidak	Divisi Hukum Pemerintah Kabupaten	SDI

#### 3.2 Prosedur pengumpulan data dari tingkat daerah

Pengumpulan data di tingkat daerah memerlukan strategi kebijakan khusus untuk implementasi yang langsung dan efektif (kebijakan ini dibahas di bagian 3.3). Oleh karena itu, BAPPENAS perlu melatih tim Sekretariat Terpercaya untuk menjalankan skema pengumpulan data. Fungsi Sekretariat adalah untuk menghubungi pemerintah kabupaten agar dapat berbagi data melalui platform Terpercaya. Wali data di tingkat daerah I disarankan untuk secara mandiri memasukkan data ke platform. Sama halnya dengan pengumpulan data di tingkat nasional, pengumpulan data di tingkat daerah mencakup dua skema: pengumpulan data secara langsung dari OPD atau melalui SDI.

#### 3.2.1 Pengumpulan data daerah melalui OPD

Skema ini bertujuan untuk mendapatkan data yang belum terintegrasi ke SDI melalui OPD. Ada enam jenis sumber data seperti yang dapat dilihat di Tabel 2. Data indikator Terpercaya yang hanya dapat diperoleh dari pemerintah daerah Sumber data untuk indikator PADITAPA dan Resolusi Konflik dapat diperoleh dari OPD dan SDI. Hasil studi tentang pengumpulan data daerah menunjukkan bahwa rekomendasi pengumpulan data Terpercaya di tingkat kabupaten melalui skema OPD dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

#### A. Proses pengajuan permintaan data ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

- 6. Penyerahan data dilakukan melalui korespondensi ke OPD terkait
- 7. Sekretariat Terpercaya melampirkan daftar data yang diperlukan (termasuk format) dan pedoman *data input* manual

- 8. OPD memilih untuk memasukkan data sendiri atau menyerahkan data mentah ke Sekretariat Terpercaya
- 9. OPD akan memberikan tanggapan terkait kesediaan mereka untuk berbagi data

#### B. Transfer data

Jika OPD ingin melakukan data input secara mandiri, Sekretariat Terpercaya akan memberikan akses ke dashboard dan pedoman *data input*<sup>8</sup>. Berikut adalah mekanisme transfer data:

#### 1. OPD melakukan data entry di Platform Terpercaya (Gambar 1)

- OPD menunjuk pihak yang bertanggung jawab untuk memasukkan data ke platform
- Sekretariat Terpercaya memberikan akses kepada OPD sebagai Data Admin indikator
- OPD memasukkan data ke platform sesuai dengan modul yang nantinya akan disediakan
- Data entry<sup>9</sup> dilakukan secara manual dengan mengisi formulir sumber data untuk indikator tersebut
- Sekretariat Terpercaya melakukan validasi dan verifikasi kesesuaian data dengan rumus indikator di sistem
- Sekretariat Terpercaya menyetujui data yang dimasukkan untuk nantinya dianalisis

#### 2. OPD mengirimkan data ke Sekretariat Terpercaya

Data akan dikirimkan melalui email atau melalui USB (secara fisik) ke Sekretariat Terpercaya. Penyerahan fisik akan memerlukan Berita Acara Serah Terima Data. Analisis akan dilakukan oleh Sekretariat.

#### C. Pemeriksaan dokumen oleh Sekretariat Terpercaya

Setelah pengumpulan data, Sekretariat Terpercaya perlu melakukan verifikasi data dengan memeriksa format data dan kesesuaian isi data. Jika dokumen tidak memenuhi kebutuhan indikator, Sekretariat Terpercaya akan menghubungi OPD terkait untuk melakukan perbaikan.

#### D. Publikasi data

Setelah data kabupaten diverifikasi, data dapat dianalisis dengan platform Terpercaya. Hasil analisis indikator dapat langsung ditampilkan di situs web. Masyarakat dapat memperoleh informasi terkait hasil analisis indikator dengan mendaftar sebagai pengguna.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lihat Bab 7- Pedoman SOP untuk operasionalisasi dan pemeliharaan platform

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Langkah-langkah untuk memasukkan data dapat dilihat di Pedoman/SOP untuk operasionalisasi dan pemeliharaan platform, termasuk pengolahan dan pembersihan data



Gambar 1. Proses transfer data oleh penanggung jawab di kabupaten

#### 3.2.2 Pengumpulan data di tingkat daerah melalui skema SDI

Forum SDI memutuskan bahwa ada dua jenis data yang dapat diakses melalui platform SDI. Akan tetapi, pengumpulan data oleh Sekretariat Terpercaya akan mulai dilakukan pada bulan Januari 2023 karena kedua jenis data tersebut akan tersedia di platform SDI mulai saat itu. Walaupun Forum SDI sudah menyetujui kedua jenis data indikator tersebut, tidak semua data tersedia di SDI. Hal ini dikarenakan beberapa platform kabupaten belum siap untuk diintegrasikan ke SDI, sehingga datanya tidak dapat disampaikan melalui SDI. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan Sekretariat Terpercaya untuk skema SDI:

#### 1. Mengunduh data

a. Sekretariat Terpercaya dapat mengunduh data per kabupaten di platform SDI. Data disimpan dalam media penyimpanan Sekretariat. Direktorat Pangan dan Pertanian BAPPENAS telah sudah memiliki server di Pusat Data Nasional di Menara BAPPENAS Kuningan. Kapasitas server adalah penyimpanan 4 TB, RAM 32 GB, dan 20 core processor.

#### 2. Kompilasi data

a. Sekretariat Terpercaya mengkompilasi data ke dalam format *bulk insert*<sup>10</sup> yang disediakan oleh programmer.

#### 3. Memasukkan data di Platform Terpercaya

a. Setelah dikompilasi, Sekretariat dapat melakukan memasukkan data di platform Terpercaya dengan menggunakan skema data input indikator secara bersamaan<sup>11</sup>. Setelah itu, platform akan menganalisis dan menghasilkan nilai indikator.

#### 4. Akses publik

 Setelah data diunggah dan dianalisis oleh platform, data dapat langsung ditampilkan di situs web Terpercaya.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Format bulk-insert Excel dapat diakses di: shorturl.at/diGJL

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Pedoman *data entry* dapat dilihat dalam Brief of Guidelines/SOP untuk operasionalisasi dan pemeliharaan platform, termasuk pengolahan dan pembersihan data

### 3.3 Peraturan nasional yang diusulkan untuk pengumpulan data di daerah

Peraturan yang mengikat daerah untuk mengumpulkan data secara mandiri diperlukan untuk mempercepat pengumpulan data di tingkat daerah. Dua regulasi nasional diperlukan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan data untuk Terpercaya, yaitu:

#### A. Skema Satu Data Indonesia (SDI)

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan daerah. SDI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang mengatur bahwa ada kewajiban untuk melibatkan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun kabupaten, sebagai wali data dalam pengembangan platform.

Setiap tahun, SDI membuat daftar data prioritas. Data Prioritas adalah data terpilih yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya sesuai dengan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia. Langkah pertama untuk mengumpulkan data daerah di tingkat nasional adalah menyerahkan data prioritas ke Sekretariat SDI. Dalam konteks Terpercaya, data untuk indikator yang ada di tingkat kabupaten perlu didaftarkan dan kemudian diusulkan ke SDI. Hasil penyerahan data prioritas akan diumumkan setiap tahun pada bulan Januari. Harapannya, data daerah sudah bisa diakses secara langsung melalui SDI pada bulan Januari 2023.

Sekretariat Terpercaya (Admin) dapat langsung mengunduh data melalui platform SDI. Setelah data berhasil diunduh, Admin akan melakukan proses input, dilanjutkan dengan validasi, pembersihan dan verifikasi data. Data tersebut akan dianalisis oleh sistem untuk menghasilkan nilai indikator.

Dalam versi baru, Platform Terpercaya memasukkan sistem persetujuan yang dilakukan oleh BAPPENAS. Setiap hasil analisis indikator memerlukan persetujuan sebelum ditampilkan di situs web yang dapat diakses publik. Anggota masyarakat umum dapat mengakses hasil indikator dengan mendaftar sebagai pengguna platform.

#### B. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Terkait dengan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu kementerian/lembaga (K/L) yang berperan dalam melaksanakan kebijakan di tingkat pemerintah daerah, khususnya perencanaan program. Terpercaya perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang berpotensi untuk menyederhanakan pengumpulan data di tingkat daerah. Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam proses berbagi data dengan BAPPENAS terkait Terpercaya. Kemendagri perlu mendorong

pemerintah daerah agar menunjuk penanggung jawab untuk Terpercaya<sup>12</sup> yang nantinya dapat secara langsung memasukkan data ke platform.

Terpercaya dapat dimasukkan ke dalam Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 525/5133/SJ. Surat tersebut berisi pedoman penyusunan RAD-KSB. Indikator Terpercaya dapat dimasukkan dalam Komponen A (Penguatan Data Perkebunan) untuk mendukung tata kelola perkebunan yang baik. Indikator Terpercaya dapat digunakan sebagai bagian dari alat ukur peningkatan program dan kegiatan yang relevan atau perlu diperkuat di wilayah/yurisdiksi tertentu.

Selain Surat Edaran, integrasi Indikator Terpercaya ke dalam kebijakan Kementerian Dalam Negeri dapat dilakukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Integrasi Terpercaya ke dalam RPJMD dan LPPD dapat dilakukan melalui dua cara:

- 1. Opsi 1: Memasukkan Indikator Terpercaya sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Opsi ini masih memerlukan konfirmasi terkait momentum/rencana untuk melakukan amendemen terhadap Permendagri. Pertemuan yang dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri mengindikasikan bahwa ada rencana untuk melakukan amendemen peraturan.
- 2. Opsi 2: Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran yang memberi instruksi kepada Daerah Penghasil Kelapa Sawit untuk memasukkan data secara langsung ke Platform. Opsi 2 telah disepakati dengan Kementerian Dalam Negeri yang akan diintegrasikan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang RAD KSB. Akan tetapi, ini perlu disesuaikan dengan format Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). Sebagai alternatif, BAPPENAS dapat berkolaborasi untuk memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi serta laporan RAD-KSB sebagai sumber data Platform Terpercaya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Penanggung jawab yang disarankan adalah wali data

# Chapter 4: Menyempurnakan dan mengoperasionalkan indikator Terpercaya, termasuk pembelajaran

Bab ini merangkum proses penyempurnaan indikator, memastikan komitmen untuk berbagi data, dan mengisi platform web Terpercaya. Ini juga mencakup pembelajaran selama proses ini.

#### 4.1 Penyempurnaan dan penerapan indikator Terpercaya

Beberapa FGD dengan kementerian/lembaga (K/L) dilakukan dalam dua tahap untuk (i) meninjau dan menyempurnakan indikator (sesi 1) dan (ii) menggali sumber data yang tersedia untuk pengukuran dan mengungkapkan data yang tidak tersedia atau tersedia sebagian di tingkat nasional (sesi 2).<sup>13</sup> Tabel 3 merangkum diskusi yang dilakukan dengan kementerian/lembaga sebagai pemilik data indikator Terpercaya di tingkat nasional.

Tabel 3. Jadwal FGD dan lokakarya dengan kementerian/lembaga

N°	Kementerian/lembaga (k/l)	Kegiatan	Tanggal (dd/mm/yy)
1	Sekretariat Nasional SDG	FGD	22/02/2022
2	Satu Data Indonesia (SDI)	FGD	23/02/2022
3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	FGD	04/03/2022
		FGD	07/06/2022
4	Pusat Data dan informasi (Pusdatin)	FGD	08/03/2022
5	Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG)	FGD	09/03/2022
6	Kementerian Pertanian (Kementan)	FGD	16/03/2022
7	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	FGD	18/03/2022
8	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)	FGD	25/03/2022
9	Badan Pangan Nasional (BPN)	FGD	28/09/2021
			10/05/2022
11	Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kepala Badan Pangan Nasional (BPN)	FGD	04/05/2022
12	Direktorat Pangan dan Pertanian, Bappenas	Workshop	25-26/04/2022

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Tersedia sebagian artinya data hanya tersedia di beberapa kabupaten.

\_

Semua FGD sesi 1 berlangsung selama dua hingga tiga jam, dimulai dengan presentasi tentang Terpercaya, dilanjutkan dengan diskusi tentang penyempurnaan indikator dan mekanisme pertukaran data. Semua FGD sesi 2 berlangsung selama dua jam, dimulai dengan presentasi tentang Terpercaya dilanjutkan dengan diskusi tentang sumber data alternatif dan ketersediaannya di tingkat nasional melalui Kementerian, SDI, dan SDG. Tabel 4 mencantumkan daftar pertanyaan yang diajukan pada setiap sesi FGD.

Tabel 4. Daftar pertanyaan dalam sesi FGD

Sesi FGD	Nº	Daftar pertanyaan
1. Penyempurn	1	Apakah sumber data indikator ini tersedia di instansi Anda?
aan indikator	2	Seberapa sering Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan pemutakhiran data? Apakah sebulan sekali atau setahun sekali?
2. Mekanisme pertukaran data	3	Bagaimana protokol berbagi data antara K/L dan BAPPENAS dijalankan? Apakah ini akan memerlukan Nota Kesepahaman (MoU) antara K/L dengan BAPPENAS atau alternatif lainnya?
	4	Seperti apa mekanisme pengumpulan data dari K/L melalui Sekretariat Satu Data Indonesia?
	5	Seperti apa mekanisme proses <i>data entry</i> ke Platform Terpercaya? Apakah K/L memiliki preferensi untuk mengunggah data secara langsung di platform web? Apakah ada masukan lain?

BAPPENAS, Sekretariat Nasional SDG dan Satu Data Indonesia (SDI) turut hadir di semua FGD untuk memastikan bahwa diskusi tentang indikator selaras dengan SDG dan platform Terpercaya dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam mekanisme SDI agar pengumpulan data dapat dilakukan secara bersamaan dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.

#### Sesi penyempurnaan indicator

Tujuan sesi ini adalah untuk memastikan bahwa dataset nasional tersedia untuk mengukur semua indikator Terpercaya. Semua indikator ditinjau selama FGD. Sesi tersebut berfokus pada sembilan indikator:

- 1. Perlindungan untuk hutan tetap (Indikator 1)
- 2. Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi (Indikator 2)
- 3. Perlindungan untuk lahan gambut (Indikator 4)
- 4. Mitigasi perubahan iklim (Indikator 5)
- 5. Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADITAPA) yang terintegrasi dalam proses pengajuan izin perkebunan (Indikator 8)
- 6. Pengendalian kualitas lingkungan hidup (Indikator 7)
- 7. Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten (Indikator 21)
- 8. Mekanisme pengaduan (Indikator 22)
- 9. Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan (Indikator 23)

Sembilan indikator tersebut melibatkan empat kementerian, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (Tabel 5).

Diskusi dengan KLHK yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2022 **membahas tentang peningkatan tiga indikator**, yakni: mitigasi perubahan iklim (Indikator 5); pengendalian kualitas lingkungan hidup (Indikator 7); dan perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan (Indikator 23). Lima<sup>14</sup> narasumber KLHK menghadiri diskusi ini. Pertanyaan-pertanyaan yang tercantum pada Tabel 4 diajukan kepada setiap pemilik data dan produsen data untuk sumber data indikator Terpercaya.

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) adalah pemilik data spasial di KLHK. Menurut mereka, sumber data indikator mitigasi perubahan iklim, yang terdiri dari emisi deforestasi dan tingkat emisi rujukan hutan (FREL), tidak tersedia. Selain itu, KLHK memberi konfirmasi bahwa data Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara (IKA-IKU) 2021 tersedia di tingkat kabupaten. Laporan kualitas air dan udara sedang disiapkan dan akan diterbitkan pada tahun 2022. Selain itu, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) memberi konfirmasi bahwa mereka memiliki daftar kabupaten yang telah memiliki Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan/atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (RPPLH), yang dapat digunakan untuk indikator 23 (Tabel 5).

Sebelum menemukan data alternatif untuk mitigasi perubahan iklim (Indikator 5), Yayasan Inobu dan BAPPENAS mengadakan FGD kedua dan mengundang Profesor Rizaldi Boer dan dua nara sumber dari Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (IGRK MPV), KLHK. Dua dataset nasional yang diperlukan untuk pengukuran mitigasi perubahan iklim (indikator 5) adalah FREL dan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Profesor Rizaldi mengidentifikasi penetapan FREL di tingkat kabupaten sebagai tantangan utama. Saat ini, FREL belum tersedia di tingkat kabupaten. Keputusan presiden akan dikeluarkan untuk mewajibkan pemerintah provinsi mengembangkan tingkat *baseline* sebelum mengembangkan alokasi emisi yang dapat dihasilkan oleh setiap kabupaten. Oleh karena itu, setiap kabupaten harus mengukur FREL berdasarkan *baseline* yang ditentukan oleh provinsi. KLHK sedang mengembangkan Sistem Informasi, yakni Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Lapangan (SIMONELA). Pemerintah, sektor publik dan sektor swasta dapat menggunakan dan melihat alokasi emisi di suatu yurisdiksi.

Terkait dengan sumber data kedua, yaitu emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Direktorat IGRK menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak menghitung emisi tersebut di tingkat kabupaten. Pemerintah kabupaten wajib menghitung emisi mereka secara mandiri. Pemerintah pusat menyediakan Sistem Registri Nasional (SRN), yakni sistem untuk mengelola data dan informasi tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Jika kabupaten mengukur emisi deforestasi, data ini dapat

(PDLKWS)

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH), Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), dan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

dilaporkan atau didaftarkan ke Sistem Registri Nasional (SRN) dan tersedia di platform SRN. Saat ini, data yang paling mudah diakses terkait emisi deforestasi di tingkat nasional adalah laporan inventarisasi gas rumah kaca (GRK). Menurut Peraturan Presiden No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, setiap kabupaten/kota diharuskan untuk melaporkan inventaris GRK ke tingkat provinsi. Setelah itu, provinsi akan melaporkannya ke pemerintah pusat. Data inventarisasi akan ditampilkan dalam sistem informasi (Sign Smart), sebuah sistem inventarisasi GRK nasional.

Setiap kabupaten juga wajib menyusun rencana aksi mitigasi perubahan iklim. Dokumendokumen ini nantinya akan tersedia di SRN. Di masa mendatang, SRN akan diintegrasikan ke dalam AKSARA BAPPENAS. AKSARA adalah Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia.

Diskusi dengan KLHK mengindikasikan bahwa ada tiga elemen yang dapat diukur untuk melacak kinerja pemerintah kabupaten terkait dengan indikator 5, yakni:

- 1. Apakah laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) tersedia. Dokumen ini relevan dengan perkembangan SDG 13.
- 2. Apakah tingkat emisi rujukan hutan (FREL) yang digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah kabupaten tersedia. Pelaporan FREL akan mendorong kabupaten untuk menyiapkan data yang diperlukan untuk FREL.
- 3. Apakah Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim tersedia. Setelah kabupaten menghitung emisi, mereka diwajibkan menyusun rencana aksi untuk mengurangi emisi.

Diskusi dengan Kementerian Pertanian pada Pada tanggal 16 Maret 2022 tentang penyempurnaan indikator Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADITAPA) yang terintegrasi dalam proses pengajuan izin perkebunan (Indikator 8). FGD tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, dan Pusat Penyuluhan Pertanian.

Sumber data indikator 8 adalah tersedianya SOP PADITAPA di kabupaten. Akan tetapi, tidak ada SOP PADITAPA di tingkat nasional. Kementerian Pertanian menyarankan untuk menggunakan surat perjanjian antara petani dan pemilik izin perkebunan sebagai sumber data alternatif. Akan tetapi, perjanjian ini hanya disimpan oleh kedua belah pihak dan tidak dapat digunakan oleh Terpercaya. Sumber data lain yang relevan untuk PADITAPA di tingkat pusat adalah laporan *core plasma*. Ini adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan pemilik perkebunan plasma yang disimpan oleh pemerintah pusat. <sup>15</sup>. Asumsi yang digunakan adalah bahwa pendirian perkebunan plasma disertai dengan surat perjanjian.

Pada tanggal 18 Maret 2022, FGD dengan Kementerian Dalam Negeri **membahas tentang peningkatan dua indikator**, partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten (Indikator 21) dan mekanisme pengaduan (Indikator 22). Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yang hadir dalam diskusi ini adalah dari Pusat Data dan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Perkebunan plasma mengacu pada plot kelapa sawit untuk petani kecil yang dikembangkan oleh perusahaan perkebunan di bawah Skema Nucleus-Plasma yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia.

Informasi (Pusdatin), Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Untuk indikator partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten (indikator 21), Kemendagri menjelaskan bahwa Terpercaya dapat menggunakan data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai sumber data alternatif. SIPD adalah aplikasi pengelolaan data pembangunan yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Data pada aplikasi SIPD diolah dan disajikan dalam bentuk informasi pembangunan daerah. Informasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, menjadi pedoman dan acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dua sumber data dalam SIPD yang dapat digunakan Terpercaya untuk indikator 21 adalah formulir aspirasi masyarakat yang disediakan oleh pemerintah daerah dan database untuk masukan masyarakat saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah salah satu tahap dalam penyusunan dokumen perencanaan dan setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Musrenbang.

Terkait penanganan pengaduan (indikator 22), Terpercaya disarankan untuk menggunakan data implementasi Sistem Nasional Pengelolaan Pengaduan Aspirasi Masyarakat dan Pelayanan Pengaduan Online (SP4N-LAPOR) di kabupaten. Sistem pengelolaan pengaduan nasional Indonesia dijalankan oleh semua penyedia pelayanan publik (kementerian, lembaga dan pemerintah daerah) dan sudah terintegrasi di tingkat nasional. Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong penggunaan SP4N-LAPOR di setiap tingkat pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Daftar kabupaten yang menggunakan SP4N-LAPOR dapat dilihat di Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.

Pada tanggal 25 Maret 2022, FGD dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas tentang data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang digunakan dalam tiga indikator, yaitu: perlindungan untuk hutan tetap (Indikator 1); perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi (Indikator 2); dan perlindungan untuk lahan gambut (Indikator 4). Peserta yang hadir dalam FGD ini berasal dari Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II dan Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Geographic Information Sistem Tata Ruang (GISTARU) untuk mengumpulkan data spasial di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Walaupun data perencanaan tata ruang kabupaten tersedia di tingkat nasional, Kementerian ATR/BPN tidak dapat memberikan akses ke data shapefile karena memerlukan izin kabupaten. Data shapefile yang dapat dibagikan melalui Kementerian ATR/BPN adalah rencana tata ruang nasional

Tabel 5. Rangkuman hasil FGD tentang penyempurnaan indikator

Nº	Tang gal	K/L	C/L Indikator Data lama Data alternatif		rnatif	Catatan	Langkah selanjutnya		
	<b>3</b>			Sumber data	Ketersediaan di tingkat pusat	Sumber data	Ketersediaan di tingkat pusat		
1	4 Maret 2022	KLHK	Pengendalia n kualitas lingkungan hidup (Indikator 7)	Indeks Kualitas Air di kabupaten	Tidak tersedia	Indeks Kualitas Air di kabupaten	Tersedia	Data dikumpulkan per 31 Agustus 2022	Unggah data ke platform
			(Indikator 1)	Indeks Kualitas Air di kabupaten	Tidak tersedia	Indeks Kualitas Air di kabupaten	Tersedia		
			Perencanaa n penggunaan lahan berkelanjuta n (Indikator	Daftar Kabupaten yang memiliki DDDTLH	Tidak tersedia	DDDTLH	Tersedia	PDLKWS memiliki daftar kabupaten yang telah menyiapkan DDDTLH dan RPPLH, data masih disusun secara manual.	Menindaklanjuti data DDDTLH dan RPPLH dengan PDLKWS.
		n (Indikator 23)	Daftar Kabupaten yang memiliki RPPLH	Tersedia	RPPLH	Tersedia			
2	7 Juni 2022		Mitigasi perubahan	FREL Kabupaten	Tidak tersedia	1. Ketersediaan laporan IGRK	1. Tersedia	Data nomor 1 & 3 dikompilasi dalam SRN. Data nomor 2	

N°	Tang gal	K/L	Indikator	Data	lama	Data alte	rnatif	Catatan	Langkah selanjutnya
				Sumber data	Ketersediaan di tingkat pusat	Sumber data	Ketersediaan di tingkat pusat		
			iklim (Indikator 5)	Emisi dari deforestasi	Tidak tersedia	di Tingkat Kabupaten  2. Ketersediaan perhitungan baseline (FREL) di kabupaten  3. Laporan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.	2. Tidak tersedia saat ini 3. Tersedia	akan dikompilasi di Smart Sign.  Semua data (selain FREL kabupaten) tersedia di Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (IGRK MPV)	Tindak lanjut dengan Direktorat IGRK MPV
3	16 Maret 2022	Kemente rian Pertanian	Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADITAPA) yang terintegrasi dalam proses pengajuan izin	Terdapat SOP di kabupaten untuk mendapatka n persetujuan masyarakat terkait perizinan perkebunan	Tidak tersedia	Laporan perizinan bagi petani plasma	Tidak tersedia	Ini telah diusulkan ke SDI dan disetujui untuk disediakan di situs web SDI pada tahun 2023	Tindak lanjut dengan SDI untuk data input 2023

N°	Tang gal	K/L	Indikator	Data	lama	Data alternatif		Catatan	Langkah selanjutnya
	3*			Sumber data	Ketersediaan di tingkat pusat	Sumber data	Ketersediaan di tingkat pusat		
			perkebunan (Indikator 8)						
4	18 Maret 2022	Kemente rian Dalam Negeri	Partisipasi multi- pemangku kepentingan dalam perencanaa n kabupaten (Indikator 21)	SOP	Tidak tersedia	1. Formulir aspirasi masyarakat disediakan oleh pemerintah daerah  2. Database masukan masyarakat selama Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).	Tersedia     Tersedia	Data tersedia di SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) di bawah Penguatan Pembangunan Daerah (Bangda)	Tindak lanjut dengan SDI untuk data input 2023
			Mekanisme pengaduan (Indikator 22)	SOP/SK yang menangani pengaduan di tingkat kabupaten	Tidak tersedia	Implementasi SPAN-LAPOR di kabupaten	Tersedia	Tim Pengelola SP4N LAPOR; Rencana aksi; dan SOP pengaduan di tingkat pemerintah daerah tersedia di Pusat Penerangan (Puspen).	Tindak lanjut dengan SDI untuk <i>data input</i> 2023
5			Perlindunga n untuk	Rencana Tata Ruang		Rencana Tata Ruang Wilayah		Data shapefile rencana tata ruang wilayah kabupaten	-

Nº	Tang gal	K/L	Indikator	Data	lama	Data al	ternatif	Catatan	Langkah selanjutnya
	gui			Sumber data	Ketersediaan di tingkat pusat	Sumber data	Ketersediaan di tingkat pusat		Scianjaniya
	25	Kemente	hutan tetap	Wilayah	Tidak	Kabupaten	Tidak	tidak dapat diakses melalui	
	Maret 2022	rian ATR BPN	(Indikator 1)	Kabupaten (RTRWK)	tersedia	(RTRWK)	tersedia	Kementerian ATR/BPN.	
	LOZZ		Perlindunga	(11111111)				Tidak ada data alternatif	
			n kawasan					yang dapat menggantikan	
			yang					RTRWK. Harus	
			penting					menghubungi masing-	
			untuk					masing BAPPEDA	
			layanan					kabupaten untuk meminta	
			ekologi					izin dan data.	
			(Indikator 2)						
			Perlindunga	•					
			n untuk						
			lahan						
			gambut						
			(Indikator 4).						

#### Diskusi tentang pertukaran data

Mekanisme pertukaran data dibuat untuk memfasilitasi pertukaran data antar K/L agar data dapat dimutakhirkan secara berkala di masa mendatang. FGD mengindikasikan bahwa setiap Kementerian/Lembaga memiliki mekanisme pertukaran data masing-masing (Lampiran A). Ada delapan kementerian/lembaga yang terlibat dalam proses ini:

- 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
- 2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
- 3. Badan Pusat Statistik (BPS)
- 4. Kementerian Pertanian (Kementan)
- 5. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
- 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
- 7. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
- 8. Badan Pangan Nasional (BPN)

Terpercaya membutuhkan izin dari pemilik data untuk melakukan pertukaran data, baik untuk data spasial maupun data non-spasial. Pemilik data spasial di KLHK adalah Direktorat IPSDH KLHK. Protokol data informasi geospasial tematik (IGT) diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/2021. Pertukaran data dapat dilakukan antar K/L melalui permintaan/perjanjian data (bukan MoU), yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Dokumen tambahan seperti pakta Integritas dan perjanjian antara BAPPENAS dan pihak ketiga akan diperlukan apabila persiapan platform melibatkan pihak ketiga. Di sisi lain, wali data untuk data non-spasial adalah produsen data. Terpercaya mengharuskan agar pihak yang membutuhkan data secara langsung menghubungi produsen data dengan mengirimkan surat permintaan.

Diskusi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan pada tanggal 9 Maret 2022. Diskusi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial - BIG dan dari Direktorat Jaminan Sosial - Badan Pusat Statistik. Terpercaya membutuhkan data shapefile untuk batas administrasi kabupaten yang dimiliki oleh BIG. Terpercaya dapat langsung mengunduh data batas wilayah kabupaten dari Ina-Geoportal yang dapat diakses oleh publik (<a href="https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web">https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web</a>). Terpercaya membutuhkan data kemiskinan tingkat kabupaten dari BPS. Data ini sudah bisa diakses oleh publik dan diproduksi setiap tahun, sehingga Terpercaya bisa langsung mengakses situs web BPS.

Terpercaya membutuhkan beberapa dataset dari Kementerian Pertanian, seperti data luas perkebunan di kabupaten, luas perkebunan rakyat, jumlah petani swadaya, produktivitas petani kecil dan petani kecil yang memiliki STDB. Proses pertukaran data di bawah Kementerian Pertanian dapat dilakukan melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Terpercaya diminta untuk mengirim surat permintaan ke Pusdatin.

Mekanisme pertukaran data antara Kemendagri dengan BAPPENAS dapat dilakukan dengan mekanisme SDI. Sebelum mekanisme SDI dapat digunakan untuk Terpercaya, pertukaran data dapat dilakukan melalui Pusdatin di Kementerian Dalam Negeri. Pertama, Terpercaya diharuskan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menyebutkan tentang data yang dibutuhkan dan tujuan penggunaan data. Data publik dapat diakses melalui situs

web (<a href="https://e-database.kemendagri.go.id/">https://e-database.kemendagri.go.id/</a>). Akan tetapi, jika data tersebut tidak terbuka untuk publik, maka Terpercaya disarankan untuk meminta persetujuan dari produsen data dan kemudian menghubungi Pusdatin.

Diskusi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pangan Nasional dilakukan pada tanggal 5 April 2022. Terpercaya membutuhkan data tentang total anggaran kabupaten dan alokasi anggaran kabupaten untuk keberlanjutan/lingkungan. Untuk mengakses data tersebut, pemohon perlu mengajukan permintaan data ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Jika data telah disetujui oleh DJPK, maka DJPK akan bekerjasama dengan Pusat Informasi dan Teknologi (Pusintek) untuk menjalankan mekanisme pertukaran data. Sebelum mendapatkan data dari Badan Pangan Nasional (BPN), Terpercaya diharuskan untuk mengirimkan surat permohonan kepada Sekretaris Utama (Plt. Setama).

## 4.2 Lokakarya dengan BAPPENAS dan pemerintah daerah terpilih

Penyempurnaan dan operasionalisasi indikator Terpercaya dilanjutkan dengan lokakarya yang diselenggarakan oleh Direktorat Pangan dan Pertanian, BAPPENAS, pada tanggal 25-26 April 2022 di Hotel Santika Bogor. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BAPPENAS, Satu Data Indonesia (SDI), Sekretariat Nasional SDG, Environmental Governance Lead USAID-SEGAR dan Pakar Terpercaya. Lokakarya tersebut membahas aksi berikut:

- 1. Pemutakhiran rumus indikator dan data berdasarkan diskusi yang mendalam tentang seluruh indikator Terpercaya dan hasil FGD
- 2. Persiapan integrasi Platform Terpercaya dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BAPPENAS
- 3. Tindak lanjut mekanisme pertukaran data

Yang penting, lokakarya berkontribusi untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil sebelum mengintegrasikan platform dan mengoperasionalkan mekanisme pertukaran data.

Lokakarya hari pertama membahas tentang pemutakhiran rumus indikator dan data berdasarkan diskusi yang mendalam tentang seluruh indikator Terpercaya dan hasil FGD. Beberapa perubahan indikator juga mengakibatkan penyesuaian nama indikator. Berikut adalah 12 indikator Terpercaya yang diperbarui:

- 1. Perlindungan untuk hutan tetap (Indikator 1)
- 2. Perlindungan untuk lahan gambut (Indikator 4)
- 3. Mitigasi perubahan iklim (Indikator 5)
- 4. Pengendalian kualitas lingkungan hidup (Indikator 7)
- 5. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Indikator 9)
- 6. Resolusi konflik lahan dan pertanian (Indikator 10)
- 7. Ketahanan Pangan (Indikator 13)
- 8. Jumlah asosiasi per kelompok petani swadaya (Indikator 15)

- 9. Bantuan untuk petani swadaya (Indikator 16)
- 10. Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten (Indikator 21)
- 11. Mekanisme pengaduan (Indikator 22)
- 12. Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan (Indikator 23)

Lokakarya hari kedua membahas tentang persiapan integrasi Platform Terpercaya ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BAPPENAS dan mekanisme pertukaran data. Pusdatin sedang menginstalasi server untuk mengakomodasi platform Terpercaya. Aksi berikutnya yang perlu dilakukan adalah bantuan manajemen aplikasi, uji penetrasi dan penyediaan domain untuk platform. BAPPENAS menginformasikan bahwa server sudah siap dan platform Terpercaya sedang disiapkan untuk proses instalasi.

Sebelum menjalankan mekanisme pertukaran data melalui SDI, Terpercaya harus menyerahkan daftar sumber data indikator ke Sekretariat SDI<sup>16</sup>. Jika sumber data yang diusulkan kemudian disetujui oleh SDI, sumber data tersebut akan menjadi data prioritas yang akan dikumpulkan oleh K/L pada tahun 2023. Pengumpulan data prioritas juga akan mendapatkan pendanaan. Di masa mendatang, jika sumber data Terpercaya dapat disediakan melalui mekanisme SDI, maka pertukaran data antar Kementerian/Lembaga tidak memerlukan Nota Kesepahaman (MoU). Saat ini, Terpercaya telah menyerahkan daftar data prioritas dan data persetujuan telah diumumkan (Lampiran A).

#### Lokakarya dengan pemerintah daerah

Indikator Terpercaya digunakan sebagai Indikator Tata Kelola Lingkungan dalam proyek USAID SEGAR yang bekerja sama dengan BAPPENAS. Data indikator Terpercaya dikumpulkan di 12 kabupaten percontohan di empat provinsi Proyek SEGAR. Lokakarya dengan pemerintah daerah <sup>17</sup> dan pemerintah provinsi telah dilakukan secara *online* pada tanggal 28 Maret 2022 sebelum memvalidasi pengumpulan data dan menganalisis indikator Terpercaya di 12 kabupaten.

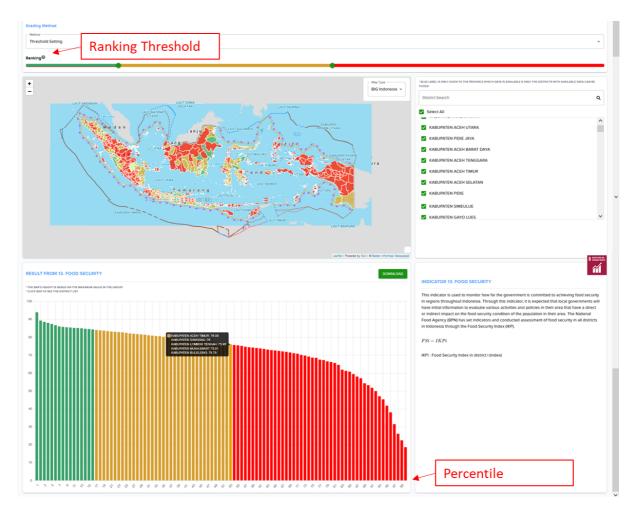
#### 4.2.1 Diskusi tentang sistem penilaian

Pada tanggal 15 Februari 2022, diskusi dengan pakar Terpercaya diselenggarakan untuk meningkatkan metode penilaian Terpercaya. Sebelumnya, sistem penilaian menggunakan rata-rata nasional dan provinsi untuk menentukan peringkat kabupaten. Sistem penilaian ini harus ditinjau kembali karena rata-rata nasional dan provinsi dipengaruhi oleh nilai yang ekstrim karena mencakup semua data.

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Proses mekanisme berbagi data dengan SDI dijelaskan di Bab 2.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Bappeda untuk 12 kabupaten dan 4 provinsi



Gambar 2. Persentil dan nilai ambang batas di platform

Perbaikan yang diusulkan adalah menerapkan metode persentil. Persentil adalah perbandingan antara sebuah skor dan skor lainnya di kelompok tersebut yang menunjukkan persentase skor yang berada di bawah sebuah skor. Sebagai contoh, jika nilai indikator 13 untuk kabupaten X adalah 75,79 dan berada pada persentil ke-53, artinya nilai 75,79 lebih tinggi dari 53% nilai lainnya. Beberapa kabupaten masuk ke dalam persentil ke-53 (Gambar 2). Saat menentukan berapa nilai yang dikategorikan hijau (Peringkat A), kuning (Peringkat B) dan merah (Peringkat C), pengguna dapat menyesuaikan ambang batas sesuai dengan preferensi masing-masing. Warna hijau (Peringkat A) dikategorikan sangat baik dan menggambarkan daerah dengan kinerja indikator paling tinggi. Warna kuning (Peringkat B) dikategorikan baik dan menggambarkan daerah dengan kinerja indikator sedang. Warna merah (Peringkat C) membutuhkan perhatian khusus dan menggambarkan daerah yang perlu ditingkatkan kinerja indikatornya.

#### 4.3 Pembelajaran dari proses Terpercaya

Pada bulan Januari - Juni 2022, indikator Terpercaya disempurnakan, serta mekanisme dan platform pertukaran data dikembangkan untuk mengoperasionalkan Terpercaya sebagai sistem nasional. Pembelajaran utama dari penyempurnaan dan operasionalisasi indikator Terpercaya dapat dikategorikan sebagai berikut:

#### A. Komunikasi antar kementerian/lembaga dan mendapatkan dukungan mereka

- 1. Proses penyempurnaan indikator Terpercaya dilakukan melalui dialog intensif dengan beberapa kementerian dan lembaga. Komunikasi berperan penting untuk memastikan bahwa semua kementerian sudah menyepakati target Terpercaya dan mengetahui dengan jelas tentang hal-hal yang diharapkan dari mereka.
- 2. Berbagai sesi FGD mengindikasikan bahwa setiap kementerian memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. FGD yang diselenggarakan selama proyek melibatkan pemilik data dan produsen data yang mungkin tidak diundang ke pertemuan AC Terpercaya sebelumnya. Pemutakhiran berkala, misalnya melalui buletin, tentang perkembangan Terpercaya perlu diberikan kepada kementerian/lembaga.
- 3. Peserta perlu didorong untuk tetap terlibat untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Lokakarya dan pertemuan tatap muka cenderung lebih efektif karena semua peserta memiliki kesempatan untuk berbicara dan menghindari kesalahpahaman atau mendapatkan klarifikasi secara langsung.

#### B. Mekanisme pertukaran data dengan kementerian/lembaga

- 4. Upaya untuk membangun pertukaran data yang berkelanjutan antar kementerian membutuhkan proses yang panjang dan terdiri dari beberapa langkah, seperti mengidentifikasi pemilik data dan produsen data, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan setiap pemilik data dan produsen data, memahami mekanisme pertukaran data untuk masing-masing kementerian, dan memenuhi persyaratan mekanisme pertukaran data.
- 5. Follow-up secara berkala dengan masing-masing kementerian perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pertukaran data berjalan sesuai timeline.

#### C. Keterlibatan pakar dan pemerintah dalam proses penyempurnaan indikator

Pakar dan Kementerian/Lembaga perlu dilibatkan dalam proses penyempurnaan indikator. Umpan balik dari pemerintah dan pakar diperlukan sebelum mengidentifikasi sumber data yang sesuai dan tersedia di tingkat nasional karena ketersediaan data yang akurat dan terkini menjadi kunci keberhasilan Terpercaya.

## Chapter 5: Platform Terpercaya yang didesain ulang dan diperbarui, termasuk database multitahun

#### 5.1 Upgrade desain sistem online Terpercaya

Inisiatif Terpercaya telah mengembangkan 23 indikator untuk mengukur keberlanjutan kabupaten di Indonesia. Data yang digunakan untuk mengukur kinerja indikator tersebut adalah data spasial dan data tabular. Upgrade sistem mencakup: User Interface/User Experience (UI/UX); dashboard fungsional; sistem database multi-tahun; dan data entry yang disederhanakan. Perkembangan rinci dan data yang dikumpulkan dijelaskan pada Tabel 6 - 8. Data pada Tabel 8 mewakili status unggahan data saat ini (per 16 September 2022). Lampiran J menunjukkan ilustrasi tambahan dari upgrade platform.

Tabel 6. Spesifikasi sistem

Nº	Komponen	Detail
1	Sistem operasi	Linux CentOS 7
2	Bahasa pemrograman	<ul><li>Front end menggunakan JavaScript (React)</li><li>Back end menggunakan C#</li></ul>
3	Sistem database	PostgreSQL
4	Spesifikasi infrastruktur TI	<ul><li>RAM: 4GB</li><li>CPU: 4vCPU</li><li>Penyimpanan: 100 GB</li></ul>
5	Opsi penyimpanan dan memori tersedia	Ini akan disediakan oleh Direktorat Pangan dan Pertanian BAPPENAS dengan spesifikasi:  RAM: 32 GB Prosesor: 20 Core Penyimpanan: 4 TB
6	Versi dari setiap software yang digunakan harus diidentifikasi sebelumnya	<ul> <li>NET core versi 5.0.101 (Server)</li> <li>PostgreSQL versi 11.5 (Database)</li> <li>React versi 16.9.0 (Front end)</li> </ul>

Tabel 7. Pengembangan sistem

N°	Komponen/fitur yang	Penjelasan
	diperbarui	
1	Akses detail	Situs web: http://103.97.102.41/     Username: inobu@midiharmonica.com     Password: inobu123  *akses akan diubah setelah serah terima, jadi hanya BAPPENAS yang memiliki akses ke sistem
2	Dashboard	Dashboard ditambahkan untuk menampilkan dan memantau semua kegiatan platform dan untuk memasukkan data ke platform
3	Hak akses pengguna	<ul> <li>Dashboard ditambahkan untuk menampilkan dan memantau kegiatan platform dan untuk memasukkan data ke platform</li> <li>Untuk mengatur apakah pengguna diberi akses untuk menjadi Admin atau tidak</li> </ul>
		Sekretariat Terpercaya, BAPPENAS memasukkan data. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten atau K/L dapat memasukkan data ke platform jika diperlukan.
4	Mekanisme data entry	Data input memiliki tiga mekanisme opsional:
		Mengisi formulir online
		Admin mengisi formulir data dengan nilai indikator sesuai petunjuk
		Skema bulk-insert
		Admin mengunggah file Excel berisi data indikator ke platform. Sistem akan memindahkan data Excel ke database indikator secara otomatis; formulir data tidak perlu diisi. File Excel dibagi menjadi Excel default dan Excel Terpercaya. Excel default adalah file Excel yang berasal dari situs web K/L, yang dapat diunggah secara langsung ke platform tanpa modifikasi apa pun. Pada saat yang sama, Excel Terpercaya didasarkan pada templat database platform. Excel Terpercaya mengkompilasi file data yang tersebar atau data non-Excel menjadi satu file Excel.
		<ul> <li>Data entry shapefile</li> <li>Admin dapat mengunggah data shapefile; sistem dapat menghitungnya untuk menghasilkan nilai.</li> </ul>
5	Periode data	Mendukung data input multi-tahun
6	Diagram tebar	<ul> <li>Menambahkan fitur unduh agar pengguna dapat mengunduh data pengukuran indikator di Excel yang sudah dianalisis</li> <li>Menambahkan lebih banyak informasi tentang diagram tebar</li> <li>Opsi tahun</li> </ul>

N°	Komponen/fitur yang diperbarui	Penjelasan
	·	
7	District Profile	<ul> <li>Warna indikator telah disesuaikan sesuai dengan SDG</li> <li>Menambahkan penjelasan tentang indikator di sisi kanan diagram</li> <li>Opsi tahun</li> </ul>
8	District Ranking	<ul> <li>Peta terintegrasi (salah satu opsi terhubung ke Badan Informasi Geospasial)</li> <li>Opsi tahun ditambahkan</li> <li>Peringatan penjelasan penilaian tentang pengukuran ditambahkan</li> <li>Rentang nilai pada grading slider ditambahkan</li> <li>Menambahkan fitur unduh agar pengguna dapat mengunduh data pengukuran indikator di Excel yang sudah dianalisis</li> </ul>
9	Fitur lainnya	<ul> <li>FAQ</li> <li>Hubungi Kami</li> <li>Bilingual (Inggris-Indonesia)</li> <li>Menambahkan video di beranda</li> </ul>
10	Desain interaktif	<ul> <li>Sistem pemantauan bersifat interaktif sehingga data perlu dimasukkan dalam format dan satuan tertentu. Sistem ini juga memberi tahu pengguna bahwa koreksi perlu dilakukan jika data tidak tersedia dalam format yang diperlukan.</li> <li>Dengan platform ini, pengguna dapat mengajukan pertanyaan melalui menu Hubungi Kami; Admin dapat menjawab pertanyaan melalui email.</li> </ul>
11	Dapat disesuaikan skalanya	<ul> <li>Sistem dapat digunakan untuk semua kabupaten di Indonesia</li> <li>Pemerintah kabupaten dan K/L dapat memperoleh akses untuk memperbarui data mereka di platform jika diperlukan</li> </ul>
12	Konfigurasi keamanan dan privasi	Otentikasi & otorisasi khusus
13	User role dan konfigurasi izin	Otentikasi & otorisasi khusus
14	Konfigurasi file robot (.txt dan .htaccess)	Dikonfigurasi dalam appsettings.json; tidak menggunakan robot.txt lagi
15	Pembatasan file tertentu dan dokumen sensitif	Otentikasi & otorisasi khusus

Tabel 8. Data dikumpulkan per 16 September 2022

Nº	Indikator	Didapatkan dari Data Nasional	Didapatkan dari Data Kabupaten	Data Belum Didapatkan
1	Perlindungan untuk hutan tetap		<b>√</b> *	
2	Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi		<b>/</b> *	
3	Pencegahan kebakaran	✓		
4	Perlindungan untuk lahan gambut		<b>✓</b>	
5	Mitigasi perubahan iklim			✓
6	Pengelolaan hutan produksi lestari			1
7	Pengendalian kualitas lingkungan hidup	✓		
8	Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADITAPA) yang terintegrasi dalam proses pengajuan izin perkebunan			<b>✓</b>
9	Pengakuan terhadap tanah adat			<b>√</b>
10	Resolusi konflik lahan dan pertanian			<b>√</b>
11	Pangsa petani swadaya	✓		
12	Pendaftaran petani swadaya		✓	
13	Ketahanan pangan	✓		
14	Produktivitas petani kecil	✓		
15	Jumlah asosiasi/kelompok petani perkebunan	<b>√</b> *		
16	Bantuan untuk petani perkebunan	<b>/</b> *		
17	Perkebunan bersertifikat berkelanjutan	<b>√</b> *		
18	Tingkat kemiskinan	✓		

N°	Indikator	Didapatkan dari Data Nasional	Didapatkan dari Data Kabupaten	Data Belum Didapatkan
19	Proporsi anggaran kabupaten yang dialokasikan untuk keberlanjutan	1		
20	Akses informasi publik	✓		
21	Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten			<b>✓</b>
22	Mekanisme pengaduan		✓	
23	Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan		1	

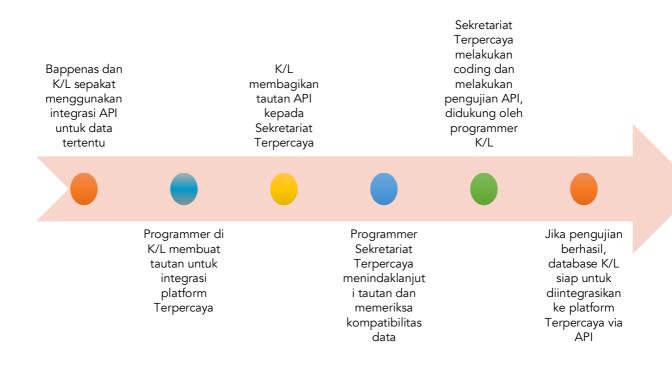
Catatan: \*) hanya satu sumber data yang dikumpulkan (satu indikator mungkin akan memerlukan dua sumber data)

# Chapter 6: Pedoman/SOP untuk pemutakhiran data indikator secara otomatis dan manual, termasuk lampiran perjanjian berbagi data jika diperlukan

#### 6.1 Pemutakhiran otomatis data indikator Terpercaya

Pemutakhiran otomatis data indikator Terpercaya dapat dilakukan dengan skema Open Application Programming Interface (API) atau Web Service, serta dapat digunakan sebagai mekanisme layanan pertukaran data melalui integrasi antar situs web. Pemutakhiran ini memasukkan data K/L ke platform Terpercaya. Saat data di K/L diperbarui maka data di platform Terpercaya dapat secara otomatis diperbarui pada saat yang bersamaan. Saat ini belum ada integrasi API antara Platform Terpercaya dan platform K/L. Selain itu, Kementerian dan Lembaga masih membuat infrastruktur API dan tidak semuanya siap menggunakan sistem ini.

Integrasi API hanya dapat dilanjutkan setelah Sekretariat Terpercaya menerima tautan API dari K/L (Gambar 3). BAPPENAS telah menyebarluaskan surat berbagi data kepada K/L untuk mengumpulkan data indikator yang dibutuhkan per 16 September 2022. Saat ini pengumpulan data masih berlangsung. Jadwal pemutakhiran data di Platform Terpercaya via API mengikuti aturan di Kementerian/Lembaga yang memiliki API. Setiap K/L mungkin memiliki protokol masing-masing terkait API sharing; akan tetapi, mereka menyarankan agar ada perjanjian terlebih dahulu. Setelah itu, K/L dapat memandu Sekretariat Terpercaya untuk mengumpulkan data melalui mekanisme Open API. K/L membagikan tautan API dengan Sekretariat Terpercaya, setelah itu programmer melakukan coding dengan tautan tersebut untuk melakukan sinkronisasi.



Gambar 3. Proses Integrasi API

#### 6.2 Pemutakhiran manual data indikator Terpercaya

Sekretariat Terpercaya perlu memperbarui data setahun sekali. Pemutakhiran disarankan agar dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 April setiap tahun. Tim Programmer dan GIS analyst untuk data entry dan pengembangan sistem juga harus ditunjuk. Tim Programmer beranggotakan programmer front end dan back end. Keterampilan yang perlu dimiliki oleh programmer front-end antara lain pemrograman dalam HTML5, CSS dan JavaScript serta penggunaan front-end libraries dan framework (Bootstrap, Foundation, Semantic UI, Angular, React JS, dll.). Di sisi lain, keterampilan yang dibutuhkan oleh back-end programmer adalah bahasa pemrograman seperti Python, Java, Golang, .NET, atau Ruby on Rails. Proses ini dapat dilakukan oleh banyak pihak jika mereka memiliki akses ke dashboard. Dengan kata lain, Sekretariat Terpercaya (BAPPENAS), pemerintah daerah (diwakili oleh Organisasi Perangkat Daerah/OPD) dan K/L yang relevan untuk indikator dapat memasukkan data ke dalam sistem. Sebagai pemilik platform, BAPPENAS akan memiliki wewenang utama dalam pemberian akses. BAPPENAS dapat memberikan akses kepada pemerintah daerah dan K/L yang bersedia memasukkan data. Data entry sebaiknya dilakukan oleh Sekretariat Terpercaya, khususnya untuk data yang bersumber dari SDI dan K/L.

Berikut adalah mekanisme pemberian akses kepada pihak di luar BAPPENAS:

1. Sekretariat Terpercaya memetakan K/L atau OPD yang akan melakukan data entry secara mandiri. Pada saat yang sama, K/L dan OPD mendaftarkan diri sebagai pengguna. Pendaftaran pengguna dijelaskan dalam Bab 7, bagian 7.1.

- 2. Setelah mendaftar, K/L dan OPD menghubungi Sekretariat Terpercaya dan memberikan username mereka.
- 3. Sekretariat menentukan jenis administrator dan memberikan hak akses kepada K/L dan OPD agar dapat memasukkan data ke platform.
- 4. Setelah itu, K/L dan OPD dapat langsung mengunggah data ke platform setelah mendapatkan akses.

Mekanisme pemutakhiran data Terpercaya secara manual dapat dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan sumber data, yaitu skema yang menggunakan data dari SDI, situs web publik K/L, dan K/L atau Pemerintah Kabupaten (data non-publik). Daftar indikator berdasarkan skema dapat dilihat di Lampiran I. Pada skema SDI, Sekretariat Terpercaya dapat langsung mengunduh data melalui situs web SDI dan tidak perlu menggunakan izin berbagi data karena data tersebut bersifat umum. Untuk skema K/L atau Pemerintah Kabupaten, prosedur pemutakhiran data dilakukan dengan izin berbagi data untuk K/L terkait, khususnya untuk data yang belum tersedia di platform SDI. Untuk mekanisme manual entry (Tabel 9), ada tiga jenis model entry seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 9. Jenis Manual Entry** 

N°	Jenis <i>Manual Entry</i>	Penjelasan
1	Entri Formulir	<ul> <li>Admin dapat memasukkan nilai data pada formulir (online)</li> <li>Setelah dimasukkan, nilai data harus disetujui oleh Super Admin sebelum dapat diproses</li> </ul>
2	Bulk-Insert Entry	<ul> <li>Dengan Bulk-Insert, Admin dapat mengunggah data dengan format Excel. Ada dua jenis Excel untuk entri ini: Excel default dan predefined Excel.</li> <li>Excel default adalah file Excel yang diunduh dari situs web kementerian. File tersebut kemudian diunggah ke platform Terpercaya tanpa modifikasi apa pun.</li> <li>Predefined Excel adalah file Excel yang dirancang oleh programmer Terpercaya. Admin dapat mengisi informasi ini di Excel, kemudian mengunggahnya ke platform.</li> <li>Mekanisme ini tidak membutuhkan persetujuan karena semua data didasarkan pada database kementerian.</li> </ul>
3	Entri Shapefile	<ul> <li>Ini digunakan untuk mengunggah data shapefile</li> <li>Data shapefile disesuaikan dengan district code dan informasi khusus untuk setiap indikator seperti luas dalam hektare, sehingga lebih mudah untuk diintegrasikan dengan platform pemerintah lainnya berdasarkan kode kabupaten.</li> </ul>

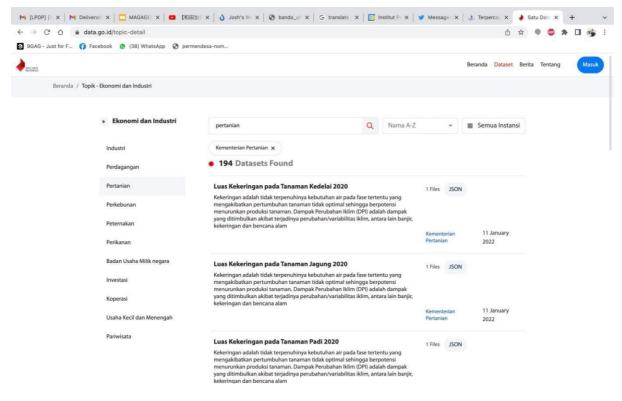
#### 6.2.1 Data diakses melalui SDI

Untuk pemutakhiran data yang ada di SDI, data harus dimasukkan ke platform oleh Sekretariat Terpercaya. Dalam hal ini, K/L tidak terlibat dalam data entry karena Sekretariat Terpercaya tidak meminta data secara langsung dari K/L. Melalui SDI, data K/L dapat diakses di situs web SDI (https://data.go.id/home). Proses pemutakhiran data manual dengan data yang bersumber dari SDI adalah:

#### A. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh Sekretariat Terpercaya. Mekanisme yang digunakan adalah dengan mengunduh data secara langsung dari situs SDI (https://data.go.id/home). Data Indikator Terpercaya akan dipublikasikan di situs web SDI pada bulan Januari 2023. Sekretariat Terpercaya dapat memulai pengumpulan data setelah itu. Berikut langkahlangkahnya (lihat Gambar 5):

- 1. Setelah data dipublikasikan di situs web SDI, Sekretariat Terpercaya akan mengunduh data indikator (Gambar 4).
- 2. Setelah data diunduh, Sekretariat Terpercaya melakukan pengecekan data sebelum dimasukkan ke Platform Terpercaya. Pengecekan dilakukan oleh Sekretariat Terpercaya dengan mempertimbangkan jenis dan format data yang diambil dari SDI. Data dapat diproses jika memenuhi persyaratan platform.
- 3. Data ditransfer ke predefined Excel untuk bulk-insert entry.
- 4. Predefined Excel siap diunggah ke platform.



Gambar 4. Situs web SDI

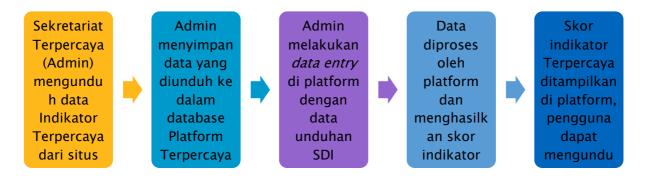
#### Catatan:

- 5. Pilihan organisasi, mis. Kementerian Pertanian, Pemerintah Kabupaten, dll.
- 6. Kata kunci
- 7. Jenis file (klik nama file dan unduh data)

#### B. Tahap Data Input<sup>18</sup>

Setelah semua data di SDI diunduh, diverifikasi dan ditransfer ke file predefined Excel oleh Sekretariat, langkah selanjutnya adalah memasukkan data ke dalam sistem. Langkahlangkah untuk proses data input adalah:The Terpercaya Secretariat transfers the data into the predefined excel template<sup>19</sup>.

- 1. Sekretariat Terpercaya mentransfer data ke dalam templat predefined Excel.
- 2. Sekretariat Terpercaya memasukkan file data predefined Excel ke dalam Platform Terpercaya.
- 3. Data tersebut kemudian dihitung oleh sistem sesuai dengan rumus indikator.
- 4. Setelah data dihitung, hasil nilai indikator akan muncul secara otomatis di halaman "District Ranking". Hasil analisis data Indikator Terpercaya kemudian dapat diakses oleh pengguna (termasuk mengunduh).
- 5. Data dari tahun sebelumnya disimpan di platform.



Gambar 5. Pemutakhiran indikator Terpercaya dengan data yang bersumber dari situs web SDI

#### 6.2.2 Data diakses melalui situs web publik K/L

Data untuk empat indikator tersedia di situs web K/L. Ini adalah data publik yang dapat diunduh dan diakses oleh semua orang. Dengan skema ini, Sekretariat Terpercaya hanya perlu mengunduh data dari K/L. Semua data dari empat indikator tersebut tersedia dalam format Excel. Setelah itu, data bisa langsung dimasukkan ke Platform Terpercaya dengan metode Bulk-Insert. Tabel 10 menunjukkan empat indikator yang datanya tersedia di situs web K/L.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Prosedur teknis untuk memasukkan data dapat dilihat di Bab 7 Pedoman/SOP untuk operasionalisasi dan pemeliharaan platform, termasuk pengolahan dan pembersihan data

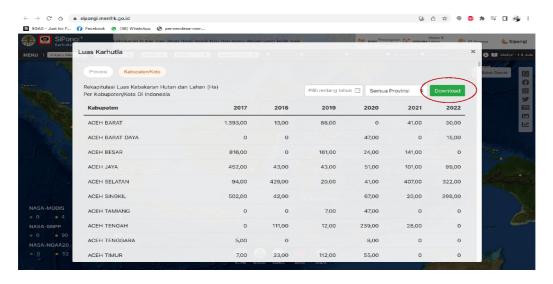
<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> See the details in Chapter 7.

Tabel 10. Indikator yang datanya bersumber dari situs web data publik K/Ls

Indikator	Jenis Data	Situs Web K/L
Pencegahan kebakaran	Luas kebakaran di kabupaten	https://sipongi.menlhk.go.id/
Tingkat kemiskinan	Persentase kemiskinan di tingkat kabupaten	https://www.bps.go.id/indicator/23/624/1/garis- kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html
Ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	http://app2.badanpangan.go.id/
Proporsi anggaran untuk keberlanjutan	APBD untuk keberlanjutan/lingkunga n hidup dan anggaran tingkat kabupaten	https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412

Langkah-langkah untuk mengolah data dari situs web K/L adalah:

- 6. Sekretariat Terpercaya (Admin) mengunduh data dari situs web K/L (semua data yang disediakan di situs web tersedia dalam format Excel). Gambar 6 menunjukkan contoh situs web data publik K/L tentang total luas kebakaran per Kabupaten.
- 7. File yang diunduh (tanpa modifikasi konten apa pun) kemudian diunggah ke Platform Terpercaya dengan metode *bulk-insert*. Langkah untuk *bulk-insert* adalah: *DASHBOARD > Indicator > INPUT INDICATOR DATA AT ONCE*.
- 8. Platform mengolah data dan skor indikator yang dihasilkan akan langsung tersedia.



Gambar 6. Contoh situs web data publik K/L untuk luas kebakaran

#### 6.2.3 Data diakses melalui K/L dan Pemerintah Kabupaten

Pemutakhiran data dengan mekanisme ini dilakukan untuk data yang tidak tersedia di situs web SDI dan K/L. Proses pemutakhiran data untuk data yang tidak tersedia di SDI membutuhkan izin berbagi data dengan K/L dan pemerintah daerah karena sumber data

dan akses ada di K/L terkait. Pemutakhiran data melalui skema direct data sharing dengan K/L dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

#### A. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui koordinasi langsung dengan Wali Data di masing-masing K/L. Berikut adalah tahapannya:

- 1. Pengumpulan data yang bersumber dari K/L dilakukan setiap tahun dari tanggal 1 Januari 1 April.
- 2. Sekretariat Terpercaya mengidentifikasi data yang dibutuhkan dari setiap K/L.
- 3. Sekretariat Terpercaya memproses izin berbagi data<sup>20</sup> dengan K/L.
- 4. Jika K/L ingin mengunggah data secara langsung ke sistem, Sekretariat Terpercaya akan memberikan akses<sup>21</sup> kepada staf K/L sebagai Admin untuk dashboard sistem.
- 5. K/L yang memilih untuk mengirimkan data mentah secara langsung ke Sekretariat Terpercaya dapat mengirimkannya melalui email ke sekretariat yang bertanggung jawab atas pengumpulan data (pertanian@bappenas.go.id).

#### **B. Proses Data Input**

Mekanisme proses data input hampir sama dengan mekanisme pemutakhiran data SDI. Perbedaannya adalah pada pihak yang melakukan data entry. Melalui skema ini, integrasi data K/L ke dalam sistem dapat dilakukan oleh K/L sendiri atau oleh Sekretariat. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dijalankan:

- 1. Proses data input dilakukan pada tanggal 1-30 April setiap tahunnya.
- 2. Sekretariat Terpercaya atau K/L memasukkan data ke dalam sistem Terpercaya.
- 3. Sekretariat Terpercaya melakukan pengecekan data sebelum data dianalisis oleh sistem. Tujuan pengecekan data adalah untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan sudah sesuai dengan persyaratan dari platform Terpercaya atau tidak.
- 4. Setelah diperiksa, data akan dihitung oleh sistem berdasarkan rumus indikator.
- 5. Setelah data dihitung oleh sistem, nilai indikator akan dihasilkan secara otomatis.
- 6. Data dari tahun sebelumnya akan tetap tersimpan dan dapat diakses di platform.

#### 6.3 Pemeliharaan Data<sup>22</sup>

Pemeliharaan data sepenuhnya dilakukan oleh Sekretariat Terpercaya, khususnya programmer dan Admin. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan:

 Melakukan monitoring untuk mengantisipasi eror data secara berkala. Aspek yang dipantau adalah keamanan data, kapasitas database dan bug sistem.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Pedoman berbagi data di tingkat nasional dijelaskan di Bab 2

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Akses adalah akses untuk menjadi Admin, agar para pihak dapat memasukkan data secara mandiri.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Pedoman pemeliharaan data dapat dilihat di Brief of Guidelines/SOP untuk operasionalisasi dan pemeliharaan platform, termasuk pengolahan dan pembersihan data

- Memperbaiki bug yang terdeteksi. Bug tersebut antara lain tiba-tiba hang, anomali data (data final indikator berbeda dengan data yang dimasukkan), dll. Programmer memeriksa pemrograman platform dan memperbaiki bug.
- 3. Sekretariat Terpercaya memeriksa fitur "message" secara berkala untuk menerima keluhan pengguna. Sekretariat Terpercaya menyampaikan keluhan kepada programmer agar melakukan perbaikan.
- 4. Back up data dilakukan setiap bulan dan disimpan dalam database terpisah.
- 5. Akses ke sistem database dipantau secara berkala.

# Chapter 7: Pedoman/SOP untuk operasionalisasi dan pemeliharaan platform, termasuk pengolahan dan pembersihan data

#### 7.1 Akses pengguna ke Platform

Platform Terpercaya dapat diakses oleh administrator dan pengguna. Bagian ini akan dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kami akan memberikan detail tentang akses administrator (atau "Admin") di platform. Kedua, kita akan membahas akses pengguna atau pengunjung.

#### **Administrator**

Administrator<sup>23</sup> memiliki akses untuk mengoperasikan platform. Ada tiga jenis administrator, yakni: pengguna, data, dan super administrator. Jenis administrator dan lembaga yang akan memberikan akses tersebut dijelaskan pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Jenis Admin di platform

Jenis Admin	Kegiatan	Lembaga
User Admin	Admin yang mengelola pembagian <i>role</i> dan memberikan akses <i>role</i> untuk semua pengguna termasuk <i>data entry</i> , <i>update</i> FAQ dan menjawab pertanyaan pengunjung di platform	Sekretariat Terpercaya BAPPENAS
Data Admin	Bertanggung jawab atas proses <i>data entry</i> untuk semua indikator, termasuk proses verifikasi dan pembersihan data	<ul> <li>BAPPENAS (Sekretariat Terpercaya)</li> <li>Penanggung jawab dari Kementerian/Lembaga (K/L)<sup>24</sup></li> </ul>

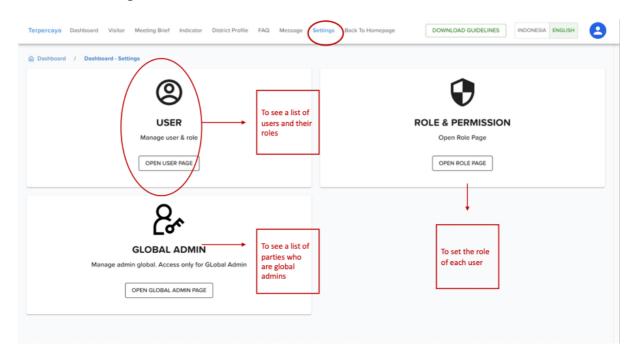
<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Login platform memberikan dua pilihan: User/Admin dan Global Admin. Global Admin biasanya seorang programmer yang memantau dan melakukan semua kegiatan platform, termasuk tugas backend. Global Admin memiliki wewenang yang lebih besar dari Super Admin.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Penanggung jawab dari K/L adalah perwakilan di Pusat Data Informasi (Pusdatin) di masing-masing K/L

		Penanggung jawab atas     Organisasi Perangkat Daerah     (OPD) <sup>25</sup>
Super Admin	Memiliki kuasa penuh untuk mengakses semua fitur, kombinasi antara User Admin dan Data Admin.	BAPPENAS (Sekretariat Terpercaya)

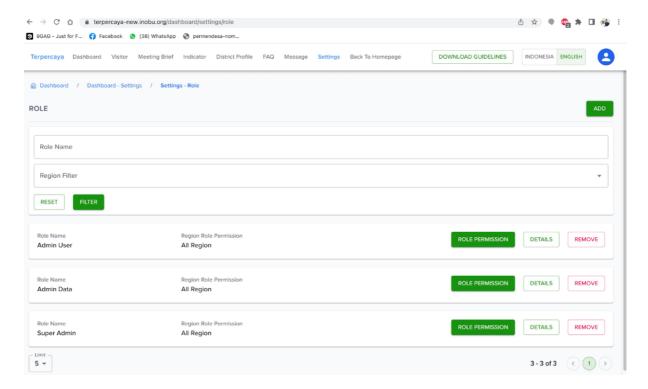
Super Admin dapat mengubah fungsi setiap Admin setiap saat. Super Admin dapat menambah jenis Admin melalui langkah-langkah di bawah ini:

1. Super Admin mengunjungi situs web (http://103.97.102.41/), klik *DASHBOARD*, kemudian *Settings*, kemudian *USER*.

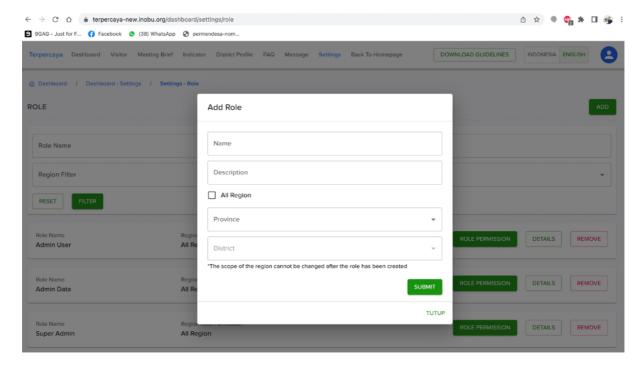


 $<sup>^{\</sup>rm 25}$  Penanggung jawab dari OPD bersifat tentatif, tergantung kebijakan masing-masing OPD di Pemerintah Kabupaten

#### 2. Klik *ADD*.

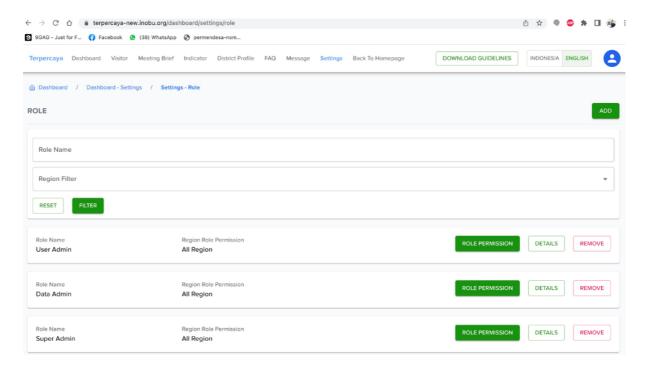


3. Isi formulir untuk jenis Admin baru, kemudian klik SUBMIT

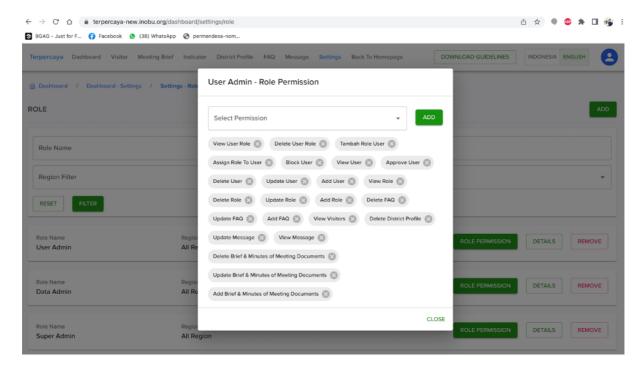


Super Admin dapat menambahkan role untuk setiap Admin, jika diperlukan. Super Admin dapat menambahkan role melalui langkah-langkah berikut:

1. Buka **DASHBOARD**, klik **Settings**, kemudian pilih **ROLE & PERMISSION**. Klik **Role Permission**.

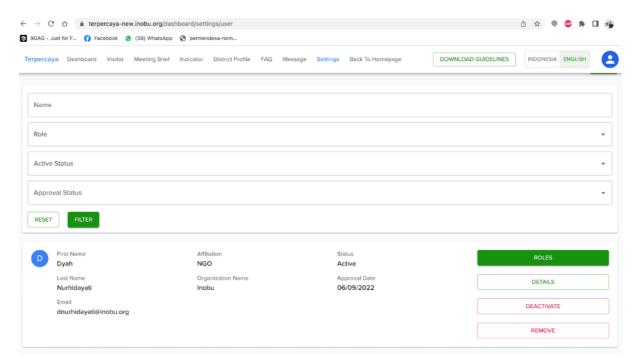


2. Klik **Select Permission**, kemudian klik **ADD** 



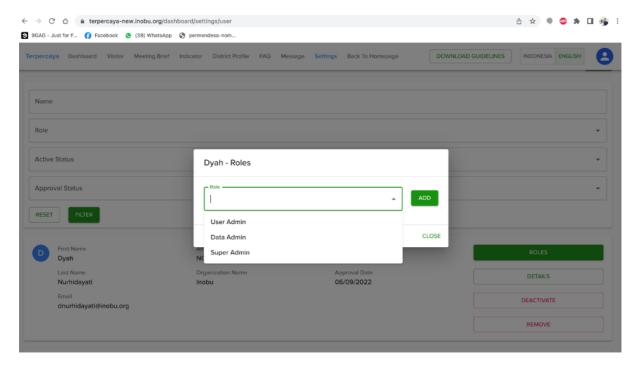
Untuk menjadikan pengguna sebagai Admin, Super Admin dapat memberikan hak akses dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Super Admin mengunjungi situs web (http://103.97.102.41/), klik **DASHBOARD**, kemudian **Settings**, kemudian **USER**. Halaman tersebut ditampilkan di bawah ini. Pilih pengguna yang akan dijadikan Admin. Klik **ROLES**.



2. Setelah memilih pengguna (mis: penanggung jawab dari K/L atau Pemerintah Kabupaten), klik *ROLES*. Pilih jenis Admin untuk pengguna tersebut. Klik *DEACTIVATE* jika Sekretariat ingin membekukan *role* pengguna sebagai Admin. Klik *REMOVE* jika Sekretariat ingin agar pengguna tersebut tidak lagi menjadi Admin.

3. Setelah klik *ROLES*, pilih jenis Admin, kemudian klik *ADD*.

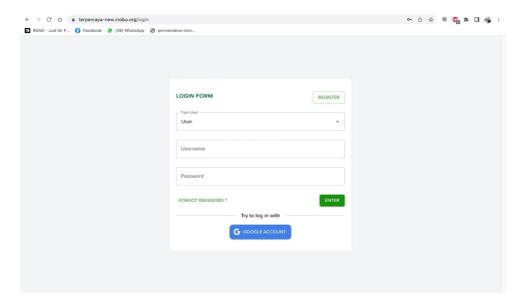


4. Pengguna resmi menjadi Admin.

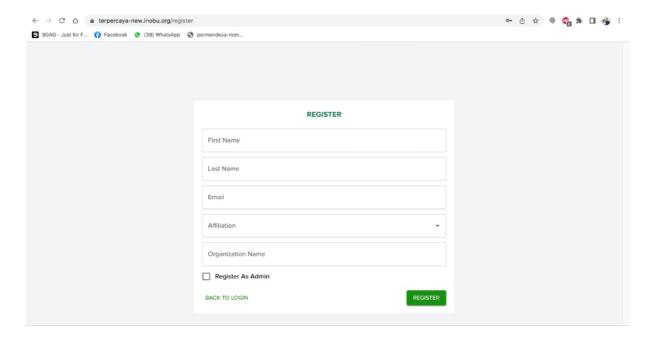
#### B. Pengguna

Pengguna adalah pengunjung yang ingin menggunakan platform Terpercaya. Siapapun dapat mendaftar untuk mengakses platform tanpa perlu mendapatkan persetujuan sebelumnya. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftar sebagai pengguna:

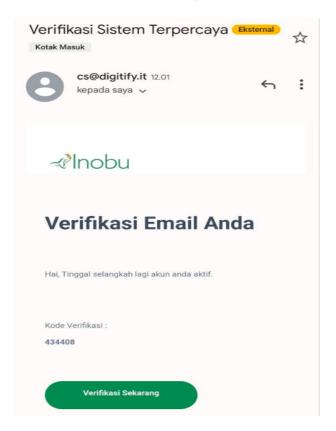
1. Buka (http://103.97.102.41/)



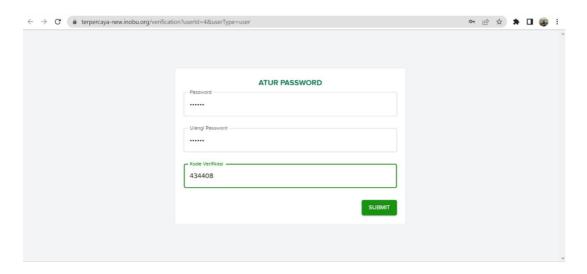
2. Klik REGISTER dan isi formulir di bawah ini. Setelah itu, klik REGISTER



3. Calon pengguna akan menerima kode verifikasi melalui email. Mereka kemudian harus melakukan verifikasi akun. Klik "Verifikasi Sekarang"



4. Setelah klik "Verifikasi Sekarang", isi pengaturan kata sandi di bawah ini dan klik **SUBMIT**:



5. Pengguna dapat mengakses platform dengan memasukkan kata sandi dan nama pengguna (email) mereka

### 7.2 Pedoman data entry

Data entry hanya dapat dilakukan oleh administrator yang telah diberi akses data input. Tergantung pada format data, tiga metode data entry yang dapat digunakan adalah: manual, bulk-insert dengan dokumen Excel, dan shapefile. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah untuk setiap metode data entry.

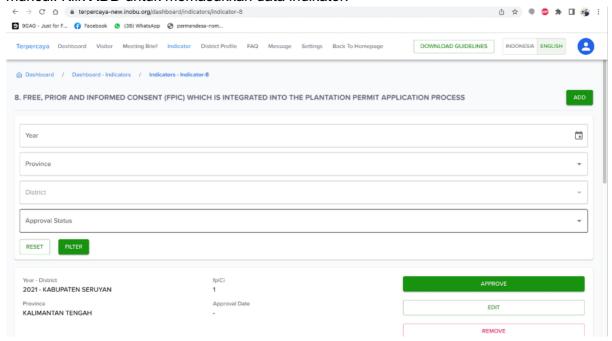
#### 7.2.1 Manual entry

Manual Entry dapat dilakukan oleh semua pemilik data dari kementerian dan pemerintah daerah; akan tetapi, data baru dapat diintegrasikan ke dalam database setelah mendapatkan persetujuan. Super Admin akan memberikan akses ke pengguna tertentu untuk memberikan persetujuan melalui langkah-langkah berikut:

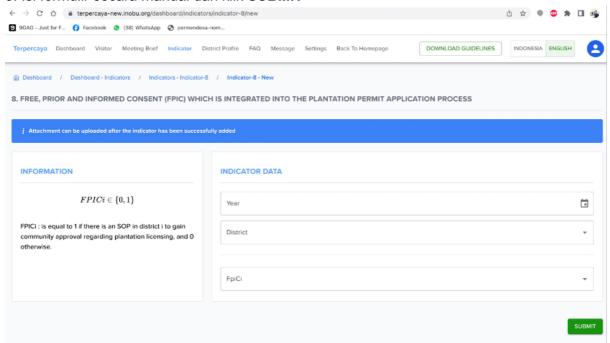
1. Klik **SELECT INDICATOR** kemudian pilih indikator yang akan dimasukkan datanya. Setelah itu, klik **OPEN INDICATOR**.



2. Setelah memilih indikator yang akan dianalisis, mis. Indikator 8, tampilan di bawah ini akan muncul. Klik *ADD* untuk memasukkan data indikator.



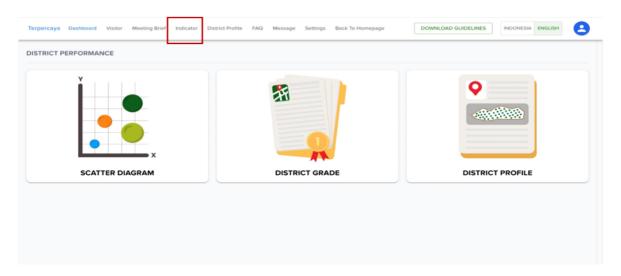
3. Isi formulir secara manual dan klik SUBMIT



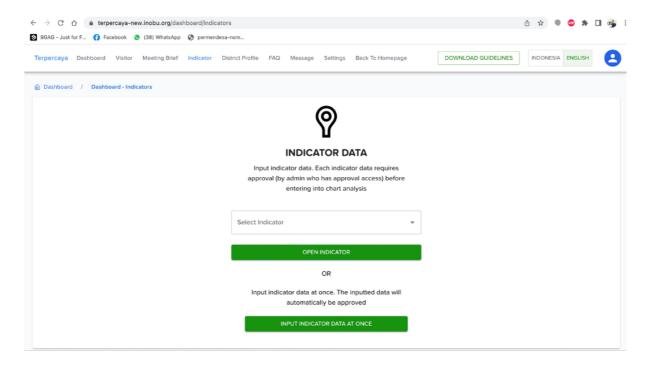
- 4. Isi informasi di layar ini, lalu klik SUBMIT
- 5. Setelah klik **SUBMIT**, maka akan kembali ke halaman sebelumnya dengan informasi **Successfully Added**. Data Admin yang memiliki akses untuk memberikan persetujuan dapat memberikan persetujuan data (7.3).

#### 7.2.2. Bulk Insert data entry dengan templat predefined Excel

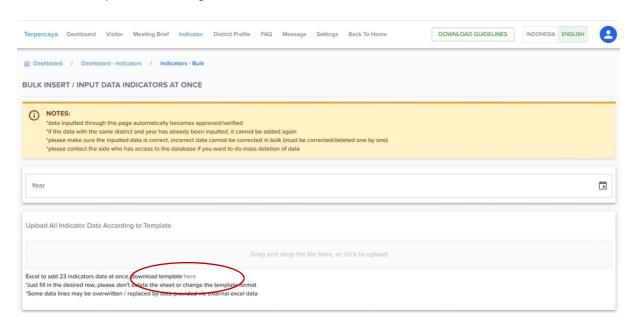
1. Kunjungi situs web (http://103.97.102.41/) dan login sebagai Admin, pilih *DASHBOARD* dan klik tab *Indicator* 



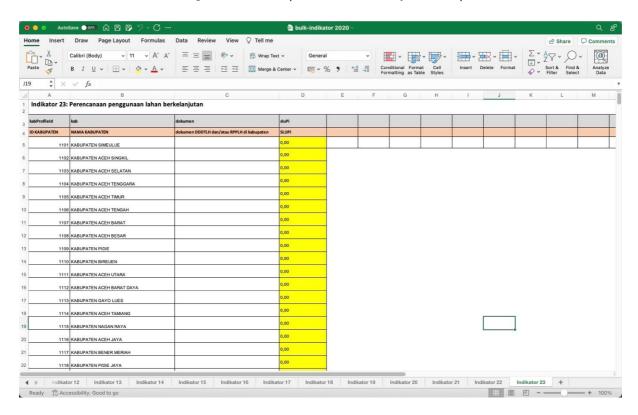
2. Klik INPUT INDICATOR DATA AT ONCE



3. Unduh templat Excel dengan klik di sini



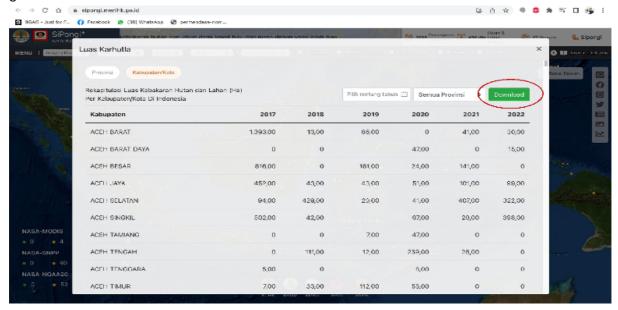
4. Setelah itu, isi Excel dengan data. Templat Excel ini hanya untuk periode satu tahun.



5. Unggah data .xls/ .xlsx di halaman no. 3 di atas, pastikan untuk mengisi tahun. Kemudian klik *Submit*. Skema ini tidak memerlukan persetujuan. Untuk mengunggah data, file Excel yang digunakan adalah file berisi semua indikator dengan templat format.

#### 7.2.3. Bulk Insert data entry dengan Excel diperoleh dari situs web K/L

1. Admin mengunduh data dari situs web K/L (semua data dalam format Excel). Contoh data yang diunduh dari Kementerian Lingkungan Hidup tentang kebakaran dapat dilihat pada gambar di bawah.

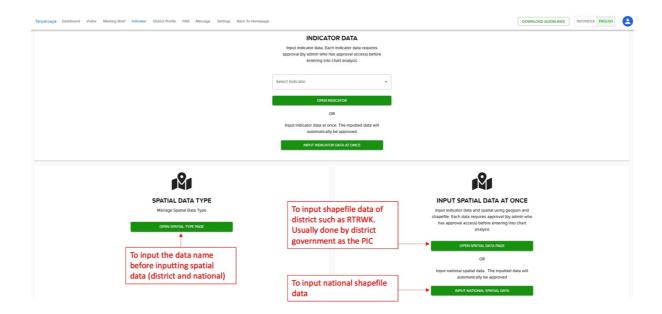


2. Ikuti langkah di 7.1.1. dan kemudian unggah Excel yang diunduh di bagian pencegahan kebakaran.

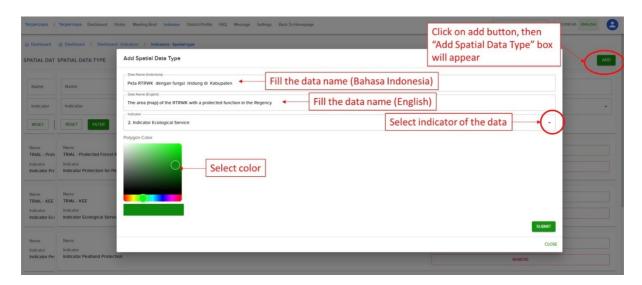
#### 7.2.4. Shapefile entry

Sebagian besar data dalam format shapefile adalah data peta. Data dapat dimasukkan melalui langkah-langkah berikut:

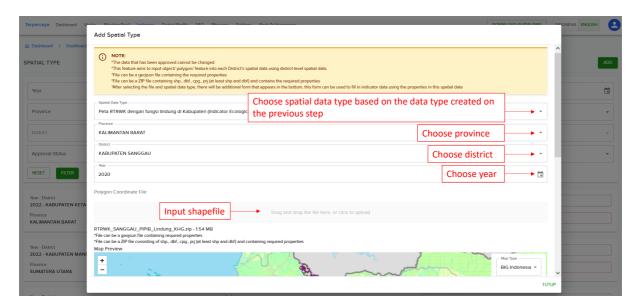
1. Ada dua jenis data shapefile, yaitu data kabupaten dan data nasional. Jika Admin ingin memasukkan data nasional, mereka dapat memilih *NATIONAL DATA INPUT*. Jika Admin ingin mengisi data per kabupaten, mereka dapat memilih *OPEN SPATIAL DATA PAGE* Admin untuk *data input* kabupaten adalah pemerintah kabupaten.



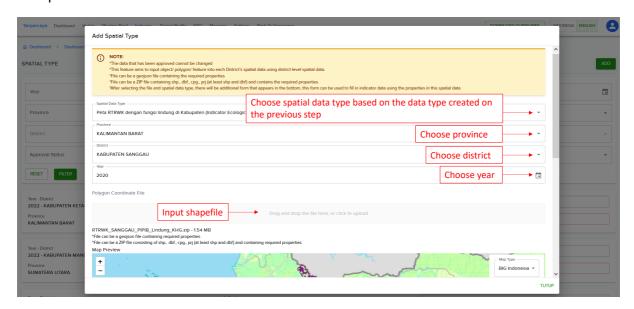
2. Sebelum mengunggah data spasial, Admin harus terlebih dahulu membuka *OPEN SPATIAL TYPE PAGE.* Nama sumber data dan indikator dapat dimasukkan di halaman ini. Klik *ADD* dan isi *Data Name* dan *Indicator*, serta *Colour* untuk shapefile. Nama data diisi dengan nama sumber data untuk masing-masing indikator. Informasi indikator dari data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kolom indikator. Kemudian klik *SUBMIT* dan kembali ke halaman *Indicator*.



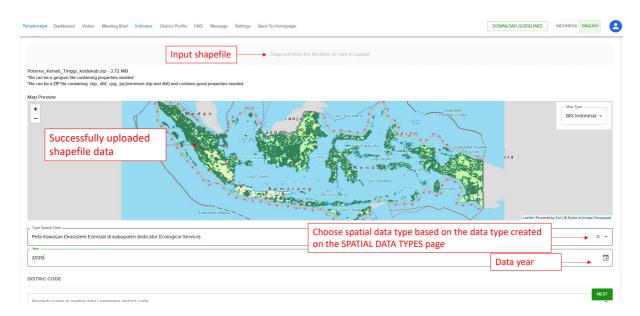
3. Untuk data per Kabupaten, pilih *OPEN SPATIAL DATA PAGE*, kemudian pilih *ADD*. Isi informasi *Spatial Data Type* berdasarkan nama data yang diinput pada langkah sebelumnya. Kemudian isi data provinsi, kabupaten dan tahun. Unggah data regional (yaitu RTRW Kabupaten) dalam format geoJSON atau zip (.shp .dbf .cpg .prj). Pastikan data sudah memiliki informasi daerah dari data yang dibutuhkan.



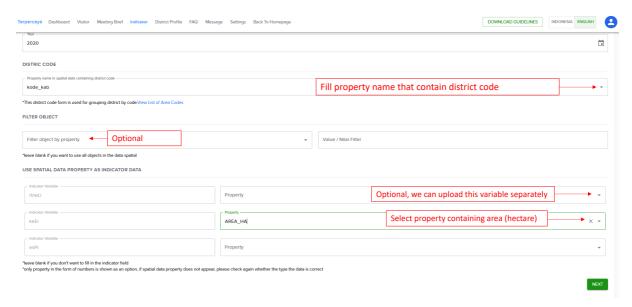
Setelah berhasil memasukkan shapefile, shapefile akan muncul di *Map Preview*. Untuk luas (peta) RTRWK dengan fungsi lindung di Kabupaten, ada satu sumber data yang perlu dimasukkan, yaitu **rtrwLi**. Di bagian *drop-down*, pilih data yang merujuk ke daerah untuk setiap sumber data.



4. Untuk memasukkan data nasional, pilih halaman *INPUT NATIONAL DATA*. Isi rumus dan unggah data nasional dalam format geoJSON atau zip (.shp .dbf .cpg .prj). Pastikan data sudah memiliki *district code* dan informasi daerah dari data yang dibutuhkan. Kemudian pilih *Type of Spatial Data* berdasarkan nama data yang dimasukkan pada langkah sebelumnya. Selain itu, isi juga informasi tahun data. Data spasial yang diunggah akan muncul di *MAP PREVIEW*.



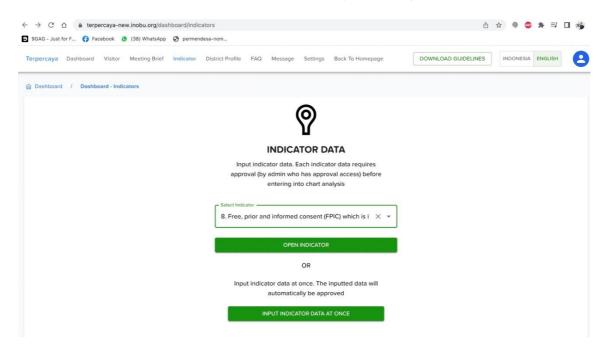
Setelah memasukkan data spasial, informasi *DISTRICT CODE* dan *SPATIAL DATA PROPERTIES* akan muncul. Pada bagian *DISTRICT CODE*, isi *property name* berdasarkan kode kabupaten. Dan pada *SPATIAL DATA PROPERTY*, isi *property name* dengan luas data yang ditargetkan. Informasi *value/filter* dapat dikosongkan. Setelah diunggah, klik *CONTINUE*.



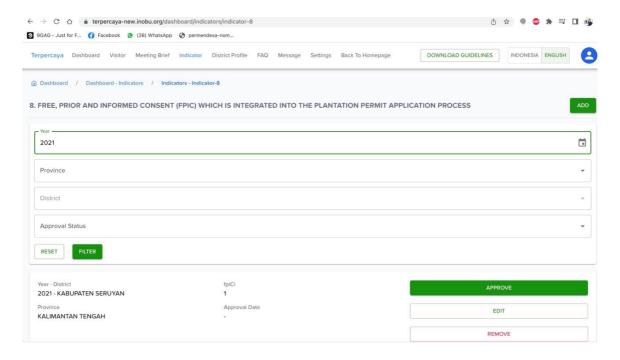
# 7.3 Persetujuan data

Data yang diunggah melalui shapefile dan skema manual perlu disetujui sebelum dapat diintegrasikan ke dalam database. Untuk memberikan persetujuan, Data Admin dapat melakukan langkah-langkah berikut:

1. Klik pada "Select Indicator" dan pilih indikator (mis. FPIC)



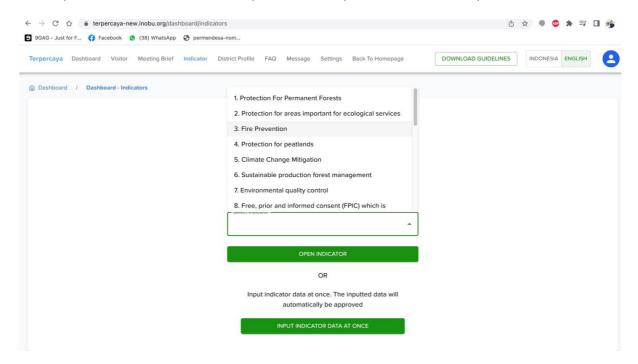
2. Isi tahun dan klik "*FILTER*". Pilih data yang perlu disetujui, klik tombol "*APPROVE*" di sisi kanan.



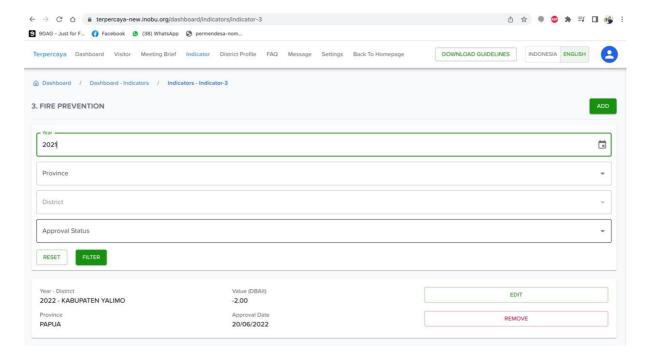
# 7.4 Pengecekan data

Untuk mengecek apakah data sudah berhasil dimasukkan, Data Admin dapat melakukan langkah-langkah berikut:

1. Klik pada "Select Indicator" dan pilih indikator (mis. Fire Prevention)



2. Isi tahun yang akan diperiksa dan klik "FILTER"



3. Periksa apakah data yang diunggah tersedia atau tidak

# 7.5 Pemeliharaan platform

Pemeliharaan platform dilakukan oleh Sekretariat Terpercaya BAPPENAS, khususnya Tim Programmer. Untuk melakukan pemeliharaan platform, langkah-langkah berikut perlu dilakukan:

#### 7.5.1 Perbaikan sistem

Perbaikan sistem berkaitan dengan kegiatan untuk memperbaiki eror atau bug yang terjadi pada sistem. Langkah-langkah yang perlu dilakukan:

- 1. Pengawasan harian dilakukan oleh Admin dan programmer.
- 2. Jika terjadi eror, Admin wajib melapor kepada Tim Programmer paling lambat satu jam setelah eror terjadi.
- 3. Admin mengumpulkan masukan dari pengguna platform dan kemudian menindaklanjuti dengan memberitahu programmer.
- 4. Tim Programmer mengumpulkan data bug setiap hari dan melakukan perbaikan sesegera mungkin.
- 5. Pengguna dapat memberikan masukan mengenai peningkatan sistem melalui fitur "*CONTACT US*" di beranda platform (skema kontak dapat dilihat di lampiran).
- 6. Fitur "*CONTACT US*" akan memberitahu Sekretariat Terpercaya melalui email di: <a href="mailto:pertanian@bappenas.go.id">pertanian@bappenas.go.id</a>.
- 7. Admin akan menjawab pertanyaan pengguna melalui email. Setelah menjawab, Admin akan *update* pertanyaan pengguna di fitur "*Message*" pada dashboard dengan mencentang "*already followed up*".

#### 7.5.2 Kemanan sistem

Untuk menjamin keamanan data dan sistem, langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan adalah:

- 1. Pemantauan pengguna adalah langkah utama untuk memastikan bahwa data dimasukkan oleh pihak yang diberi akses.
- 2. Akses untuk melakukan *data input* diberikan kepada setiap Data Admin selama kurang lebih tiga bulan.
- 3. Tim Programmer melakukan back up data setiap bulan di database terpisah.

#### 7.5.3. Pengembangan fitur sistem

*Update* fitur dilakukan setahun sekali, yaitu pada awal bulan Juli setiap tahunnya. Pengujian perlu dilakukan untuk fitur baru selama maksimal tiga hari. Pengguna harus diberi tahu saat platform sedang dalam perbaikan.

# Chapter 8: Proses pemutakhiran dan perbaikan platform Terpercaya, termasuk pembelajaran dan kesenjangan data

# 8.1. Proses perbaikan platform

Perbaikan signifikan telah dilakukan di platform Terpercaya selama proyek ini. Beberapa fitur yang dikembangkan dalam sistem adalah:

- 1. K/L dan pemerintah daerah, sebagai pemilik data, dapat memasukkan data secara langsung ke dalam sistem.
- 2. Platform dapat menerima data dari berbagai sumber dengan dua metode: data entry manual dan bulk-insert data entry. Platform juga dapat menerima data spasial untuk indikator tertentu dengan membandingkan peta untuk menghitung nilai.
- 3. Platform ini memiliki database multi-tahun untuk visualisasi data time series.
- 4. Sistem dapat menganalisis sendiri data mentah yang diserahkan secara otomatis oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Platform telah distransfer ke server BAPPENAS. Proses transfer telah diselesaikan pada tanggal 23 September 2022. BAPPENAS kemudian akan melakukan pengujian dan analisis sebelum melanjutkan dengan instalasi domain untuk platform Terpercaya.

Platform juga telah di-update untuk memasukkan versi terbaru dari indikator Terpercaya seperti yang dibahas dalam Bab 1 laporan ini. Kebutuhan dan format data dikompilasi dan dimasukkan ke dalam desain platform sesuai dengan hasil FGD. Proses penyempurnaan dilanjutkan dengan diskusi mengenai ekspektasi pemangku kepentingan terhadap sistem.

Hasil diskusi mengindikasikan bahwa proses data entry utama dapat dilakukan oleh BAPPENAS melalui Sekretariat Terpercaya. Jika kementerian atau pemerintah daerah ingin memasukkan data secara langsung ke dalam sistem, Sekretariat Terpercaya dapat memberi mereka akses. Untuk skema data nasional, BAPPENAS dapat memasukkan data setelah mendapatkan data dari K/L. Akan tetapi, jika Kementerian/Lembaga ingin memasukkan input sendiri, maka BAPPENAS dapat memberi K/L akses ke dashboard untuk melakukan data entry. Data juga bisa disampaikan secara langsung oleh pemerintah kabupaten. Dengan demikian, sistem data entry difasilitasi.

Selama proses pengembangan platform data, beberapa sesi konsultasi dilakukan dengan melibatkan EFI, BAPPENAS dan kementerian lainnya. Konsultasi dengan menteri dilakukan secara bersamaan dengan FGD untuk menyempurnakan indikator dan protokol data. Tabel 12 menunjukkan input dari kementerian selama FGD. Uji coba juga dilakukan secara internal untuk mengantisipasi dan memperbaiki eror seperti bug. Evaluasi pengembangan platform dilakukan secara berkala dengan melibatkan beberapa pihak, mis. BAPPENAS dan EFI. Umpan balik yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kinerja platform. Peningkatan yang dilakukan dijelaskan dalam ringkasan tentang platform (Bab 5), khususnya dalam alur data entry dan akses operasional Admin.

Tabel 12. Input untuk Pengembangan Sistem dari K/L

Nº	Tanggal	Kementerian/Lembaga	Komentar	
			Fitur	User interface
1	4/3/2022	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Perlu membuat level pengguna untuk akses data	
			Menu untuk mengunduh analisis hasil	
2	9/3/2022	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Bagian <i>District Profile</i> perlu ditambah dengan menu untuk memilih kabupaten yang perlu diprioritaskan jika pemerintah akan melakukan intervensi khusus. Ini akan memudahkan pemerintah jika dalam melakukan intervensi dengan biaya yang terbatas.	
		Badan Pusat Statistik	Menggunakan basemap BIG	
		(BPS)	Menu untuk mengunduh perlu ditambahkan pada peta tematik atau tabel hasil analisis	
			Menu "pencarian" dapat ditambahkan agar pengguna dapat dengan mudah mencari topik tertentu	
			Di menu diagram tebar, Anda juga dapat memasukkan tahun untuk indikator yang dianalisis dan tidak perlu kembali melihat metadata indikator yang ada.	
			Penambahan indikator kemiskinan mengenai jumlah (absolut) penduduk miskin agar dapat melakukan analisis yang lengkap, baik relatif (persen) maupun absolut (jumlah)	
			Menu FAQ untuk memberikan informasi tentang platform kepada pengguna	

N°	Tanggal	Kementerian/Lembaga	Komentar	
			Fitur	User interface
			Tambahkan narahubung jika ada pertanyaan lebih lanjut, mis. dari BAPPENAS	
			Opsi pemilihan komoditas dibutuhkan	
3	16/3/2022	Kementerian Pertanian (Kementan)	Penilaian kumulatif untuk semua indikator di satu kabupaten diperlukan	
4	18/3/2022	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Tidak ada komentar	
5	25/3/2022	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Tidak ada komentar	Perlu warna merah di halaman depan
		(ATR/BPN)		District Ranking pada peta tidak dapat dilihat, hanya warna A,B,C. Perlu gradasi. Ranking hanya dapat dilihat di histogram.
6	5/4/2022	Badan Pangan Nasional (BPN)	Pada halaman <i>District Profile</i> , sisi kanan (area hijau) hanya menampilkan indikator 1. Saat indikator lainnya di-klik tetapi tidak ada perubahan.	Tidak ada deskripsi warna dalam diagram net.
			Panduan atau deskripsi untuk diagram tebar dibutuhkan	Terpercaya belum mengikuti standar warna SDG

# 8.2. Pembelajaran dan rekomendasi

#### 8.2.1. Ketersediaan data

Sebagian besar database Inisiatif Terpercaya bersumber dari pemerintah. Data yang berasal dari pihak non-pemerintah tidak akan digunakan pada tahap ini. Salah satu tantangan dalam pengumpulan adalah belum tersedianya database nasional di tingkat nasional. Dalam kondisi seperti ini, BAPPENAS harus memastikan bahwa izin untuk berbagi data dengan semua pemerintah kabupaten sudah diperoleh. Bab 3 memberikan pedoman untuk pengumpulan data di tingkat daerah.

Di masa mendatang, ketersediaan data perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam mencari solusi untuk indikator-indikator yang belum memiliki dataset nasional. Kami telah memberikan saran tentang mekanisme pengumpulan data, baik melalui SDI atau kementerian.

BAPPENAS mendapatkan dukungan dalam menyampaikan data prioritas ke Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI). Oleh karena itu, data yang dibutuhkan Terpercaya dapat tersedia di platform SDI. Forum SDI telah mengumumkan daftar data Terpercaya yang disetujui untuk disediakan di platform SDI pada tahun 2023. Sebanyak 23 dari 36 sumber data yang diusulkan untuk 23 indikator telah disetujui. Sekretariat Terpercaya akan dapat mengumpulkan data melalui platform SDI mulai bulan Januari 2023. Saat ini, BAPPENAS perlu mengajukan izin berbagi data dengan masing-masing wali data di K/L jika ingin mengumpulkan data. Ini juga berlaku untuk data yang belum disetujui oleh SDI, data dapat secara langsung disampaikan ke produsen dan wali data di Kementerian/Lembaga. 8.2.2. The Terpercaya Secretariat

#### 8.2.2. Sekretariat Terpercaya

Sekretariat khusus diperlukan untuk mengelola platform. Terpercaya akan sepenuhnya dikelola oleh Direktorat Pangan dan Pertanian BAPPENAS. BAPPENAS perlu membentuk Tim Sekretariat, yang setidaknya beranggotakan *programmer* dan tiga Admin: User Admin, Data Admin dan Super Admin.

Pengembangan platform akan terus dilakukan dengan melakukan penyesuaian dengan kebijakan pemerintah yang berlaku. Misalnya, saat Satu Data Indonesia (SDI) sudah berjalan efektif dan usulan data prioritas Terpercaya disetujui oleh Forum SDI, BAPPENAS tidak perlu meminta izin untuk menggunakan data dari pemerintah daerah dan K/L, karena akan hanya dapat mengunduh file data dari platform SDI. Dalam kasus ini, tim Data Admin harus mengunduh data dari SDI dan memasukkannya ke platform. Tim IT perlu dibentuk untuk melakukan pemeliharaan platform, termasuk perbaikan saat ada masalah, peningkatan fitur dan pemeliharaan keamanan sistem. Beberapa data indikator Terpercaya tersedia dalam format shapefile. BAPPENAS harus mempekerjakan ahli GIS untuk menganalisis shapefile sebelum dimasukkan ke dalam platform. Pendirian lembaga Terpercaya harus memiliki dasar hukum yang kuat.

#### 8.2.3. Pengembangan platform data

Proses pengembangan platform data, yang meliputi *data input* dan pemutakhiran database, harus terus dilakukan secara berkala. Pengujian pengguna perlu dilakukan secara berkala untuk mengembangkan platform *data entry*, khususnya untuk pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk meningkatkan proses pengumpulan data dan *data input*. Setelah itu, BAPPENAS perlu melatih pemerintah daerah tentang pengoperasian Platform Terpercaya.

# 8.3 Data gaps

BAPPENAS mengirimkan surat berbagi data ke kementerian terkait pada tanggal 9 Agustus 2022 dan proses pengumpulan data harus dilanjutkan.

Data untuk empat indikator dapat dengan mudah diperoleh melalui domain publik, yaitu:

- Indikator 3 Pencegahan kebakaran
- Indikator 13 Ketahanan pangan
- Indikator 18 Tingkat kemiskinan
- Indikator 19. Proporsi anggaran kabupaten yang dialokasikan untuk keberlanjutan

Data di atas sudah tersedia di situs web masing-masing kementerian/lembaga dan akhiran data dilakukan setiap tahun. Admin Terpercaya hanya perlu mengunduh file Excel dan mengunggahnya ke platform sesuai dengan tahun data.

Data untuk lima indikator tidak tersedia di tingkat nasional. Data tersebut harus dikumpulkan di tingkat kabupaten. BAPPENAS dapat mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan data tersebut secara langsung. Berikut adalah data indikator yang hanya tersedia di pemerintah daerah:

- Indikator 1 Perlindungan untuk hutan tetap
- Indikator 2 Perlindungan untuk area yang penting untuk layanan ekologi
- Indikator 4 Perlindungan untuk lahan gambut
- Indikator 8 Persetujuan atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan (PADITAPA) yang terintegrasi dalam proses pengajuan izin perkebunan (akan tersedia di SDI)
- Indikator 10 Resolusi konflik lahan dan pertanian (akan tersedia di SDI)

Data dalam format shapefile menimbulkan tantangan khusus. Mis. data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang perlu diunggah dalam format shapefile. Data Shapefile cukup sensitif bagi pemerintah karena berpotensi untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, proses pengumpulan data di tingkat daerah akan sulit dilakukan tanpa adanya kebijakan nasional yang mewajibkan pemerintah kabupaten untuk memasukkan data Terpercaya. Tabel 13 di bawah merangkum kesenjangan dalam pengumpulan data untuk semua indikator.

Tabel 13. Kesenjangan data

N°	Indikator	Jenis Data	Produsen Data	Kementerian/Lemb aga	Format Data	Kesenja ngan Data (Ya/Tidak)	Catatan
1	Perlindun gan untuk Hutan Tetap	Peta hutan lindung di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten	Bappeda Kabupaten	Pemerintah Daerah	zip (cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)	Ya	Dikumpulkan dari 12 Kabupaten percontohan, akan tersedia di SDI pada tahun 2023
		Peta hutan konservasi di RTRW kabupaten	Bappeda Kabupaten	Pemerintah Daerah	zip (cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)	Ya	Dikumpulkan dari 12 Kabupaten percontohan, akan tersedia di SDI pada tahun 2023
		Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) di kabupaten	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	zip (cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)	Ya	Data tersedia di KLHK, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L
		Peta hutan lindung di kabupaten dalam Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (SK PKH)	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	zip (cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)	Ya	Data tersedia di KLHK, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L
		Peta hutan konservasi di kabupaten dalam SK PKH	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	zip (cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)	Ya	Data tersedia di KLHK, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L

N°	Indikator	Jenis Data	Produsen Data	Kementerian/Lemb aga	Format Data	Kesenja ngan Data (Ya/Tidak)	Catatan
2	Perlindun gan untuk area yang penting untuk	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dengan fungsi Iindung di kabupaten	Bappeda Kabupaten	Pemerintah Daerah	zip (cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)	Ya	Dikumpulkan dari 12 Kabupaten percontohan, akan tersedia di SDI pada tahun 2023
	layanan ekologi	Peta Kawasan Ekosistem Esensial di kabupaten	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	zip (cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)	Ya	Data tersedia di KLHK, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L
3	Pencegah an Kebakara n	Luas kebakaran di kabupaten	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (https://sipongi.menl hk.go.id/)	csv, xls, or dbf	Tidak	
4	Perlindun gan untuk lahan gambut	Peta lahan yang termasuk dalam hidrologi gambut yang berada di dalam area/daerah/kawasan fungsi lindung yang teridentifikasi dalam RTRW Kabupaten	Bappeda Kabupaten	Pemerintah Daerah	zip (cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)	Ya	Dikumpulkan dari 12 Kabupaten percontohan, akan tersedia di SDI pada tahun 2023
		Peta lahan gambut dengan fungsi lindung	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	zip (cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)	Ya	Data tersedia di KLHK, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L

N°	Indikator	Jenis Data	Produsen Data	Kementerian/Lemb aga	Format Data	Kesenja ngan Data (Ya/Tidak)	Catatan
5	Mitigasi perubaha n iklim	Daftar Kabupaten yang sudah melaporkan inventaris emisi GRK	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, or dbf	Ya	Data tersedia di KLHK, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L
		Daftar Kabupaten yang telah menetapkan pedoman penghitungan FREL di tingkat kabupaten	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, or dbf	Ya	Data tersedia di KLHK, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L
		Daftar Kabupaten yang sudah memiliki Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, or dbf	Ya	Data tersedia di KLHK, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L
6	produksi lestari	Total konsesi hutan produksi yang telah□ memperoleh sertifikasi keberlanjutan (PHPL dan□ FSC) di kabupaten	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, or dbf	Ya	Data tersedia di KLHK, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L
		Total hutan produksi di kabupaten	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, or dbf	Ya	Data tersedia di KLHK, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L

N°	Indikator	Jenis Data	Produsen Data	Kementerian/Lemb aga	Format Data	Kesenja ngan Data (Ya/Tidak)	Catatan
7	Pengenda lian kualitas lingkunga n hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di kabupaten	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, or dbf	Tidak	
8	PADITAP A	SOP/regulasi di kabupaten tentang persetujuan masyarakat terkait perizinan perkebunan.	Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Daerah	csv, xls, or dbf	Ya	Akan tersedia di SDI pada tahun 2023
9	Pengakua n Masyarak at Hukum	Peta wilayah kelola Masyarakat Hukum MHA yang sudah diakui berdasarkan KLHK/Kemendagri di kabupaten	Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	zip (cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)	Ya	Data tersedia di KLHK, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L
	Adat (MHA)	Peta indikatif hutan adat kabupaten	Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	zip (cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)	Ya	Data tersedia di KLHK, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L
10	Resolusi konflik lahan dan pertanian	Apakah ada SOP/regulasi di kabupaten tentang penanganan konflik lahan dan pertanian di kabupaten	Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten	Pemerintah kabupaten	csv, xls, or dbf	Ya	Akan tersedia di SDI pada tahun 2023

N°	Indikator	Jenis Data	Produsen Data	Kementerian/Lemb aga	Format Data	Kesenja ngan Data (Ya/Tidak)	Catatan
11	Persentas e untuk petani	Luas perkebunan yang dikelola petani kecil di kabupaten	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, or dbf	Tidak	
	swadaya	Luas perkebunan kelapa sawit di kabupaten*	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, or dbf	Tidak	
12	Pendaftar an untuk petani swadaya	Jumlah petani swadaya yang memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) di kabupaten	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kementerian Pertanian	csv, xls, or dbf	Tidak	
		Jumlah petani swadaya di kabupaten	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, or dbf	Tidak	
13	Ketahana n pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional (http://app2.badanpa ngan.go.id/)	csv, xls, or dbf	Tidak	
14	Produktivit as petani swadaya	Total produksi petani sawit di kabupaten	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, or dbf	Tidak	
		Luas perkebunan yang dikelola petani kecil di kabupaten	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, or dbf	Tidak	

N°	Indikator Jenis Data		aga		Format Data	Kesenja ngan Data (Ya/Tidak)	Catatan
15	Jumlah asosiasi/k elompok petani swadaya	Jumlah kelompok tani di kabupaten	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, or dbf	Ya	Data tersedia di Kementan**, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L
		Jumlah petani swadaya di kabupaten	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, or dbf	Tidak	
16	Bantuan untuk petani kecil	Jumlah penyuluh di kabupaten	Pusat Penyuluhan Pertanian	Kementerian Pertanian	csv, xls, or dbf	Tidak	
		Jumlah petani swadaya di kabupaten	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, or dbf	Tidak	
17	Perkebun an bersertifik at berkelanju tan	Luas perkebunan kelapa sawit bersertifikasi RSPO dan/atau ISPO di kabupaten	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kementerian Pertanian	csv, xls, or dbf	Tidak	
		Luas perkebunan kelapa sawit di kabupaten*	Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, or dbf	Tidak	

N°	Indikator	Jenis Data	Produsen Data	Kementerian/Lemb aga	Format Data	Kesenja ngan Data (Ya/Tidak)	Catatan
18	Tingkat kemiskina n	Persentase kemiskinan tingkat kabupaten	Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS)	Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.i d/indicator/23/624/1/ garis-kemiskinan- menurut-kabupaten- kota.html)	csv, xls, or dbf	Tidak	
19	Proporsi anggaran kabupaten yang dialokasik	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keberlanjutan/lingkungan hidup	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Kementerian Keuangan (https://djpk.kemenk eu.go.id/?p=5412)	csv, xls, or dbf	Tidak	
	an untuk keberlanju tan	Anggaran tingkat kabupaten	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Kementerian Keuangan (https://djpk.kemenk eu.go.id/?p=5412)	csv, xls, or dbf	Tidak	
20	Akses informasi publik	Terdapat Peraturan Daerah/Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pengangkatan Pejabat PPID di kabupaten	Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	csv, xls, or dbf	Ya	Data tersedia di Kemendagri, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L

N°	Indikator	Jenis Data	Produsen Data	Kementerian/Lemb aga	Format Data	Kesenja ngan Data (Ya/Tidak)	Catatan
21	Partisipasi multi- pemangku kepenting an dalam perencan aan kabupaten	Apakah ada SOP tentang partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di kabupaten	Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	csv, xls, or dbf	Ya	Data tersedia di Kemendagri, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L
22	Mekanism e pengadua n	Daftar kabupaten mengoperasikan SP4N Lapor	Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	csv, xls, or dbf	Ya	Data tersedia di Kemendagri, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L
23	Perencan aan pengguna an lahan berkelanju tan	Daftar kabupaten yang memiliki dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) kabupaten	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, or dbf	Ya	Data tersedia di KLHK, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L
		Daftar kabupaten yang memiliki Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, or dbf	Ya	Data tersedia di KLHK, pembagian data dilakukan oleh BAPPENAS ke K/L

# **Daftar Lampiran**

# **Lampiran A - Daftar data yang dibutuhkan**

Tabel 14. Daftar data yang dibutuhkan

N°	Produsen	Wali data	Dataset yang diperlukan	Satuan	Indikator	Skema berbagi data	Jenis/ format
I. K	ementerian Pertanian						
			a. Luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani kecil di kabupaten	Hektare	Persentase untuk petani swadaya	SDI	csv, xls, or dbf
			b. Total luas perkebunan kelapa sawit di kabupaten	Hektare		K/L	csv, xls, or dbf
			c. Jumlah petani sawit di kabupaten	Hektare	Pendaftaran petani swadaya	SDI	csv, xls, or dbf
	Direktorat Tanaman	Pusat Data	d. Total produksi petani sawit di kabupaten	Ton	Produktivitas petani swadaya	SDI	csv, xls, or dbf
1.	Tahunan dan Penyegar	dan Informasi	e. Luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani kecil di kabupaten	Hektare	-	SDI	csv, xls, or dbf
			f. Jumlah kelompok tani sawit di kabupaten	Orang	Jumlah asosiasi/kelompok petani swadaya	SDI	csv, xls, or dbf
			g. Jumlah petani sawit di kabupaten	Orang		SDI	csv, xls, or dbf
			h. Jumlah petani swadaya di kabupaten	Orang	Bantuan untuk Petani Swadaya	SDI	csv, xls, or dbf

N°	Produsen	Wali data	Dataset yang diperlukan	Satuan	Indikator	Skema berbagi data	Jenis/ format
			i. Luas perkebunan kelapa sawit di kabupaten	Hektare	Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan (khususnya Minyak Kelapa Sawit)	K/L	csv, xls, or dbf
	Direktur Jenderal		a. Jumlah petani swadaya yang memiliki STDB di kabupaten	Orang	Pendaftaran petani swadaya	SDI	csv, xls, or dbf
2.	Perkebunan		b. Luas perkebunan kelapa sawit bersertifikasi RSPO dan/atau ISPO di kabupaten	Hektare	Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan (khususnya Minyak Kelapa Sawit)	SDI	csv, xls, or dbf
3.	Pusat Penyuluhan Pertanjan	Pusat Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh di kabupaten	Orang	Bantuan untuk Petani Swadaya	SDI	csv, xls, or dbf
II. B	adan Pangan Nasional						
4.	Badan Pangan Nasional	Kepala Badan Pangan Nasional	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	Ketahanan pangan	SDI	csv, xls, or dbf
III. Þ	Kementerian Lingkungai	n Hidup dan K	ehutanan				
5.	dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	dan Pemantauan	a. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) di kabupaten	Hektare	Perlindungan untuk Hutan Tetap	K/L	Shapefile/zip (.cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)
	Direktorat Rencana, Penggunaan dan	Sumber Daya Hutan	b. Peta hutan lindung di kabupaten dalam Surat Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan	Hektare		K/L	Shapefile/zip (.cpg, .dbf,

N°	Produsen	Wali data	Dataset yang diperlukan	Satuan	Indikator	Skema berbagi data	Jenis/ format
	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan						.prj, .shp, .shx)
	Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		c. Peta hutan konservasi di kabupaten dalam Surat Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan	Hektare		K/L	Shapefile/zip (.cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)
	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem		d. Peta Kawasan Ekosistem Esensial di kabupaten	Hektare	Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi	K/L	Shapefile/zip (.cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)
	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut		e. Peta lahan gambut dengan fungsi lindung	Hektare	Perlindungan untuk lahan gambut	K/L	Shapefile/zip (.cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)
	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan		f. Total konsesi hutan produksi yang telah□ memperoleh sertifikasi keberlanjutan (PHPL dan□ FSC) di kabupaten	Hektare	Pengelolaan Hutan Produksi	K/L	csv, xls, or dbf
	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan		g. Total hutan produksi di kabupaten	Hektare	Lestari	K/L	csv, xls, or dbf
6.	Direktorat Pencedanan I	Pusat Data dan Informasi	a. Daftar Kabupaten yang memiliki DDDTLH	konfirmasi ya/tidak	Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan	SDI	csv, xls, or dbf

N°	Produsen	Wali data	Dataset yang diperlukan	Satuan	Indikator	Skema berbagi data	Jenis/ format
	Kebijakan Wilayah dan Sektor		b. Daftar Kabupaten yang memiliki RPPLH	konfirmasi ya/tidak		SDI	csv, xls, or dbf
7.	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pusat Data dan Informasi	Luas kebakaran hutan dan lahan di kabupaten	Hektare	Pencegahan Kebakaran	SDI	csv, xls, or dbf
			a. Daftar Kabupaten yang sudah melaporkan inventaris GRK ke KLHK	konfirmasi ya/tidak		K/L	csv, xls, or dbf
8.		kumah Kaca dan Pusat Data b. Daftar kabupaten yang sudah memiliki pedoman konfirmasi perhitungan baseline (FREL) wa/tidak Mitigasi Perubaha	Mitigasi Perubahan Iklim	K/L	csv, xls, or dbf		
			Aksi Mitigasi Perubahan Iklim menurut Provinsi beserta			K/L	csv, xls, or dbf
9.	Direktorat Penanganan	Direktorat Inventarisasi dan	a. Peta wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sudah diakui berdasarkan KLHK/Kemendagri di kabupaten	Hektare	Pengakuan Masyarakat Hukum	K/L	Shapefile/zip (.cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)
	Hutan Adat	an Adat Sumber Daya	b. Peta indikatif hutan adat kabupaten	Hektare	Adat (MHA)	K/L	Shapefile/zip (.cpg, .dbf, .prj, .shp, .shx)
10.	0	Pusat Data dan Informasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di kabupaten	Indeks	Pengendalian kualitas lingkungan hidup	SDI	csv, xls, or dbf

N°	Produsen	Wali data	Dataset yang diperlukan	Satuan	Indikator	Skema berbagi data	Jenis/ format
IV. K	Kementerian Keuangan						
11.	Direktur Evaluasi dan	Direktur Evaluasi dan Sistem	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keberlanjutan/lingkungan hidup	Rupiah	Proporsi Anggaran Kabupaten yang Dialokasikan untuk	SDI	csv, xls, or dbf
			b. APBD tingkat kabupaten	Rupiah	Keberlanjutan	SDI	csv, xls, or dbf
V. K	ementerian Dalam Nege	eri					
12.	Pugat Panarangan		a. Daftar kabupaten yang sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda)/Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat PPID di kabupaten	konfirmasi ya/tidak	Akses informasi publik	SDI	csv, xls, or dbf
			b. Daftar kabupaten mengoperasikan SP4N Lapor	konfirmasi ya/tidak	Mekanisme Pengaduan	SDI	csv, xls, or dbf
13.	Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah		Daftar kabupaten/kota yang memiliki SOP/Peraturan Daerah (Perda) terkait partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di kabupaten	konfirmasi ya/tidak	Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten	SDI	csv, xls, or dbf
VI. E	Badan Pusat Statistik (B	PS)					
14.	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Persentase kemiskinan di tingkat kabupaten	Persentase	Tingkat kemiskinan	SDI	csv, xls, or dbf

# Lampiran B - Risalah FGD

#### **Kop Surat BAPPENAS**

#### RISALAH FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

#### PROTOKOL DATA DAN PENGEMBANGAN PLATFORM TERPERCAYA

#### Draf

Pada hari ini, ....... Tanggal ....... bulan ....... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (...-...-2022), pukul....... Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), melalui *virtual meeting room* Direktorat Pangan dan Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS RI) telah menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Protokol Data dan Pengembangan Platform Terpercaya. FGD ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat terkait.

Kesepakatan dalam FGD tersebut adalah bahwa Kementerian/Lembaga akan memberikan dukungan/berpartisipasi dalam proses berbagi data dengan BAPPENAS RI untuk Platform Terpercaya.

Rincian hasil pembahasan disampaikan pada lampiran Risalah Rapat.

#### Peserta

Tidak	Nama	Jabatan	Organisasi	Tanda tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				

# Lampiran C - Draf surat berbagi data

Kop Surat BAPPENAS					
Nomor : Jakarta, Juni 2022					
Lampiran : 2 (dua) berkas					
Subjek : Surat Berbagi Data					
Kepada					
(Direktorat)					
Sehubungan dengan Kerangka Regulasi Satu Data dan RPJMN tentang Yurisdiksi Berkelanjutan, kami bermaksud untuk mengajukan permintaan berbagi data dan informasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk detail data yang dijabarkan pada lampiran. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi Wulan Metafurry (081542049595). Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Anda.					
Direktorat Pangan dan Pertanian,					
Anang Noegroho					
Salinan: Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam					

Lampiran 1: Daftar Produsen Data Lampiran 2: Daftar data yang dibutuhkan

# Lampiran D - Format berita acara serah terima data

	Kop Surat BAPPENAS	
	BERITA ACARA SERAH TERIMA DATA	
	Nomor :	
Pada hari tanggal .	/ 20 telah diterima:	
Data		
Nama Data		
Format/Jenis Data		
Detail/ Tambahan		
Deskripsi :	·	
Diterima dari		
Nama :	·	
Jabatan :	·····	
Kementerian/Lembaga: _		
Diterima oleh		
Nama :	·	
Jabatan :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Dengan demikian data in semua protokol kerahasi	ii diserahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya dengan r aan data.	nematuhi
,	_20	
Pihak yang menyerahkar	Pihak yang menerima	

# Lampiran E - Perjanjian penyediaan data prioritas SDI

Jakarta, 21 Juni 2022 Nomor :

#### BERITA ACARA KESEPAKATAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT "PENYEPAKATAN DATA PRIORITAS TAHUN 2022"

Bahwa pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Juni, tahun <u>dua ribu dua</u> <u>puluh dua</u>, di Hotel Sahid, telah dilaksanakan <u>Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat</u> dalam rangka musyawarah dan pengambilan kesepakatan mengenai <u>Penyepakatan Data Prioritas tahun 2022:</u>

#### I. BUTIR-BUTIR KESEPAKATAN

Dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengenai <u>Data Prioritas tahun 2022</u> ini disepakati beberapa hal sebagai berikut :

No	Butir Kesepakatan	Instansi Terkait					
1	Data Prioritas Tahun 2022	Seluruh Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat					
	<ul> <li>Bahwa Data Prioritas Tahun 2022 ini tomemenuhi kriteria sebagai berikut:         <ol> <li>Mendukung prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Mener Rencana Kerja Pemerintah (RKP);</li> <li>Mendukung pencapaian Tujuan (TPB/SDGs); dan/atau</li> <li>Memenuhi kebutuhan mendesak atau sepenentuan Data Prioritas Tahun 2022 bercal. Usulan Walidata tingkat Pusat;</li> <li>Arahan Dewan Pengarah.</li> </ol> </li> <li>Penetapan Data Prioritas Tahun 2022 da Pembina Data dan Kelompok Kerja Forum Seserta difasilitasi oleh Sekretariat Satu Kementerian PPN/Bappenas.</li> </ul>	dan prioritas Presiden dalam ngah Nasional (RPJMN) dan/atau Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan arahan Presiden. dasarkan: alam pelaksanaannya melibatkan Satu Data Indonesia tingkat pusat,					
2	Tindak Lanjut Data Prioritas Tahun 2022	Seluruh Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat					
	<ul> <li>Perencanaan Teknis Pengumpulan Data bersama Produsen Data/Walidata, Pengguna Data dan Pembina Data, meliputi: identifikasi variabel,</li> </ul>						



penyusunan data model, pengisian metadata, jadwal hingga penganggaran pengumpulan data;

- Tahap Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data Prioritas 2022;
- Pemantauan dan Evaluasi (semesteran tahunan) Data Prioritas 2022;
- Penyusunan usulan Data Prioritas tahun 2023.

#### 3 Implementasi Data Prioritas Tahun 2022

Seluruh Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

- Data Prioritas Tahun 2022 disepakati oleh Instansi Pusat untuk dijadikan acuan bagi Instansi Daerah dalam penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas Tingkat Daerah.
- Data Prioritas Tahun 2022 dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- Dalam proses pengumpulan Data Prioritas Tahun 2022, Walidata melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara tertulis kepada Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi Data Prioritas Tahun 2022, seluruh pengguna Data Prioritas Tahun 2022 melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas.

#### II. CATATAN TAMBAHAN

- Seluruh penyelenggara Satu Data Indonesia perlu secara persisten untuk terus mengupayakan implementasi Satu Data Indonesia.
- Data pemerintah harus dilakukan kontrol dan diperlakukan sebagai aset negara tidak berwujud, agar terkelola dan termanfaatkan dengan baik.
- Dibutuhkan kolaborasi antar penyelenggara Satu Data Indonesia agar setiap Instansi Kementerian/Lembaga dapat menghasilkan Data yang valid dan akurat sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- Diperlukan sistem yang dapat mengkonsolidasi data keuangan di tingkat daerah, dengan manajemen data referensi dan master data yang baik dan terintegrasi.

20

#### III. PENUTUP

Berita Acara Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengenai <u>Data Prioritas Tahun 2022</u> ini berlaku sebagai panduan pelaksanaan tindak lanjut implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang sah. Berita Acara sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Pasal 28 ayat (4) dan 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, bahwa Data Prioritas disepakati pada Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Jakarta, 21 Juni 2022 Pihak dibawah ini selaku Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat telah hadir dan menyepakati Data Prioritas Tahun 2022					
Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat					
tudyforan					
(Rudy S. Prawirad	inata, MCRP., Ph.D.)				
Ketua Kelompok Kerja Interoperabilitas dan Portal SDI	Ketua Kelompok Kerja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan				
/ Bunder	Judanu/				
(Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc)	(Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH.)				
Ketua Kelompok Kerja Keuangan Negara	Ketua Kelompok Kerja Data Statistik				
sulmy	te Illaloty				
(Sudarto, SE, MBA, M.Kom., Ph.D., CGEIT)	(Dr.Eng. Imam Machdi, M.T.)				
Ketua Kelompok Kerja Data Spasial	Ketua Kelompok Kerja Arsitektur Data dan Informasi				
ABWijnet					
(Dr. Antonius Bambang Wijanarto)	(Nanik Murwati, S.E., M.A.)				

Jakarta, 21 Juni 2022 Pihak dibawah ini telah hadir dan menyepakati Data Prioritas Tahun 2022							
1.	Badan Informasi Geospasial	April (Phoninger, M	9.	Badan Pangan Nasional	Rus Kurzniana		
2.	Badan Intelijen Negara	JEPRI	10.	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia			
3.	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	7: x	11.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (Syama da) Thamnu			
4.	Badan Kepegawaian Negara	99 ELIP	12.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (			
5.	Badan Kependudukan dan Keluanga Berencana Nasional Washi (LINA Widyashi		13.	Badan Pusat Statistik			
6.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( )	SYNARYO	14.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Prob H.		
7.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( )	Son Al 1+ya	15.	Badan Siber dan Sandi Negara (	Hur Shots A.		
8.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	MASTRURI ARLEIN		Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (	Lew.		

Jakarta, 21 Juni 2022 Pihak dibawah ini telah hadir dan menyepakati Data Prioritas Tahun 2022							
17.	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		25.	Kementerian Keuangan	di.		
	Oloka Q wiro. Lo			(	Baters Sitor		
18.	Kementerian Agama	Andryanlo	26.	Kementerian Komunikasi dan Informatika (	Swards the		
19.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		27.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Joiren (W		
20.	Kementerian Dalam Negeri	,,,,,	28.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Bris Property		
21.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( )	Nova		Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (	Ahogan Ony Noine		
22.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	XIQ RENNIKA KA		Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah			
23.	Kementerian Kesehatan			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (	Dr.		
24.	Kementerian Ketenagakerjaan	SUPRIMA	32.	Kementerian Luar Negeri	(KETUT TRI M (STAF PUSTIKEP)		

	Pihak dibawah ini telah h	adir dan men	yepak	ati Data Prioritas Tahun 20	22
33.	Kementerian Pertahanan	AR Arues Herra	41.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Busi Cantino
34.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Paul Asido	42.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (	Acog to.
35.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Barry	43.	Kementerian Sekretariat Negara (	f. ternasio.
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Satrio 4	44.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (	68 Sanaria
37.	Kementerian Perdagangan	WAYD DYAN	45.	Kementerian Pertanian	EKO NVETO
38.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas	AGUNG 1	46.	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ( )	reparent
39.	Kementerian Perhubungan	Al Rotna fratiui	47.	Komisi Pemilihan Umum ( )	f Anton
Ю.	Kementerian Perindustrian	Ruy HERT MULTA	48. VA	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	Chapter 1

	Jakarta, 21 Juni 2022 Pihak dibawah ini telah hadir dan menyepakati Data Prioritas Tahun 2022							
49.	Ombudsman Republik Indonesia	9	57.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0102			
_	1	Jun		( )	Hadiyana.			
56.	Man Narkdina Nasionar		58.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban				
Drs	Agus Inauto, SHIM	H, M. A, PM	á	( )				
51.	Badan Pemeriksa Keuangan	Pyt	59.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia				
52.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam		60.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Prs. Aris Priodos, Ak.)	e,MA)			
53.	Dewan Ketahanan Nasional	(1/6L Lav + (2))	61.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61)			
54.	Komisi Pemberantasan Korupsi	SEL BURLOW	62.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	(Mi Aneni			
55.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	App. Hain	63.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	11. serves			
56.	Lembaga Administrasi Negara	4.	64.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Jr.			
	(	extamo,		(	AMF, "			

# Lampiran F - Metodologi Pedoman/SOP untuk Berbagi Data Terpercaya di Tingkat Nasional

Pedoman/SOP ini disusun berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) selaku produsen data dan wali data Indikator Terpercaya yang dipimpin oleh BAPPENAS melalui Focus Group Discussion (FGD). Pembahasan difokuskan pada aspek ketersediaan data, mekanisme pertukaran data, dan regulasi yang mengatur data tersebut di setiap K/L. FGD dilaksanakan pada bulan Maret - Juni 2022. Daftar peserta yang berpartisipasi dalam **FGD**<sup>26</sup> dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Daftar Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi dalam FGD <sup>27</sup>

N°	Kementerian/Lembaga	Indikator			
1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	<ul> <li>Perlindungan untuk hutan tetap</li> <li>Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi</li> <li>Pencegahan Kebakaran</li> <li>Perlindungan untuk lahan gambut</li> <li>Mitigasi perubahan iklim</li> <li>Pengendalian kualitas lingkungan hidup</li> <li>Pengelolaan hutan produksi lestari</li> <li>Pengakuan Masyarakat Hukum Adat</li> <li>Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan</li> </ul>			
2	Badan Informasi Geospasial (BIG)	<ul> <li>Perlindungan untuk hutan tetap</li> <li>Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi</li> <li>Perlindungan untuk lahan gambut</li> </ul>			
3	Badan Pusat Statistik (BPS)	Tingkat kemiskinan			
4	Kementerian Pertanian (Kementan)	<ul> <li>Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADITAPA) yang terintegrasi dalam proses pengajuan izin perkebunan</li> <li>Resolusi konflik lahan dan pertanian</li> <li>Persentase untuk petani swadaya</li> <li>Pendaftaran petani swadaya</li> <li>Produktivitas petani swadaya</li> <li>Jumlah Asosiasi/Kelompok Petani Swadaya</li> <li>Bantuan untuk petani swadaya</li> <li>Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan</li> </ul>			
5	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	<ul> <li>Akses informasi publik</li> <li>Mekanisme pengaduan</li> <li>Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten</li> </ul>			
6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan	<ul> <li>Perlindungan untuk hutan tetap</li> <li>Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi</li> <li>Perlindungan untuk lahan gambut</li> </ul>			

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Detail pelaksanaan dan hasil FGD dilampirkan dalam dokumen berjudul Membuat laporan indikator dan data Terpercaya yang telah diperbarui dan direvisi.

<sup>27</sup> Satu indikator memiliki beberapa variabel developer. Sumber data dalam satu indikator dapat berasal dari K/L yang berbeda. Sebagai contoh, indikator perlindungan hutan dan aspek kehutanan ada di bawah KLHK, sementara rencana tata ruang wilayah (RTRW) terkait dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (kedua K/L memiliki indikator yang sama).

Nº	Kementerian/Lembaga	Indikator				
	Pertanahan Nasional (ATR/BPN)					
7	Kementerian Keuangan (Kemenkeu)	Proporsi anggaran kabupaten yang dialokasikan untuk keberlanjutan				
8	Badan Pangan Nasional (BPN)	Ketahanan pangan				
9	Satu Data Indonesia (SDI)	Semua indikator				
10	Sekretariat SDG	Semua indikator				

# Lampiran G - Metodologi Pedoman/SOP Pengumpulan Data Terpercaya di Tingkat Daerah

Pedoman ini disusun berdasarkan hasil studi percontohan untuk pengumpulan data Terpercaya di 12 kabupaten dengan detail sebagai berikut:

Tabel 16. Lokasi pengumpulan data studi percontohan di tingkat daerah

Provinsi	Kabupaten
Kalimantan Timur	Kutai Timur
	Berau
	Mahakam Hulu
Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat
	Seruyan
Kalimantan Barat	Kuburaya
	Sanggau
	Sintang
	Ketapang
Nangroe Aceh Darussalam	Aceh Tamiang
	Aceh Timur
	Aceh Utara

Uji coba pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari – Maret 2022. Proses pengumpulan data melibatkan satu orang Local Assessor (LA) di tingkat Provinsi. Metode yang digunakan antara lain:

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh LA dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten yang relevan dengan indikator Terpercaya. Sebelum wawancara, LA mendapatkan izin dari BAPPEDA Provinsi untuk melakukan analisis audiens dengan OPD terkait. Wawancara dilakukan dengan berfokus pada pertanyaan mengenai ketersediaan data indikator. Berikut adalah daftar OPD yang diwawancarai:

Tabel 17. OPD yang diwawancarai

No	Indikator	Sumber data	OPD	
1	Perlindungan untuk hutan tetap	RTRWK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	
2	Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi	RTRWK	Bappeda	
3	Perlindungan untuk lahan gambut	RTRWK	Bappeda	
4	Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADITAPA) yang terintegrasi dalam proses pengajuan izin perkebunan.	SOP PADITAPA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Divisi Pemerintah	
5	Resolusi konflik lahan dan pertanian	Database Konflik Perkebunan dan Lahan	Dinas Pertanian/ Perkebunan	

#### 2. Pemeriksaan dan verifikasi dokumen

Setelah berdiskusi dengan OPD terkait, tim mengevaluasi hasil temuan di lapangan. Setelah itu proses transfer data dilakukan. Pada tahap ini, tim internal melakukan validasi dan verifikasi kesesuaian data dengan rumus indikator. Data yang tidak sesuai tidak dapat dimasukkan ke dalam analisis perhitungan Terpercaya.

#### 3. Lokakarya validasi data dengan pemerintah daerah

Lokakarya validasi indikator Terpercaya diadakan pada tanggal 28 Maret 2022 dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan OPD di 12 kabupaten. Beberapa masukan dari dinas yang hadir digunakan sebagai bahan dalam proses pengumpulan data di tingkat kabupaten. Lokakarya ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengumpulan data di tingkat daerah dan mengidentifikasi peluang dan tantangan.

#### 4. Lampiran Evaluasi studi percontohan

Setelah lokakarya validasi, Tim melakukan evaluasi untuk menentukan proses pengumpulan data yang sesuai dan mengubah rumus indikator jika diperlukan. Selain itu, tim mempekerjakan konsultan yang ahli di bidang hukum. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan utama untuk menyusun pedoman.

# Lampiran H - Penanggung jawab pemutakhiran data

Tabel 18. Skema pemutakhiran data di platform Terpercaya

Tahapan		Deskripsi	PIC	Timeline
Pengumpul kompilasi d		Skema otomatis:  Izin untuk berbagi data dan Open API Skema manual:  Unduh data yang ada di platform SDI  Melakukan kompilasi data, termasuk mentransfer data ke Excel bulk insert sesuai format yang ditentukan oleh platform  Analisis data spasial jika diperlukan  Melakukan pengujian untuk pemutakhiran data secara otomatis (Open API)	Sekretariat Terpercaya	Januari – Maret
2. Data input		Skema otomatis:  Operasi Open API, pemutakhiran data terjadi secara otomatis saat K/L melakukan pemutakhiran data  Skema manual:  • Masukkan data ke platform  • Verifikasi data dan pembersihan data untuk melakukan data input secara manual (tidak melalui skema bulk insert)	<ul> <li>Sekretariat Terpercaya akan mengolah data manual, data melalui SDI dan Open API</li> <li>Organisasi Perangkat Daerah/OPD untuk data yang bersumber dari pemerintah kabupaten.</li> <li>K/L (opsional)</li> </ul>	April
3. Pemelihara	aan data	Pemantauan eror dan keamanan data	Sekretariat Terpercaya	Secara berkala, tiga bulan sekali, setelah bulan April.

# Lampiran I - Skema pemutakhiran data berdasarkan sumber data

Tabel 19. Sumber data dibagi berdasarkan skema pemutakhiran data secara manual

N°	Indikator	SDI (Skema 1)	Situs Web K/L (Skema 2)	Mengajukan Permintaan ke Pemerintah Kabupaten (Skema 3)	Mengajuka n Permintaan ke K/L (Skema 3)
1	Perlindungan untuk hutan tetap			<b>√</b> *	<b>√</b>
2	Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi			<b>√</b> *	✓
3	Pencegahan Kebakaran	✓	<b>√</b>		
4	Perlindungan untuk lahan gambut			<b>√</b> *	✓
5	Mitigasi Perubahan Iklim	✓			
6	Pengelolaan hutan produksi lestari	<b>/**</b>			✓
7	Pengendalian kualitas lingkungan hidup	<b>√</b>			
8	Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADITAPA) yang terintegrasi dalam proses pengajuan izin perkebunan.	√		✓	
9	Pengakuan terhadap Tanah Adat				✓
10	Resolusi Konflik Lahan dan Pertanian	<b>√</b>		✓	
11	Pangsa petani swadaya	<b>/**</b>			✓
12	Pendaftaran petani swadaya	✓			
13	Ketahanan Pangan	✓	<b>√</b>		
14	Produktivitas petani kecil	✓			
15	Jumlah Asosiasi/Kelompok Petani Perkebunan	<b>√</b>			

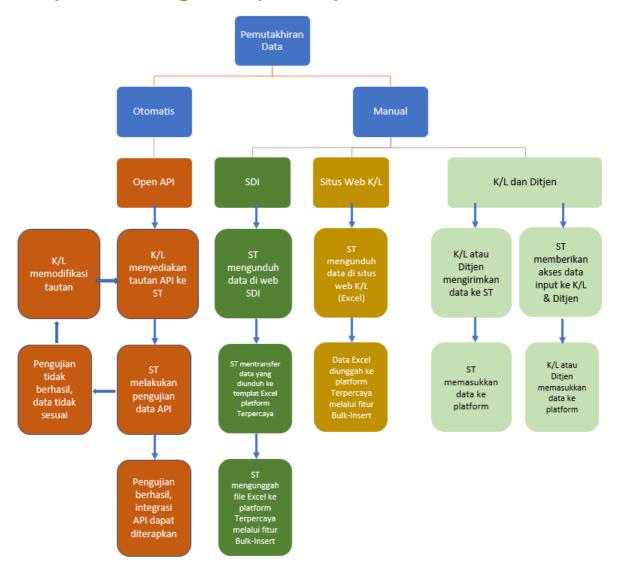
N°	Indikator	SDI (Skema 1)	Situs Web K/L (Skema 2)	Mengajukan Permintaan ke Pemerintah Kabupaten (Skema 3)	Mengajuka n Permintaan ke K/L (Skema 3)
16	Bantuan untuk petani perkebunan	<b>√</b>			
17	Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan	<b>√**</b>			
18	Tingkat Kemiskinan	✓	<b>√</b>		
19	Proporsi anggaran kabupaten yang dialokasikan untuk keberlanjutan	<b>√</b>	<b>✓</b>		
20	Akses informasi publik	✓			
21	Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten	<b>√</b>			
22	Mekanisme Pengaduan	<b>√</b>			
23	Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan	<b>√</b>			

#### Catatan:

 $<sup>\</sup>checkmark^*$  data dimasukkan dalam RTRWK

<sup>√\*\*</sup> beberapa data dalam indikator telah disetujui, tidak semuanya (sebagian)

# Lampiran J - Ringkasan proses pemutakhiran data



Catatan: Pemkab: Pemerintah Kabupaten

ST: Sekretariat Terpercaya